
LAPORAN KEUANGAN TA. 2021 (Audited)



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dalam upaya menciptakan pemerintah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab pemerintah daerah wajib untuk menyajikan laporan keuangan yang dikelolanya secara periodik. Hal tersebut ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah. Diantaranya dalam pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan yang disajikan tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, serta dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 merupakan LKPD yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), LKPD Tahun 2021 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk diperiksa.

Sehubungan dengan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021, berikut ini adalah ringkasan atas ketujuh laporan dalam LKPD Tahun 2021 :

1. Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.224.871.783.845,74 atau sebesar 104,29% dari jumlah anggaran pendapatan yang dialokasikan sebesar Rp1.174.509.182.685,00 dalam APBD-P TA. 2021. Sementara itu realisasi Belanja Daerah yang dicapai adalah sebesar Rp. 1.208.390.801.885,47 atau 86,77% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.341.886.597.440,00 dalam APBD-P TA.2021 dan realisasi Transfer yang dicapai adalah sebesar Rp226.660.638.742,00 dari anggaran sebesar Rp 226.934.222.300,00 atau 99,88% sehingga terjadi Surplus Anggaran sebesar Rp16.480.981.960,27 atau (9,85)% dari yang dialokasikan Rp(167.377.414.755,00) dalam APBD-P TA. 2021. Realisasi Pembiayaan Netto adalah sebesar Rp167.381.102.082,84 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA. 2021 adalah sebesar Rp183.862.084.043,11.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama tahun 2021. Berdasarkan laporan tersebut, SAL awal tahun 2021 adalah sebesar Rp182.256.414.754,83 dikurangi dengan penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp182.259.102.082,84 ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan sebesar Rp183.862.084.043,11 dan dikurangi koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp2.687.328,01 maka Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp183.862.084.043,11.



3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021. Neraca tersebut menginformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp2.896.210.736.080,58 Kewajiban Rp5.562.169.893,82 dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Katingan pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp2.890.648.566.186,76.
4. Laporan Operasional, menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, surplus/defisit operasional, surplus/defisit non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit – LO dari suatu entitas pelaporan. Tahun 2021 Realisasi Pendapatan – LO sebesar Rp1.245.633.171.052,67 Beban Rp1.211.847.682.253,34, Surplus/defisit Operasi sebesar Rp33.785.488.799,33, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(8.776.774.250,00) surplus/defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp(12.234.119.065,49) dan Surplus/defisit– LO Rp12.774.595.483,84.
5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Dari informasi ini diketahui bahwa jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp234.787.570.185,63, jumlah arus kas bersih dari aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan adalah sebesar Rp(233.184.588.225,36) jumlah arus kas bersih dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran adalah sebesar Rp0,00.
6. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Ekuitas Awal Rp3.129.984.721.596,92, Surplus - LO Rp12.774.595.483,84, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Koreksi nilai Persediaan Rp(128.341.100,00) Koreksi Ekuitas Lainnya Rp(251.982.409.794,00) dan Ekuitas Akhir Rp2.890.648.566.186,76.
7. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan maksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang memadai tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pemerintah Kabupaten Katingan secara konsisten akan terus berupaya meningkatkan kualitas LKPD dan pengelolaan keuangan daerah, dengan melakukan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik sebagai entitas pelaporan dan Laporan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi secara berkelanjutan.
2. Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.



4. Berupaya agar dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi.
5. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun *action plan* yang dilengkapi dengan *timeline* penyelesaian yang jelas, melakukan pembahasan dengan BPK, serta menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik.


BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Neraca

Laporan Operasional

Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Ekuitas

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Kabupaten Katingan

BAB II. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

- 2.1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas Serta Jurisdiksi Tempat Entitas
- 2.2. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

BAB III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - 3.1.1. Transfer Ke Daerah
 - 3.1.1.1. Dana Bagi Hasil
 - 3.1.1.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak
 - 3.1.1.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
 - 3.1.1.2. Dana Alokasi Umum
 - 3.1.1.3. Dana Alokasi Khusus
 - 3.1.2. Pinjaman, Obligasi dan Hibah Daerah
 - 3.1.2.1. Pinjaman Daerah
 - 3.1.2.2. Obligasi Daerah
 - 3.1.2.3. Hibah Daerah
 - 3.1.3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 3.1.3.1. Pajak Daerah
 - 3.1.3.2. Retribusi Daerah
 - 3.1.4. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
 - 3.1.4.1. Pengertian Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan



- 3.1.4.2. Penganggaran Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan
- 3.1.4.3. Penyaluran Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan
- 3.1.4.4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
- 3.1.4.5. Sanksi
- 3.2. Kebijakan Keuangan
 - 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
 - 3.2.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah
- 3.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Yang Ada Di Dalam SAP

BAB V. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah
 - 5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah
 - 5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
 - 5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - 5.1.1.2. Pendapatan Transfer
 - 5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 5.1.1.2.1.1. Dana Bagis Hasil Pajak
 - 5.1.1.2.1.2. Dana Bagis Hasil Bukan Pajak (SDA)
 - 5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus
 - 5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
 - 5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya
 - 5.1.1.2.4. Bantuan Keuangan
 - 5.1.1.3. Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah
 - 5.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.2.1. Belanja Operasi
 - 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai
 - 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa
 - 5.1.2.1.3. Belanja Subsidi



- 5.1.2.1.4. Belanja Hibah
- 5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial
- 5.1.2.2. Belanja Modal
 - 5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah
 - 5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - 5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - 5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - 5.1.2.3. Belanja Tak Terduga
- 5.1.3. Transfer
 - 5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan
 - 5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan
- 5.1.4. Surplus/(Defisit) Realisasi Anggaran
- 5.1.5. Pembiayaan
 - 5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan
- 5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Lain lain
 - 5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3. Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.1.1. Aset Lancar
 - 5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah
 - 5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan
 - 5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - 5.3.1.1.4. Kas di BLUD
 - 5.3.1.1.5. Kas di Bendahara FKTP
 - 5.3.1.1.6. Kas di Bendahara BOS
 - 5.3.1.1.7. Kas Lainnya
 - 5.3.1.1.8. Setara Kas
 - 5.3.1.1.9. Investasi Jangka Pendek
 - 5.3.1.1.10. Piutang Pendapatan
 - 5.3.1.1.11. Piutang Lainnya
 - 5.3.1.1.12. Penyisihan Piutang
 - 5.3.1.1.13. Beban Di Bayar Di Muka
 - 5.3.1.1.14. Persediaan
 - 5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang



- 5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen
- 5.3.1.2.2. Investasi Permanen
- 5.3.1.3. Aset Tetap
 - 5.3.1.3.1. Tanah
 - 5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin
 - 5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan
 - 5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya
 - 5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan
- 5.3.1.4. Dana Cadangan
- 5.3.1.5. Aset Lainnya
 - 5.3.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang
 - 5.3.1.5.2. Aset Tak Berwujud
 - 5.3.1.5.3. Aset Lain-Lain
- 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek
 - 5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka
 - 5.3.2.1.3. Utang Beban
 - 5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional – LO
 - 5.4.1. Pendapatan – LO
 - 5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO
 - 5.4.1.1.1. Pajak Daerah - LO
 - 5.4.1.1.2. Retribusi Daerah – LO
 - 5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO
 - 5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah – LO
 - 5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO
 - 5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO
 - 5.4.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak
 - 5.4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
 - 5.4.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum
 - 5.4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus
 - 5.4.1.2.1.5. Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - 5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO
 - 5.4.1.2.2.1. Dana Penyesuaian
 - 5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO
 - 5.4.1.2.3. Bantuan Keuangan - LO
 - 5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
 - 5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah – LO



- 5.4.1.3.2. Pendapatan Lainnya – LO
- 5.4.1.3.3. Pendapatan Bantuan Keuangan
- 5.4.2. Beban - LO
 - 5.4.2.1. Beban Operasi
 - 5.4.2.1.1. Beban Pegawai - LO
 - 5.4.2.1.2. Beban Persediaan
 - 5.4.2.1.3. Beban Barang dan Jasa
 - 5.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan
 - 5.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas
 - 5.4.2.1.6. Beban Bunga
 - 5.4.2.1.7. Beban Subsidi
 - 5.4.2.1.8. Beban Hibah
 - 5.4.2.1.9. Beban Bantuan Sosial
 - 5.4.2.1.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - 5.4.2.1.11. Beban Penyisihan Piutang
 - 5.4.2.1.12. Beban Lain-lain
 - 5.4.2.2. Beban Transfer
 - 5.4.2.2.1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
 - 5.4.2.2.2. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah
 - 5.4.2.2.3. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
 - 5.4.2.2.4. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
 - 5.4.2.2.5. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
- 5.4.3. Surplus/Defisit Dari Operasi - LO
- 5.4.4. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO
 - 5.4.4.2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
 - 5.4.4.3. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
 - 5.4.4.4. Defisit Penjualan Aset Non Lancar
 - 5.4.4.5. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
 - 5.4.4.6. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
- 5.4.5. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
- 5.4.6. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
- 5.4.7. Pos Luar Biasa
 - 5.4.7.1. Pendapatan Luar Biasa – LO
 - 5.4.7.2. Beban Luar Biasa – LO
- 5.4.8. Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
- 5.4.9. Surplus/Defisit – LO
- 5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.1.1. Arus Kas Masuk
 - 5.5.1.2. Arus Kas Keluar
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan



- 5.5.2.1. Arus Kas Masuk
- 5.5.2.2. Arus Kas Keluar
- 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
- 5.5.3.1. Arus Kas Masuk
- 5.5.3.2. Arus Kas Keluar
- 5.5.4. Kenaikan/Penurunan Kas
- 5.5.5. Saldo Awal Kas di BUD
- 5.5.6. Saldo Akhir Kas di BUD
- 5.5.7. Saldo Akhir Kas
- 5.6. Penjelasan Akun – Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.6.1. Ekuitas Awal
- 5.6.2. Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)
- 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
- 5.6.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
- 5.6.3.2. Koreksi Ekuitas Lainnya
- 5.6.4. Ekuitas Akhir

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Kegiatan Majelis TP/TGR Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2019
- 6.1.1. Aktivitas Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan
- 6.2. Barang Ekstrakomtabel (Extracomptable)
- 6.3. Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial.
- 6.3.1. Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02
- 6.4. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Perubahannya Nomor 39 Tahun 2012.
- 6.5. Pengelolaa Dana Dekonsentrasi
- 6.5.1. Tugas pembantuan (TP) dan Urusan Bersama (UB)

PENUTUP



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

	REF.	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%) Realisasi terhadap Anggaran	REALISASI 2020
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
	5.1.1				
	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	25.282.423.002,00	14.754.038.100,80	58,36	16.919.152.120,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	6.259.088.218,00	3.220.291.235,00	51,45	4.354.333.425,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	15.370.215.980,00	9.867.993.171,00	64,20	7.738.215.980,00
Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	33.088.271.900,00	39.194.969.521,12	118,46	31.590.003.175,23
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		80.000.000.000,00	67.037.292.027,92	83,80	60.601.704.700,23
PENDAPATAN TRANSFER					
	5.1.1.2				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT					
	5.1.1.2.1				
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	899.375.894.000,00	936.104.779.001,00	104,08	863.011.124.898,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2	0,00	0,00	-	10.079.243.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.1.3	150.640.826.000,00	150.640.826.000,00	100,00	147.441.003.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.050.016.720.000,00	1.086.745.605.001,00	103,50	1.020.531.370.898,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
	5.1.1.2.2				
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	10.764.504.784,00	36.411.231.342,82	338,25	29.884.994.312,90
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		10.764.504.784,00	36.411.231.342,82	338,25	29.884.994.312,90
Jumlah Pendapatan Transfer		1.060.781.224.784,00	1.123.156.836.343,82	105,88	1.050.416.365.210,90
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
	5.1.1.3				0,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	2.824.760.600,00	-	34.902.934.369,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	33.727.957.901,00	31.852.894.874,00	94,44	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		33.727.957.901,00	34.677.655.474,00	102,82	34.902.934.369,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.174.609.182.685,00	1.224.871.783.845,74	104,29	1.145.921.004.280,13
BELANJA					
	5.1.2				
BELANJA OPERASI					
	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	426.911.402.123,00	409.053.422.538,28	95,82	451.083.723.763,47
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	338.290.184.151,00	266.049.553.823,46	78,65	200.995.939.180,83
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	1.488.700.000,00	1.459.590.100,00	98,04	1.416.385.700,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	70.372.512.333,00	64.220.930.745,87	91,26	23.157.850.000,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	9.590.477.693,00	9.030.857.525,00	94,16	25.198.228.982,00
Jumlah Belanja Operasi		846.853.276.300,00	749.814.354.732,61	88,56	701.852.127.626,30
BELANJA MODAL					
	5.1.2.2				
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	250.000.000,00	0,00	-	721.300.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	50.025.983.978,00	42.371.889.964,60	84,70	42.605.692.336,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	64.534.814.424,00	59.853.368.408,95	92,75	38.763.843.708,97
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	133.509.870.923,00	115.350.629.751,81	86,40	52.673.339.171,69
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	968.503.999,00	840.868.500,00	86,82	3.544.637.621,00
Jumlah Belanja Modal		249.289.173.324,00	218.416.756.625,36	87,62	138.308.812.837,66
BELANJA TAK TERDUGA					
	5.1.2.3				
Belanja Tak Terduga		19.009.925.516,00	13.499.051.785,50	71,01	33.044.405.240,00
Jumlah Belanja Tak Terduga (54)		19.009.925.516,00	13.499.051.785,50	71,01	33.044.405.240,00
BELANJA TRANSFER					
	5.1.2.4				
Transfer Bagi Hasil	5.1.2.4.1	2.500.000.000,00	2.474.916.442,00	99,00	2.359.731.055,57
Transfer Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	224.434.222.300,00	224.185.722.300,00	99,89	225.280.458.715,00
Jumlah Belanja Transfer		226.934.222.300,00	226.660.638.742,00	99,88	227.640.189.770,57
JUMLAH BELANJA		1.341.886.597.440,00	1.208.390.801.885,47	90,05	1.100.845.535.474,53
SURPLUS/DEFISIT	5.1.3	(167.377.414.755,00)	16.480.981.960,27	(9,85)	45.075.468.805,60



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

	REF.	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%) Realisasi terhadap Anggaran	REALISASI 2020
PEMBIAYAAN	5.1.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		182.256.414.755,00	182.259.102.082,84	100,00	144.395.945.949,23
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		182.256.414.755,00	182.259.102.082,84	100,00	144.395.945.949,23
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
Periyetaan Modal		14.879.000.000,00	14.878.000.000,00	99,99	7.215.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		14.879.000.000,00	14.878.000.000,00	99,99	7.215.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		167.377.414.755,00	167.381.102.082,84	100,00	137.180.945.949,23
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.5	0,00	183.862.084.043,11	100,00	182.256.414.754,83

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2021	2020
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	182.256.414.754,83	144.333.845.128,11
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	182.259.102.082,84	144.395.945.949,23
Subtotal		(2.687.328,01)	(62.100.821,12)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)	5.2.3	183.862.084.043,11	182.256.414.754,83
Subtotal		183.859.396.715,10	182.194.313.933,71
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	2.687.328,01	62.100.821,12
Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.6	183.862.084.043,11	182.256.414.754,83

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

	REF.	2021	2020
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	171.480.602.731,07	172.813.740.884,88
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	0,00	46.680.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	0,00	30.597,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	9.690.018.018,34	4.838.168.077,31
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.5	1.777.925.045,72	1.916.836.691,18
Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.6	901.338.247,98	2.642.958.504,46
Kas Lainnya	5.3.1.1.7	12.200.000,00	0,00
Setara Kas	5.3.1.1.8	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.9	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.10	6.868.340.544,00	6.286.506.333,00
Piutang Retribusi daerah	5.3.1.1.11	80.946.901,00	48.997.336,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.12	0,00	0,00
Piutang lain-lain PAD yang sah	5.3.1.1.13	715.598.671,58	939.419.715,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.14	0,00	0,00
Piutang Transfer antar Daerah	5.3.1.1.15	15.536.406.135,65	14.128.261.245,30
Piutang Lainnya	5.3.1.1.16	378.119.651,00	385.119.651,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.17	(3.601.015.630,40)	(3.095.084.006,24)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.18	0,00	0,00
Persediaan	5.3.1.1.19	16.888.331.683,22	17.227.655.354,91
Jumlah Aset Lancar		220.728.811.999,16	218.177.290.383,80
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
Investasi Kepada Badan Usaha milik Negara		0,00	0,00
Investasi Kepada Badan Usaha milik Daerah			
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya		402.109.620,00	402.109.620,00
Investasi Permanen Lainnya			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		402.109.620,00	402.109.620,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		66.657.808.319,27	56.233.728.171,19
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		66.657.808.319,27	56.233.728.171,19
Jumlah Investasi Jangka Panjang		67.059.917.939,27	56.635.837.791,19
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	665.453.853.839,50	653.448.682.311,50
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	467.873.890.034,84	421.585.927.851,12
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	962.943.261.132,59	898.486.567.040,45
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.510.420.187.268,74	2.408.266.685.613,04
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	192.670.648.089,15	190.825.463.634,15
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	20.768.301.593,21	17.231.064.304,11
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.339.297.706.769,90)	(1.891.667.326.074,11)
Jumlah Aset Tetap (33 s/d 39)		2.480.832.435.188,13	2.698.177.064.680,26
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan (43)		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	707.380.077,00	707.380.077,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	10.200.910.500,00	9.459.133.900,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	123.331.777.626,03	161.949.183.788,23
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	(6.650.497.249,01)	(5.807.488.452,14)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

	REF.	2021	2020
Jumlah Aset Lainnya		127.589.570.954,02	166.308.209.313,09
JUMLAH ASET		2.896.210.736.080,58	3.139.298.402.168,34
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	0,00
Utang Bunga	5.3.2.1.2	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	5.3.2.1.3	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.4	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.5	2.000.000,00	0,00
Utang Belanja	5.3.2.1.6	5.560.169.893,82	9.313.680.571,42
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.7	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.562.169.893,82	9.313.680.571,42
Kewajiban Jangka Panjang	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri	5.3.2.2.1	0,00	0,00
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.3.2.2.2	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.2.2.3	0,00	0,00
Utang Kepada Masyarakat	5.3.2.2.4	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		5.562.169.893,82	9.313.680.571,42
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS		2.800.648.566.186,76	3.120.084.721.506,02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.896.210.736.080,58	3.139.298.402.168,34

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pajak Daerah	5.4.1.1.1	15.335.872.311,80	17.281.656.234,00	(1.945.783.922,20)	(11,26)
Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	3.250.240.800,00	4.395.404.425,00	(1.145.163.625,00)	(26,05)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	10.751.089.417,00	7.982.714.342,00	2.768.375.075,00	34,68
Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.1.1.4	29.777.933.377,70	29.465.361.528,23	312.571.848,47	1,06
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		58.115.136.906,50	58.125.136.530,23	(10.000.623,73)	(0,02)
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.4.1.2.1	1.088.745.805.001,00	1.020.531.370.898,00	66.214.234.103,00	6,49
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.4.1.2.2	37.819.370.293,17	32.244.016.228,26	5.574.798.004,91	17,29
Jumlah Pendapatan Transfer		1.124.564.981.234,17	1.052.775.989.126,26	71.788.992.107,91	6,82
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	30.100.159.038,00	52.485.922.441,00	(22.385.763.403,00)	(42,65)
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.4.1.3.2	31.852.894.874,00	0,00	31.852.894.874,00	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		61.953.053.912,00	52.485.922.441,00	9.467.131.471,00	18,04
JUMLAH PENDAPATAN		1.245.633.171.052,67	1.164.387.048.097,49	81.246.122.955,18	6,98
BEBAN					
Beban Operasi					
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	412.220.735.798,09	450.574.337.664,54	(38.353.601.866,45)	(8,51)
Beban Persediaan	5.4.2.1.2	63.178.626.007,28	72.298.082.015,00	(9.119.456.007,72)	(12,61)
Beban Jasa	5.4.2.1.3	135.841.320.214,20	95.372.951.595,98	40.468.368.618,22	42,43
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	17.036.418.574,89	16.523.008.513,96	513.410.060,93	3,11
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	50.768.706.200,00	38.150.185.380,50	20.609.580.819,50	57,00
Beban Bunga	5.4.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	5.4.2.1.7	1.459.590.100,00	1.410.385.700,00	49.204.400,00	3,05
Beban Hibah	5.4.2.1.8	57.767.730.246,75	23.157.850.000,00	34.609.880.246,75	149,45
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.9	8.920.253.640,00	24.174.639.586,00	(15.254.385.946,00)	(63,10)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.10	505.931.624,16	458.109.839,45	47.821.684,71	10,44
Beban Lain-lain	5.4.2.1.11	1.243.376.711,50	741.150.519,41	502.226.192,09	67,76
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.1.12	42.822.238.692,74	36.330.146.303,45	6.492.092.389,29	17,87
Beban Penyusutan Gedung dan Rangunan	5.4.2.1.13	18.297.991.603,62	17.142.387.904,04	1.155.603.699,58	6,74
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.1.14	168.281.055.295,44	152.373.984.279,27	15.907.071.016,17	10,44
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.1.15	0,00	201.245.728,51	(201.245.728,51)	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.1.17	843.008.796,87	858.954.233,14	(15.945.436,27)	(1,88)
Beban Bagi Hasil	5.4.2.1.18	2.474.916.442,00	2.359.731.055,57	115.185.386,43	4,88
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.1.19	224.185.722.300,00	225.280.458.715,00	(1.094.736.415,00)	(0,49)
Jumlah Beban Operasi		1.211.847.682.253,34	1.155.422.609.142,82	56.425.073.110,52	4,88
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3	33.785.488.799,33	8.964.438.954,67	24.821.049.844,66	276,88
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset non Lancar	5.4.4.1	40.868.400,00	544.385.024,00	(503.516.624,00)	(92,49)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.4.3	0,00	745.380.164,15	(745.380.164,15)	(100,00)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.4.4	8.817.642.650,00	6.090.151.421,14	2.727.491.228,86	44,70
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	(9.779.771.250,00)	(9.291.146.561,00)	(511.627.310,71)	5,51
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.4.5	25.008.714.549,33	2.673.292.393,33	22.335.422.156,00	895,50
POS LUAR BIASA					
Beban Tak Terduga	5.4.5.1	12.234.119.065,49	28.294.493.032,40	(16.060.373.966,91)	(56,76)
SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		(12.234.119.065,49)	(28.294.493.032,40)	16.060.373.966,91	(56,76)
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	5.4.6	12.774.595.483,84	(25.621.200.639,02)	38.395.796.122,86	(149,88)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		14.754.038.100,80	16.919.152.120,00
Penerimaan Retribusi Daerah		3.220.291.235,00	4.354.333.425,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		9.867.993.171,00	7.738.215.980,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		39.084.801.121,12	31.019.397.571,23
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		32.771.297.626,00	40.792.508.282,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		82.157.732.981,00	47.991.887.491,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		625.956.787.000,00	634.091.753.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		195.218.961.394,00	140.134.976.125,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		-	10.079.243.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		36.411.231.342,82	29.884.994.312,90
Penerimaan Hibah		34.677.655.474,00	34.902.934.369,00
Penerimaan Lainnya		150.640.826.000,00	147.441.003.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.224.761.615.445,74	1.145.350.398.676,13
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Pembayaran Belanja Pegawai		409.053.422.538,28	451.083.723.763,47
Pembayaran Belanja Barang		266.049.553.823,46	200.995.939.180,83
Pembayaran Belanja Subsidi		1.459.590.100,00	1.416.385.700,00
Pembayaran Belanja Hibah		64.220.930.745,87	23.157.850.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		9.030.857.525,00	25.198.228.982,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		13.499.051.785,50	33.044.405.240,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak		1.486.571.658,00	2.011.460.183,30
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Restribusi		988.344.784,00	348.270.872,27
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan		224.185.722.300,00	225.280.458.715,00
Jumlah Arus Keluar Kas		989.974.045.260,11	962.536.722.636,87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		234.787.570.185,63	182.813.676.039,26
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		40.868.400,00	570.605.604,00
Penjualan Aset Lainnya		69.300.000,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		110.168.400,00	570.605.604,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Perolehan Tanah		-	721.300.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		42.371.889.964,60	42.605.692.336,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		59.853.368.408,95	38.763.843.708,97
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		115.350.629.751,81	52.673.339.171,69
Perolehan Aset Tetap Lainnya		840.868.500,00	3.544.637.621,00
Perolehan Aset Lainnya		-	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		14.878.000.000,00	7.215.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		233.294.756.625,36	145.523.812.837,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(233.184.588.225,36)	(144.953.207.233,66)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Beban		0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2021	2020
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Beban		0,00	0,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	-
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.4	1.602.981.960,27	37.860.488.805,60
Saldo Awal Kas di BUD	5.5.5	182.256.414.754,83	144.333.845.128,11
Koreksi Penambahan/Pengurangan Saldo Awal Kas		2.687.328,01	62.100.821,12
Koreksi Reklasifikasi Saldo Kas		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD	5.5.6	183.862.084.043,11	182.256.414.754,83
Saldo Akhir Kas terdiri dari :	5.5.7		
Saldo Akhir Kas di Kasda		171.480.602.731,07	172.618.243.382,88
Saldo Akhir Kas BLUD		9.690.018.018,34	4.836.168.077,31
Saldo Akhir Kas Lainnya		2.691.463.293,70	4.755.292.697,64
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	30.597,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	46.680.000,00
Saldo Akhir Kas		183.862.084.043,11	182.256.414.754,83

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2021	2020
EKUITAS AWAL	5.6.1	3.129.984.721.596,92	3.290.512.996.927,74
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	12.774.595.483,84	(25.621.200.640,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.1	(128.341.100,00)	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3.2	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	5.6.3.3	(251.982.409.794,00)	(134.907.074.690,82)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	2.890.648.566.186,76	3.129.984.721.596,92

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





I. PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang baik, diperlukan akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah menyajikan Laporan Keuangan yang handal dan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang menyatakan Laporan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**, sedangkan Perangkat Daerah (PD) sebagai entitas akuntabilitas wajib menyusun **Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disingkat Laporan Perubahan SAL merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan yang memuat informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat dengan LPE adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas baik kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam



Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan PD yang menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan. Laporan keuangan juga disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode tahun anggaran 2021 dan Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan, jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai, dan perubahan posisi keuangan selama pelaksanaan APBD tahun 2021.

Kabupaten Katingan merupakan salah satu unit pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola, dan berkewajiban menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan tujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Molik Negara/Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kapitalisasi Aset Pemerintah Kabupaten Katingan;
24. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan;
25. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan;
26. Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik daerah Berupa Aset Tetap.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Kabupaten Katingan

II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas
- 2.2 Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 3.2 Kebijakan Keuangan
- 3.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Surplus/Defisit-LRA
 - 5.1.5 Pembiayaan
 - 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas



5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

- 5.4.1 Pendapatan – LO dari kegiatan operasional
- 5.4.2 Beban dari kegiatan operasional
- 5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi – LO
- 5.4.4 Kegiatan Non Operasional
- 5.4.5 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- 5.4.6 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
- 5.4.7 Pos Luar Biasa
- 5.4.8 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa
- 5.4.9 Surplus/defisit-LO

5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

- 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.5.4 Kenaikan/Penurunan Kas
- 5.5.5 Saldo Awal Kas di BUD
- 5.5.6 Saldo Akhir Kas di BUD
- 5.5.7 Saldo Akhir Kas

5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

- 5.6.1 Ekuitas awal
- 5.6.2 Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)
- 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
- 5.6.4 Ekuitas Akhir

VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1 Kegiatan Majelis TP/TGR Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2019
 - 6.2.1 Aktivitas Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan
- 6.2 Barang Ekstrakomtabel (*Extracomptable*)
- 6.3 Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
 - 6.4.1 Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02
- 6.5 Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Perubahannya Nomor 39 Tahun 2012
- 6.6 Pengelolaan Dana Dekonsentrasi
 - 6.6.1 Tugas pembantuan (TP) dan Urusan Bersama (UB)

VII Penutup



II. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, menyatakan bahwa Ibu kota Kabupaten Katingan berkedudukan di Kasongan. Kabupaten Katingan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri atas:

1. Kecamatan Katingan Hulu;
2. Kecamatan Marikit;
3. Kecamatan Sanaman Mantikei;
4. Kecamatan Katingan Tengah;
5. Kecamatan Pulau Malan;
6. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
7. Kecamatan Katingan Hilir;
8. Kecamatan Tasik Payawan;
9. Kecamatan Kamipang;
10. Kecamatan Petak Malai;
11. Kecamatan Bukit Raya
12. Kecamatan Mendawai; dan
13. Kecamatan Katingan Kuala.

Kabupaten Katingan mempunyai batas-batas wilayah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, serta Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Cempaga, Kecamatan Baamang, Kecamatan Mentawa, dan Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.2 Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Untuk memenuhi ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Katingan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan terdiri atas 37 Perangkat Daerah (PD) sebagaimana berikut :

1. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan



yang dilaksanakan serta serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk melaksanakan misi pemerintahan Kabupaten Katingan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan agar tercapai visi Pemerintahan Kabupaten Katingan yang cerdas, sehat dan terbuka.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah serta mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Desiminasi dan Infromasi, Persandian, Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik.
7. Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Katingan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati Katingan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati Katingan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana
10. Dinas Sosial
Dinas Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan tugas Dekonsentrasi di bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang diberikan oleh Bupati.
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, koordinasi, merencanakan, menetapkan program kerja, tata kerja



dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

13. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

14. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur Pendukung DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas secara Teknis Administratif Sekretaris DPRD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

15. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset.

16. Inspektorat Kabupaten

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

17. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu pejabat pembina kepegawaian daerah dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara Daerah dilingkungan Kabupaten Katingan.

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati Katingan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan melaksanakan ketatausahaan dinas.

19. 13Kecamatan dan 4 Kelurahan

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah.

20. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di sektor pemberdayaan masyarakat desa.

22. Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan .

24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Kabupaten Katingan beribukota di Kasongan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang menyatakan luas wilayah Kabupaten Katingan adalah 17.500 km². Namun, semenjak pembentukan wilayah tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan terus melakukan kajian penetapan tata batas administrasi. Hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan hingga saat ini adalah 20.396,76 km².

Kabupaten Katingan terletak antara 0°20'-3°38' Lintang Selatan dan 112°00'-113°45' Bujur Timur. Berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, sebelah Timur dengan Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Pulang Pisau. Sebelah Selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kabupaten Seruyan.

Secara keseluruhan Kabupaten Katingan terdiri atas 13 kecamatan, yaitu Katingan Kuala, Mendawai, Kamipang, Tasik Payawan, Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Marikit, Katingan Hulu, dan Bukit Raya. Ketiga belas kecamatan tersebut terhambat dari Selatan ke Utara, dimana Kecamatan Bukit Raya memiliki jarak terjauh ke ibukota Kabupaten yakni sejauh 291 km. Kabupaten ini dilintasi oleh sungai Katingan yang memiliki panjang ±650 km dengan banyak anak sungainya.

Rata-rata suhu udara Kabupaten Katingan tahun 2021 berada pada kisaran 28,20°C hingga 29,37°C. Lalu, rata-rata kelembaban udara Kabupaten Katingan tahun 2021 berada pada kisaran 78,30 hingga 83,18 persen. Sementara itu, curah hujan tertinggi di Kabupaten Katingan tahun 2021 terjadi pada Bulan Oktober sebesar 721,40 mm³. Dan, jumlah hujan terbanyak terjadi pada Bulan Desember 2021 sebanyak 25 hari. Data mengenai suhu udara, kelembaban udara, curah hujan dan jumlah hujan diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.

Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga program-program pembangunan berikutnya dapat lebih optimal. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS merupakan salah satu sumber informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai sosial ekonomi masyarakat, dan ada beberapa indikator yang menggambarkan capaian kerja pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyatnya. Indikator-indikator yang digunakan sebagai parameter kesejahteraan rakyatnya adalah:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- b. Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- d. Indikator Kemiskinan
- e. Gini Ratio (Koefisien Gini)
- f. Laju Inflasi
- g. Pertumbuhan Ekonomi



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur Panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Dan mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur Panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi Kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek (kemampuan membaca dan menulis) dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur mutu model manusia dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Berikut tabel mengenai Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) yang di peroleh dari hasil sensus, survei dan berbagai sumber lainnya yang menunjukkan bahwa IPM di Kabupaten Katingan mengalami peningkatan di setiap tahunnya jika dilihat dari tabel di bawah ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Katingan pada tahun 2021 sebesar 68,89 persen mengalami peningkatan sebesar 0,21 persen dari tahun 2020 sebelumnya sebesar 68,68 persen.

Tabel 3.1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota
Kalimantan Tengah Tahun 2017 – 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/ <i>Regency</i>					
1. Kotawaringin Barat	72,11	72,46	72,85	72,87	73,07
2. Kotawaringin Timur	70,17	70,56	71,16	71,31	71,38
3. Kapuas	68,04	68,68	69,38	69,48	69,63
4. Barito Selatan	69,25	69,73	70,10	70,22	70,54
5. Barito Utara	69,07	69,72	70,52	70,59	70,79
6. Sukamara	66,98	67,52	67,95	68,03	68,27
7. Lamandau	69,17	69,70	70,51	70,51	70,58
8. Seruyan	66,14	67,04	67,57	67,58	67,67
9. Katingan	67,56	67,91	68,55	68,68	68,89
10. Pulang Pisau	67,00	67,54	68,34	68,45	68,53
11. Gunung Mas	69,95	70,23	70,65	70,81	71,03
12. Barito Timur	70,57	70,82	71,34	71,39	71,47
13. Murung Raya	67,16	67,56	67,89	67,98	68,12
Kota/ <i>Municipality</i>					
Palangka Raya	79,69	80,34	80,77	80,77	80,82
Kalimantan Tengah	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25

Sumber/ Source : Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya/ Based On Census, Surveys, and Others Sources

Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap tingkat kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat yang tinggi didekati dengan PDRB perkapita. PDRB perkapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk. PDRB perkapita yang disajikan tidak memperhitungkan pendapatan yang keluar atau masuk



Kalimantan Tengah (*Net Factor Income From Abroad*), sehingga pendapatan perkapita yang disajikan belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat.

Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap tingkat kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat didekati dengan PDRB perkapita. PDRB perkapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk. PDRB perkapita yang disajikan tidak memperhitungkan pendapatan yang keluar atau masuk Katingan (*Net Factor Income from Abroad*), sehingga pendapatan perkapita yang disajikan belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil. Kemudian di dilampirkan tabel PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) dalam tiga tahun terakhir, berikut tabel PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan:

Tabel 3.1.2
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp)
Tahun 2019 – 2021

Tahun	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rp)	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)
2019	8.236.771,3	5.110.220,5
2020	8.306.475,7	4.944.306,2
2021*	9.079.209,0	5.087.479,3

*Angka Sementara

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Pada tahun 2021, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Pada tahun 2021, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Katingan mencapai 9.079.209,0 juta rupiah meningkat 7,7 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan tahun 2021 juga meningkat menjadi 5.087.479,0 juta rupiah, dengan laju pertumbuhan bernilai 1,5 persen. Pertumbuhan PDRB perkapita Katingan tahun 2021 bernilai positif hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat pada tahun tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian jumlah penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Katingan Pada tahun 2021 mencapai 163.099 jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020. Selain itu, jumlah KTP dan KK di Kabupaten Katingan tahun 2021 yaitu 167.784 buah dan 52.616 buah.

Konsep angkatan kerja menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan sebagian penduduk menjadi angkatan kerja, antara lain karena faktor ekonomi, faktor sosial maupun faktor psikologis. Dengan terdapatnya perkembangan sosial ekonomi maka kondisi angkatan kerja juga berkembang dengan berbagai variasinya, yang akhirnya akan mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sedangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Katingan tahun 2021 sebesar Rp2.962.344 tidak mengalami perubahan dibandingkan UMK Katingan tahun 2020 sebesar Rp2.962.344. Secara umum, semakin tinggi golongan umur, maka tingkat partisipasi angkatan kerja semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Katingan pada 2021 mencapai 78.140 orang yang menurun dibandingkan jumlah angkatan kerja pada 2020 yang mencapai 83.135 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang sederhana untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang sangat besar. Namun masalah lain yang juga sangat penting adalah setengah pengangguran yang didefinisikan sebagai orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Setengah pengangguran ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain banyaknya orang yang terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal karena iklim usaha yang kurang kondusif, misalnya karena perusahaan terpaksa mengurangi jumlah produksi karena berkurangnya order yang masuk sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat. Kedua konsep ini sangat berbeda, karena pengangguran adalah jumlah orang yang mencari pekerjaan sedangkan setengah pengangguran menggunakan pendekatan jam kerja. Berdasarkan data BPS jumlah pengangguran



di Kabupaten Katingan 3 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Katingan pada tahun 2021 mencapai 5,50 persen mengalami penurunan 0,19 persen dibandingkan TPT tahun 2020 yang sebesar 5,69 persen. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 sebesar 64,38 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 64,55 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari sebelumnya, kondisi ini disinyalir terjadinya peningkatan angkatan kerja baru yang belum terserap oleh lapangan kerja misalnya lulusan SMA/SMK, Diploma/Sarjana yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan langsung terjun dalam bursa angkatan kerja dan pengangguran yang dikarenakan pandemi covid-19.

Tabel 3.1.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Katingan,
Tahun 2019 – 2021

Indikator	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) <i>Labour Force Participation Rate</i>	70,79	64,55	64,38
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) <i>Labour Force Participation Rate</i>	5,45	5,69	5,50

Sumber : Data Sakernas 2019-2021 (diolah)

Kesejahteraan rakyat, kesejahteraan rakyat suatu wilayah dapat diukur dari berbagai indikator, yang *pertama* tingkat kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Presentasi penduduk miskin di Kabupaten Katingan pada tahun 2021 cenderung meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, berikut tabel yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Katingan pertahunnya. Data ini diperoleh berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, BPS/ *National Socioeconomic Survey 2021*, BPS-Statistics Indonesia:

Tabel 3.1.4
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota
Kalimantan Tengah Tahun 2017 – 2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/ <i>Regency</i>					
1. Kotawaringin Barat	13,27	12,90	12,76	11,46	12,29
2. Kotawaringin Timur	27,70	28,20	27,38	26,64	27,06
3. Kapuas	18,80	18,52	18,23	18,17	19,45
4. Barito Selatan	5,95	6,16	5,99	6,12	6,42
5. Barito Utara	6,72	6,50	6,46	6,78	7,40
6. Sukamara	1,99	1,96	2,01	2,13	2,38
7. Lamandau	2,74	2,52	2,47	2,61	2,92
8. Seruyan	14,04	14,56	14,66	14,53	15,07
9. Katingan	9,51	8,72	8,51	8,23	9,15
10. Pulang Pisau	6,64	5,71	5,39	5,21	5,43
11. Gunung Mas	6,67	5,96	5,86	5,78	6,29
12. Barito Timur	8,56	8,05	7,97	7,88	8,02
13. Murung Raya	6,75	7,39	7,21	7,18	7,31
Kota/ <i>Municipality</i>					
Palangka Raya	9,91	9,78	9,69	10,23	10,86
Kalimantan tengah	139,25	136,93	134,59	132,94	140,04

Sumber/ Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)2021, BPS/ *National Socioeconomic Survey 2021*, BPS- Statistics Indonesia

Selain tingkat kemiskinan yang mengalami peningkatan, permasalahan kemiskinan dapat di lihat dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan merupakan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedang indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 9,15 persen, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,23 persentase tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,92 persen.



Indikator *kedua* yang mempengaruhi kesejahteraan adalah gini ratio. Gini ratio merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran antara kelompok penduduk dengan skala 0 s.d 1. Kondisi selama tahun 2021 gini ratio Kabupaten Katingan turun dari 0,25 persen menjadi 0,23 persen mengalami penurunan sebesar 0,02 persen dibandingkan tahun 2020. Penurunan gini ratio ini dimungkinkan karena terjadinya penurunan pengeluaran daya beli masyarakat terutama menengah keatas yang dipengaruhi oleh wabah virus corona yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Berikut kondisi gini ratio berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, BPS/*National Socioeconomic Survey 2021, BPS-Statistics Indonesia* :

Tabel 3.1.5
Jumlah Gini Ratio Menurut Kabupaten/ Kota
Kalimantan Tengah Tahun 2017 – 2021

Komponen Pengeluaran (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
Kabupaten/ Regency					
1. Kotawaringin Barat	0,31	0,31	0,31	0,33	0,31
2. Kotawaringin Timur	0,35	0,34	0,30	0,32	0,32
3. Kapuas	0,31	0,33	0,34	0,32	0,31
4. Barito Selatan	0,33	0,32	0,30	0,31	0,29
5. Barito Utara	0,32	0,31	0,31	0,34	0,31
6. Sukamara	0,34	0,36	0,33	0,30	0,29
7. Lamandau	0,31	0,30	0,28	0,30	0,32
8. Seruyan	0,29	0,28	0,30	0,26	0,26
9. Katingan	0,27	0,30	0,27	0,25	0,23
10. Pulang Pisau	0,30	0,27	0,36	0,30	0,26
11. Gunung Mas	0,30	0,31	0,30	0,28	0,27
12. Barito Timur	0,31	0,32	0,34	0,33	0,29
13. Murung Raya	0,30	0,32	0,31	0,28	0,31
Kota/ Municipality					
Palangka Raya	0,38	0,37	0,36	0,34	0,36
Kalimantan tengah	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32

Sumber/ Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS/ *National Socioeconomic Survey 2021, BPS- Statistics Indonesia*

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif, inflasi Kalimantan Tengah yang merujuk dari dua kota amatan untuk inflasi (Kota Palangka Raya dan Kota Sampit) mulai menunjukkan peningkatan, namun masih berada pada kisaran target inflasi nasional yang sebesar 3 ± 1 persen. Inflasi Kalimantan Tengah tahun 2021 tercatat sebesar 3,32 persen, dengan nilai Indeks Harga Konsumen sebesar 108,77. Angka inflasi untuk tahun 2021 ini tercatat hanya sebesar 1,03 persen. Kenaikan realisasi inflasi pada tahun ini menunjukkan kegiatan ekonomi di Kalimantan Tengah yang berjalan menuju pemulihan ke arah normal sebelum pandemi. Inflasi tahunan atau inflasi *year-on-year* ini disebabkan oleh peningkatan indeks harga pada kelompok kesehatan (8,86 persen) kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (4,88 persen), serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau (4,88 persen). Sedangkan inflasi bulanan gabungan dari dua Kota amatan, Kota Palangka Raya dan Sampit, pada Desember 2021 terjadi karena adanya peningkatan indeks kelompok transportasi (2,97 persen), kelompok makanan, minuman dan tembakau (1,17 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,53 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,52 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,35 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga rutin (0,35 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,34 persen) dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (0,17 persen).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi bulan Desember 2021 ini merupakan inflasi bulanan tertinggi (0,99 persen) selama masa pandemi (Maret 2020) untuk Kota Palangka Raya dan tertinggi kedua (0,66 persen), setelah inflasi bulan Oktober 2021 (2,06 persen) untuk Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Dibandingkan 2020, sejak Covid-19 melanda di Maret 2020 tren inflasi bulanan di Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan dua Kota amatan, terus menurun. Namun sejak September



2021 sampai sekarang menunjukkan tren perbaikan, yang juga menunjukkan sinyal ekonomi membaik.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan mengalami tumbuh positif dari tahun 2017-2019, yakni sebesar 6,56 persen pada tahun 2017, 6,59 persen pada tahun 2018, 5,81 persen pada tahun 2019, namun mengalami tumbuh negatif sebesar 3,25 persen pada tahun 2020, lalu pada tahun 2021 mengalami tumbuh positif sebesar 2,90 persen. Fluktuasi volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 11,48% pada tahun 2021. Dari sisi permintaan akhir, sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT).

Selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, menggunakan tiga azas pemerintahan, yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang/urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang/urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan dimaksud didanai dari APBN melalui Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

Kabupaten Katingan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wujud dari pembagian penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Katingan juga wajib melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut tentu saja harus mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat, baik dalam hal dukungan anggaran ataupun pembinaan dan pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan sasarannya maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita dan tujuan



tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi pada dasarnya terdiri dari desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, komponen desentralisasi tersebut harus diaktualisasikan secara bersama-sama dan satu dengan yang lainnya harus saling mendukung.

UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peraturan pelaksanaannya telah membawa banyak perubahan yang mendasar dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Hal tersebut antara lain terlihat dari perbaikan formula pengalokasian dana-dana yang didaerahkan. Perbaikan juga dilakukan dalam mekanisme penyaluran transfer ke daerah (DAU, DAK, DBH Pajak, dan DBH SDA) yang saat ini sudah dilaksanakan langsung dari Rekening Kas Umum Negara di Bendahara Umum Negara (BUN) ke Rekening Kas Umum Daerah.

3.1.1 Transfer Ke Daerah

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi TKDD per daerah. Manfaat Transfer ke Daerah cukup signifikan dengan adanya penerapan mekanisme Transfer ke Daerah selain dapat mendorong percepatan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan APBD juga dapat meningkatkan efisiensi di semua lini dan proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban Transfer ke Daerah.

Efisiensi tersebut mencakup efisiensi birokrasi yang harus dilalui, efisiensi anggaran dari biaya yang ditimbulkan, SDM yang dibutuhkan lebih minimal, efisiensi waktu lebih cepat karena langsung ditransfer dari Rekening Kas Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), efisiensi Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan efisiensi pelaporan anggaran. Pada tahap selanjutnya, Transfer ke Daerah tersebut mendorong penggunaan satu Rekening Kas Umum Daerah untuk menampung transfer dari APBN dan APBD (*Treasury Single Account*) di daerah serta mempercepat penetapan, pelaksanaan dan penyerapan dana APBD.

Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam melaksanakan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

3.1.1.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*, penyalur DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi.

Pengaturan DBH mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka persentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan dalam APBN yang bagi hasil meliputi beberapa jenis potensi pajak dan potensi sumber daya alam



yang dikelola oleh pusat. Berjalannya sistem transfer dalam DBH mencerminkan adanya otonomi yang seluas-luasnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDH), dan pembagian seluruh atau sebagian hasil penerimaan pajak dari suatu tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya dalam rangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan adanya Bagi Hasil Pajak dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan pembiayaan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah, tidak seimbang dengan besarnya pendapatan daerah itu sendiri:

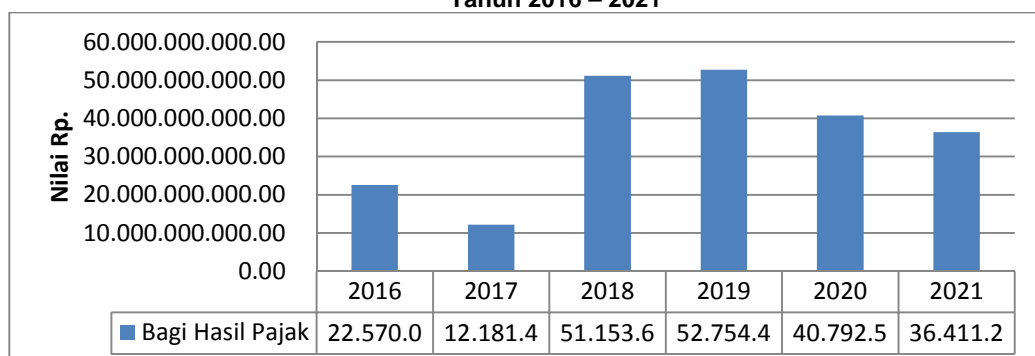
1. Keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pengumpulan dana secara mandiri;
2. Adanya jenis penerimaan pajak dan atau bukan pajak yang berdasarkan pertimbangan tertentu pemungutannya harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun obyek dan atau subyek pajaknya berada di daerah;
3. Adanya jenis penerimaan pajak dan atau bukan pajak yang berdasarkan pertimbangan tertentu pemungutannya harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun obyek dan atau subyek pajaknya berada di daerah;
4. Memperkecil kesenjangan ekonomi antar daerah;
5. Memberikan insentif kepada daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Pusat;
6. Memberikan insentif kepada daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Pusat;
7. Memberikan kompensasi kepada daerah atas timbulnya beban dari kegiatan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagi Hasil Pajak bersumber dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh) WP Orang Pribadi Dalam Negeri;
2. PPh Pasal 21;
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk Kabupaten Katingan, Dana Bagi Hasil Pajak diperoleh dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, dan pada tahun 2020 perolehannya didominasi oleh Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah tersebut terbesar diperoleh jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 3.1.6
Bagi Hasil Pajak Kabupaten Katingan
Tahun 2016 – 2021





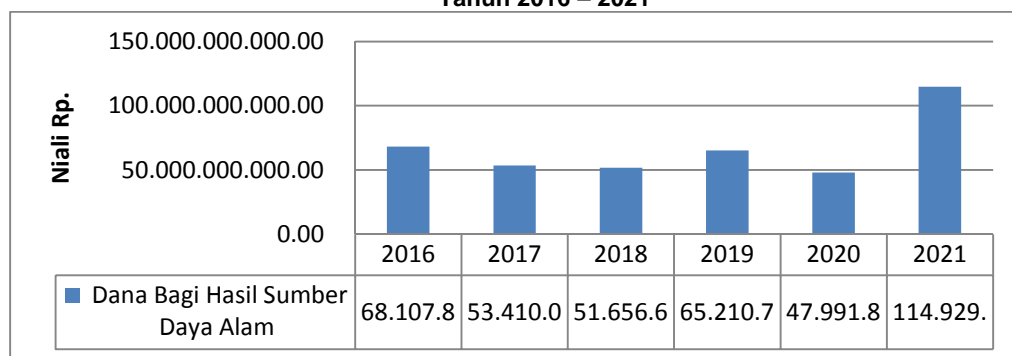
3.1.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Sumber Daya Alam berasal dari penerimaan :

1. Pertambangan Minyak Bumi
2. Pertambangan Gas Bumi
3. Pertambangan Umum
4. Pertambangan Panas Bumi
5. Kehutanan
6. Perikanan.

Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam pada Pemerintah Kabupaten Katingan bersumber dari Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Landrent*), Bagi Hasil dari Iuran Explorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalty*), Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, Bagi Hasil dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), dimana pada tahun 2021 perolehannya didominasi oleh Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalti*), Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Landrent*), Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, dan yang paling kecil memberikan kontribusi adalah Bagi Hasil Minyak Bumi.

Gambar 3.1.7
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Katingan
Tahun 2016 – 2021



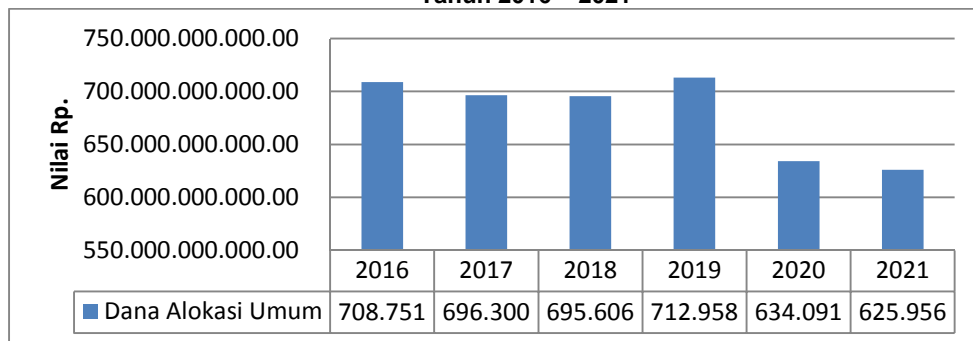
3.1.1.2 Dana Alokasi Umum

DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom Provinsi/Kabupaten/Kota disetiap tahunnya. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBD, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan DAU adalah sebagai instrumen untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Untuk itu, berhasil tidaknya alokasi DAU akan sangat ditentukan oleh tercapai tidaknya upaya perbaikan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dari tahun ke tahun. DAU untuk Kabupaten Katingan tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dapat dilihat pada berikut ini :



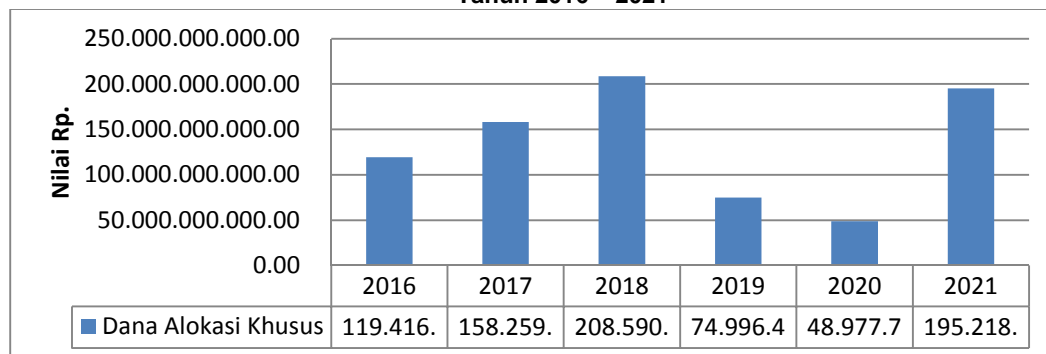
Gambar 3.1.8
Dana Alokasi Umum Kabupaten Katingan
Tahun 2016 – 2021



3.1.1.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Pada awalnya, DAK yang dialokasikan sejak tahun 2003 hanya dialokasikan untuk 5 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana jalan, prasarana irigasi, dan prasarana pemerintah. Saat ini DAK sudah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus pada 11 bidang yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana jalan, prasarana irigasi, prasarana air minum dan penyehatan lingkungan, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, kependudukan, dan kehutanan.

Gambar 3.1.9
Dana Alokasi Khusus Kabupaten Katingan
Tahun 2016 – 2021



Gambar 3.1.9 diatas menggambarkan tentang penerimaan DAK pada Kabupaten Katingan. Pada tahun 2016 Kabupaten Katingan mendapatkan DAK yang sedikit, sedangkan pada tahun 2017, 2018 mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2019. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu dibanding tahun 2020.

3.1.2 Pinjaman, Obligasi dan Hibah Daerah

3.1.2.1 Pinjaman Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko



kesinambungan fiska, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik. Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah;
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerimaan pinjaman yang di tuangkan dalam perjanjian pinjaman;
7. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah; dan
8. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

Dengan prinsip tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah seharusnya memiliki visi yang jauh ke depan untuk dapat mengelola potensi yang ada agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk dapat melayani masyarakat dengan baik. Namun demikian, mengingat pinjaman daerah mempunyai konsekuensi pada biaya yang akan terjadi pada masa yang akan datang, maka pengelolaan pinjaman daerah harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*).

Alternatif sumber-sumber pinjaman yang dapat dipilih oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan atau pengadaan pinjaman Pemerintah dari dalam maupun luar negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Indonesia; dan
5. Masyarakat, yaitu berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Berdasarkan waktunya, pinjaman daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pinjaman Jangka Pendek
Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain (termasuk biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Pinjaman Jangka Menengah



Pinjaman jangka menengah merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain (termasuk biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.

3. Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain (seperti biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda) harus dilunasi pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pengaturan tentang pembayaran kembali pinjaman daerah diatur sebagai berikut:

1. Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan; dan
2. Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan atau Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara yang menjadi hak daerah tersebut.

Pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Katingan tidak ada melakukan pinjaman daerah dalam bentuk apapun.

3.1.2.2 Obligasi Daerah

Obligasi Daerah diartikan sebagai pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Terdapat dua unsur utama yang perlu diperhatikan khusus dalam kaitannya dengan Obligasi Daerah. Unsur yang pertama adalah, berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah. Untuk melindungi fiskal daerah, Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan Obligasi Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Penerbitan Obligasi ini dimaksudkan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat kepada publik dan menghasilkan penerimaan. Pada prinsipnya, diharapkan pendapatan yang didapat dari proyek yang dibiayai Obligasi Daerah dapat menutup pokok dan bunga yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, perlu diadakan langkah-langkah penilaian atas proyek yang akan dibiayai tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kemungkinan apakah komponen-komponen dari proyek yang dimaksud di sini telah layak sehingga benar-benar dapat menghasilkan penerimaan.

Unsur yang kedua adalah mengenai penawaran umum Obligasi Daerah di pasar modal. Dalam prakteknya Obligasi Daerah dianggap sebagai efek yang bersifat utang. Jika Obligasi Daerah telah diterbitkan dan telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), maka Obligasi Daerah telah siap untuk diperjualbelikan di pasar modal. Transaksi jual beli Obligasi Daerah mengikuti mekanisme di pasar modal. Berkaitan dengan hal ini, prosedur yang perlu diikuti telah diatur sedemikian rupa melalui berbagai Keputusan Kepala Bapepam-LK dan peraturan pasar modal lainnya. Pihak yang akan menerbitkan Obligasi Daerah harus memenuhi prinsip keterbukaan di pasar modal. Prinsip keterbukaan dimaksudkan untuk memberikan informasi lengkap mengenai prospek Obligasi Daerah untuk menarik minat investor.

Obligasi Daerah merupakan efek yang bersifat utang, dimana si penerbit obligasi memiliki piutang terhadap pemegang obligasi dan si berutang berkewajiban untuk membayar pokok obligasi beserta bunganya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pemberian Obligasi Daerah. Obligasi Daerah diberikan untuk waktu yang tetap selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Secara khusus, obligasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pinjaman. Obligasi juga merupakan pinjaman, tetapi diberikan dalam bentuk surat berharga. Dalam obligasi, si peminjam



menjadi emiten dan pemberi pinjaman menjadi pemegang obligasi. Suku bunga biasanya sudah ditentukan. Kebanyakan obligasi adalah semi-tahunan, yang artinya bunga dibayarkan 2 (dua) kali dalam setahun pada pokok obligasi. Pokok obligasi itu sendiri dibayarkan dalam bentuk pembayaran tunggal pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, jumlah bunga yang telah dibayarkan adalah sama dalam tiap tahunnya sampai pembayaran pokok obligasi lunas.

Prinsip umum mengenai penerbitan Obligasi Daerah, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah;
2. Obligasi Daerah merupakan pinjaman Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah;
3. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond);
4. Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai Obligasi Daerah pada saat diterbitkan. Dengan ketentuan ini maka Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah dengan jenis *index bond* yaitu Obligasi Daerah yang nilai jatuh temponya dinilai dengan index tertentu dari nilai nominal, misalnya dengan kurs dollar atau harga emas; dan
5. Pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan Obligasi Daerah di Pasar Modal mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Katingan tidak ada menerbitkan obligasi daerah dalam bentuk apapun.

3.1.2.3 Hibah Daerah

Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain lain pendapatan. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah.

Hibah yang bersumber dari Dalam Negeri bersumber dari:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Badan/Lembaga Organisasi Swasta dalam negeri; dan
4. Kelompok masyarakat/perorangan.

Sedangkan Hibah yang bersumber dari luar negeri diperoleh dari lembaga/institusi, negara:

1. Bilateral;
2. Multilateral; dan
3. Donor lainnya.

Prinsip dasar pelaksanaan hibah daerah di Indonesia yaitu:

1. Hibah kepada Daerah bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah serta merupakan urusan daerah;
2. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri kegiatannya merupakan kebijakan Pemerintah atau dapat diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga;
3. Dalam hal Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri kegiatannya telah diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga;



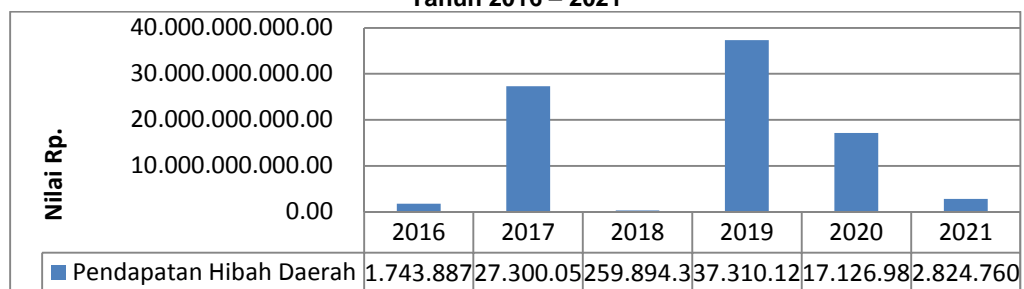
4. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari hibah luar negeri, kegiatannya dapat diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Daerah;
5. Hibah diberikan kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga terkait;
6. Hibah yang berasal dari dalam negeri dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Hibah, sementara yang berasal dari Luar Negeri dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) antara Pemerintah dan Pemberi Hibah Luar Negeri. Hibah tersebut diteruskan oleh Pemerintah kepada Daerah. Penerusannya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPPH) antara Pemerintah dengan Daerah.

Dalam pengelolaan hibah, daerah berkewajiban untuk:

1. Menyediakan fasilitas penunjang untuk kelancaran pekerjaan apabila hibah berupa jasa konsultan dan jasa lainnya. Apabila Daerah tidak menganggarkan kegiatan, pencairan hibah tidak dapat dilakukan;
2. Dana pendamping dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD).

Tahun 2021 Pendapatan Hibah yang diterima dari Badan Usaha Swasta (Pihak Ketiga) yang diperoleh Kabupaten Katingan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, menurunnya Pendapatan Hibah tahun ini disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID 19. Jika dilihat pada Gambar 3.1.10 menggambarkan naik turunnya Pendapatan Hibah yang diperoleh selama tahun tertentu. Pendapatan Hibah Daerah Kabupaten Katingan yang diterima Pemerintah untuk tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, sedangkan di tahun 2019 Pendapatan Hibah mengalami kenaikan yang sangat signifikan di bandingkan dengan tahun 2018 dan pada tahun 2021 Pendapatan Hibah kembali mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Gambar 3.1.10
Pendapatan Hibah Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 – 2021



3.1.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi.

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu.



Namun demikian, dalam pelaksanaannya provinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai.

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU.

3.1.3.1 Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah yaitu :

1. Bersifat pajak, dan bukan retribusi.
Maksudnya adalah bahwa pajak tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam UU, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan mobilitas rendah adalah obyek pajak sulit untuk dipindahkan. Contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak atas Pengambilan Sarang Burung Walet. Sedangkan yang dimaksud dengan hanya melayani masyarakat di wilayah tertentu adalah bahwa beban pajaknya hanya ditanggung oleh masyarakat lokal, contoh : Pajak Penerangan Jalan.
3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Maksudnya adalah bahwa pajak tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan/atau pusat.
5. Potensinya memadai.
Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
 - a. Aspek keadilan, antara lain, objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak, tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak, objek atau subjek atau dasar pengenaan pajak tidak membedakan (klasifikasi) orang pribadi atau badan tanpa alasan yang kuat.
 - b. Aspek kemampuan masyarakat, artinya pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.
Pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Penerimaan pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dapat dilihat pada grafik 3.1.11 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Katingan diperoleh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan



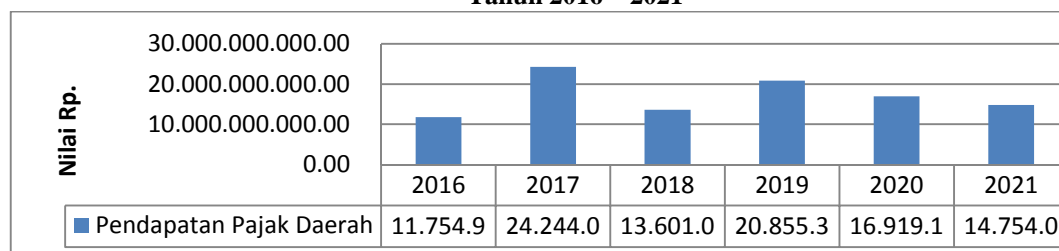
Batuan, Pajak Sarang Burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tahun 2021 Sektor Pajak Pajak Penerangan Jalan paling besar memberikan kontribusi, kemudian diikuti oleh sektor Pajak Restoran di posisi kedua dan Pajak Penerangan Jalan di posisi ketiga. Sektor Pajak PBB-P2 dan BPHTB menempati urutan keempat dan kelima dalam memberikan kontribusi penerimaan pajak daerah, diikuti Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Reklame di posisi keenam dan ketujuh serta Pajak Hotel di urutan kedelapan, sedangkan Pajak Air Tanah merupakan sektor yang memberikan kontribusi terkecil.

Secara keseluruhan Pendapatan pajak yang diterima Kabupaten Katingan mengalami penurunan pada tahun 2021 jika dibandingkan pada tahun 2019 dan 2020.

Gambar 3.1.11

**Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 – 2021**



3.1.3.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri atas tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan Perda, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dapat menetapkan jenis retribusi lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria Retribusi Daerah yaitu:

I. Retribusi Jasa Umum

- a. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan

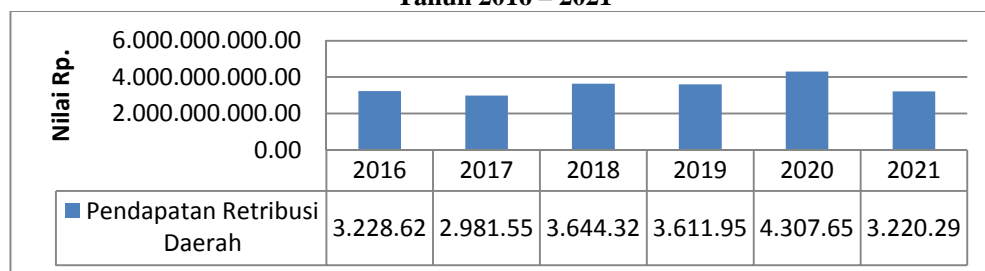


- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- II. Retribusi Jasa Usaha
 - a. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 - b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemda.
- III. Retribusi Perizinan Tertentu
 - a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
 - b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
 - c. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang-Undang bahwa pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi harus diatur dengan Perda, juga dimuat ketentuan atau materi yang harus diatur dalam Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi Bagi Pemerintah Kabupaten Katingan terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dari ketiga sektor Retribusi tersebut, Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi yang sangat besar, diikuti oleh Retribusi Jasa Usaha dan yang paling kecil memberikan kontribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu.

Pada Gambar 3.1.12 menunjukkan bahwa Pendapatan retribusi daerah Kabupaten Katingan tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah untuk Pemerintah Kabupaten Katingan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020 pendapatan retribusi daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2021 kembali mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah tahun 2020.

Gambar 3.1.12
Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 – 2021



3.1.4 Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

3.1.4.1 Pengertian Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan di daerah yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah, sedangkan pertanggungjawabannya kepada Kementerian/Lembaga yang memberikan Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan.

Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana. Dana yang diberikan untuk mendanai



sebagian kewenangan yang dilimpahkan merupakan Dana Dekonsentrasi yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi Vertikal Pusat di daerah.

Demikian pula dengan Tugas Pembantuan, dimana setiap adanya penugasan dari Kementerian/Lembaga kepada Kepala Daerah akan diikuti dengan pemberian dana. Dana yang diberikan untuk mendanai penugasan merupakan Dana Tugas Pembantuan yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan/atau desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Hal ini berarti bahwa Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

3.1.4.2 Penganggaran Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang dialokasikan untuk mendanai program dan kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Penganggaran pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Untuk Dana Dekonsentrasi, Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA-K/L yang telah ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) kepada Gubernur. Setelah menerima RKA-K/L, Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan dekonsentrasi yang terdiri dari Perangkat Daerah (PD), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran dan menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan selambat-lambatnya minggu pertama bulan Desember pada tahun berjalan. RKA-K/L tersebut juga diberitahukan oleh Gubernur kepada DPRD Provinsi pada saat pembahasan RAPBD untuk tujuan sinkronisasi program dan kegiatan yang akan didanai dari APBN dan APBD.

Untuk Dana Tugas Pembantuan, Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA-K/L yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Setelah menerima RKA-K/L tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan tugas pembantuan yang terdiri dari PD selaku Kuasa Penguasaan Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran, dan menyampaikannya kepada Kementerian/Lembaga selambat-lambatnya minggu pertama bulan Desember pada tahun berjalan. RKA-K/L tersebut juga diberitahukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD untuk tujuan sinkronisasi program dan kegiatan yang akan didanai dari APBN dan APBD.

3.1.4.3 Penyaluran Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui Rekening Kas Umum Negara.

Apabila di dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terdapat saldo, maka saldo tersebut wajib disetor ke Rekening Kas Umum Negara dan apabila menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.



3.1.4.4 Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Kepala PD Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi dan tugas pembantuan atas nama Kepala Daerahnya wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang kepada Menteri/Pimpinan Lembaga pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

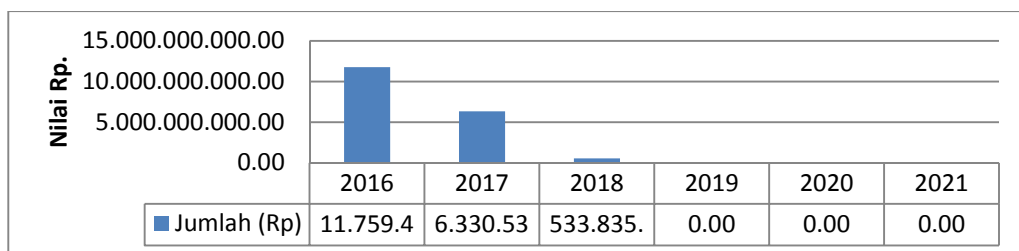
3.1.4.5 Sanksi

Dalam PP Nomor 7 Tahun 2008 menyebutkan bahwa PD yang secara sengaja atau lalai dalam menyampaikan laporan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dana untuk triwulan berikutnya atau penghentian alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya. Pengenaan sanksi tersebut tidak membebaskan PD dari kewajiban menyampaikan laporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2008.

Pengenaan sanksi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat setelah menerima rekomendasi/usulan dari Menteri/Lembaga teknis terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dana Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur, untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsetras, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan dan Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Pendanaan Dekon dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, dan kegiatan bersifat nonfisik, sedangkan pendanaan TP membiayai kegiatan yang bersifat fisik yang ditujukan kepada Gubernur/Walikota/Bupati selaku kepala daerah otonom.

Penerimaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kabupaten Katingan sangat fluktuatif, artinya dari tahun ke tahun mengalami naik turun dan Dana Tugas Pembantuan terdiri dari Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, jika dilihat dari Gambar 3.1.13 sedangkan untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 dimana anggaran tersebut tidak ada disetiap PD.

Gambar 3.1.13
Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Bagi Pemerintah
Kabupaten Katingan Tahun 2016 – 2021





3.2 Kebijakan Keuangan

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tertuang dalam RKPD 2021 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2018 – 2023 di tahun ketiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dan kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Selanjutnya untuk Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Katingan dan Kerangka Pendanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksud untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD TA 2021.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk mencapai target yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan mengarahkan kebijakan Pendapatan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kelangsungan dan tumbuh-kembangnya dunia usaha;
2. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah;
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-aset daerah;
4. Peningkatan dan pengembangan manajemen BUMD;
5. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia pengelola Pendapatan Daerah;
6. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah; dan
7. Memperbaiki sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.



3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun 2021, antara lain dari SiLPA tahun sebelumnya, serta diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lainnya.

Komponen penyediaan Dana di sektor Penerimaan Pembiayaan difokuskan pada dua aspek yaitu pertama, memprediksi kemampuan penerimaan yang akan dicapai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021, dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan. Kedua, estimasi efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2021 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan. Dari kedua aspek ini akan menghasilkan angka-angka yang dikelompokkan menjadi komponen SiLPA tahun 2021, sebagai penunjang sektor penerimaan pembiayaan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Dalam penyusunan APBD pemanfaatan segala potensi dengan penggunaan sumber daya harus secara efisien, efektif dan optimal. Sehingga perlu didasari oleh prinsip-prinsip anggaran yang memungkinkan terjadinya surplus, namun bilamana dipandang perlu dengan mengingat kepentingan pembangunan daerah maka Pemerintah Kabupaten Katingan bisa melakukan melakukan penganggaran yang melebihi kapasitas keuangannya atau defisit.

3.2.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran.

Kebijakan Belanja tahun 2021 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif melalui upaya antara lain:

1. Mengupayakan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 amandemen IV dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif;
3. Meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM, dengan prioritas menekan angka kemiskinan;



4. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Mengoptimalkan tata guna, tata kelola, dan tata produksi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
6. Memantapkan infrastruktur transportasi dan pengelolaan persampahan serta sarana prasarana dasar;
7. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa terpadu melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat;
8. Mendorong pengembangan pariwisata yang akan mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi;
9. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet dan service mobil);
 - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, dan perencanaan; dan
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah.
10. Untuk Belanja Tidak Terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan untuk peristiwa-peristiwa tidak terduga seperti penanganan bencana alam dan kebijakan nasional untuk penanganan pandemi COVID 19.

3.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan TA 2021 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Perangkat Daerah sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama TA 2021 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp1.224.871.783.845,74 atau 104,29 persen dari anggaran sebesar Rp1.174.509.182.685,00. PD yang mengelola pendapatan sebanyak 32 PD dan 1 PPKD dari 37 PD yang ada di Kabupaten Katingan sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA per PD
Tahun Anggaran 2021

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan	5.000.000,00	15.400.000,00	308,00	10.400.000,00	3.559.000,00
2	Dinas Kesehatan	8.011.421.000,00	5.210.990.000,00	65,04	(2.800.431.000,00)	9.025.485.725,00
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	15.504.050.000,00	20.232.709.808,00	130,50	4.728.659.808,00	14.083.818.599,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan	1.130.000.000,00	553.650.000,00	49,00	(576.350.000,00)	221.106.000,00
5	Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.500.600.000,00	331.662.000,00	22,10	(1.168.938.000,00)	1.067.432.100,00
6	Dinas Sosial	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00
7	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	95.600.000,00	600.000,00	0,63	(95.000.000,00)	37.317.600,00
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	411.350.000,00	355.395.900,00	86,40	(55.954.100,00)	227.378.500,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	250.000.000,00	-	0,00	(250.000.000,00)	166.000.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	517.482.000,00	434.685.000,00	84,00	(82.797.000,00)	421.406.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	350.000.000,00	264.500.000,00	75,57	(85.500.000,00)	282.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2020
13	Dinas Kebudayaan, Pemukiman, Olah Raga dan Pariwisata	245.000.000,00	65.853.500,00	26,88	(179.146.500,00)	44.880.000,00
14	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	293.665.218,00	1.235.120.600,00	420,59	941.455.382,00	229.595.880,00
15	Sekretariat Daerah	4.094.043.942,00	2.335.800.370,00	57,05	(1.758.243.572,00)	2.026.241.230,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG)	59.120.000,00	29.200.000,00	49,39	(29.920.000,00)	18.200.000,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47.459.167.840,00	36.913.840.049,92	77,78	(10.545.327.790,08)	62.857.498.759,13
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah PPKD	1.094.509.182.685,00	1.156.802.231.217,82	105,90	64.549.384.954,82	1.117.935.094.644,00
19	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)	5.800.000,00	6.200.000,00	106,90	400.000,00	5.250.000,00
20	Sekretariat DPRD	1.500.000,00	1.350.000,00	90,00	(150.000,00)	0,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	3.000.000,00
22	Kecamatan Mendawai	5.000.000,00	5.860.000,00	117,20	860.000,00	5.160.000,00
23	Kecamatan Kampang	5.000.000,00	6.225.200,00	124,50	1.225.200,00	3.450.000,00
24	Kecamatan Tasik Payawan	5.000.000,00	5.150.000,00	103,00	150.000,00	3.900.000,00
25	Kecamatan Katingan Hilir	5.000.000,00	5.500.000,00	110,00	500.000,00	4.300.000,00
26	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	5.000.000,00	5.265.000,00	105,30	265.000,00	3.150.000,00
27	Kecamatan Pulau Malan	5.000.000,00	5.050.000,00	101,00	50.000,00	3.001.000,00
28	Kecamatan Katingan Tengah	5.000.000,00	17.080.000,00	341,60	12.080.000,00	3.250.000,00
29	Kecamatan Sanaman Matikei	5.000.000,00	5.690.000,00	113,80	690.000,00	5.700.000,00
30	Kecamatan Marikit	5.000.000,00	5.203.600,00	104,07	203.600,00	4.114.000,00
31	Kecamatan Katingan Hulu	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	3.014.000,00
32	Kecamatan Petak Malai	5.000.000,00	5.021.500,00	100,43	21.500,00	4.031.500,00
33	Kecamatan Bukit Raya	5.000.000,00	5.350.000,00	100,70	350.000,00	4.000.000,00
	JUMLAH	1.174.509.182.685,00	1.224.871.783.845,74	104,48	52.618.937.582,74	1.208.702.334.537,13

Urusan pemerintah dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Katingan dilaksanakan oleh 37 PD. Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp1.341.796.597.440,00 dan terealisasi sebesar Rp1.208.390.801.885,47 atau 90,05 persen, Rincian belanja per PD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja - LRA per PD
Tahun Anggaran 2021

NO	Perangkat Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan	289.569.528.738,00	275.621.662.711,32	95,92	11.799.984.352,67	289.084.916.435,60
2	Dinas Kesehatan	248.255.447.513,00	207.196.140.709,48	83,46	41.059.306.803,52	148.515.517.689,70
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	20.340.218.078,00	15.378.859.866,97	75,61	4.961.358.211,03	16.546.638.281,16
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan	136.060.563.298,00	116.816.751.878,50	85,86	19.243.811.419,50	46.472.580.169,00
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	52.715.474.045,00	47.817.157.783,00	90,71	4.898.316.262,00	34.073.842.370,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.069.178.756,00	5.811.357.707,00	95,75	257.821.049,00	5.222.225.183,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	20.257.272.076,00	14.484.417.243,00	71,50	5.772.854.833,00	12.604.470.028,97
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.553.471.654,00	5.858.310.550,00	89,39	695.161.104,00	16.905.896.010,00
9	Dinas Sosial	6.129.009.028,00	5.775.838.985,00	94,24	353.170.043,00	4.248.130.298,00
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.344.743.985,00	5.087.230.366,00	95,18	257.513.619,00	4.147.203.919,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga	11.884.481.857,00	10.051.011.314,00	84,57	1.833.470.543,00	9.612.500.153,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	17.638.102.639,00	16.000.193.315,00	90,71	1.637.909.324,00	11.221.467.444,88
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.718.060.288,00	5.490.516.693,00	96,02	227.543.595,00	4.581.166.509,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.893.133.662,00	7.527.600.407,80	84,65	1.365.533.254,20	4.825.538.166,00
15	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	9.092.447.346,00	8.194.200.451,00	90,12	898.246.895,00	7.564.739.793,00



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

NO	Perangkat Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Lebih/ Kurang	Realisasi 2020
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	8.664.724.777,00	7.024.951.106,00	81,08	1.639.773.671,00	6.593.449.567,00
17	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	13.913.593.787,00	13.003.475.864,50	93,46	910.117.922,50	9.396.798.301,00
18	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	24.073.261.227,00	20.447.535.989,00	84,94	3.625.725.238,00	13.038.161.744,00
19	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412.124.510,00
20	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	540.999.072,00
21	Sekretariat Daerah	57.392.460.353,00	50.843.588.825,90	88,59	6.548.871.527,10	30.521.336.831,00
22	Sekretariat DPRD	34.642.584.563,00	30.694.456.749,00	88,60	3.948.127.814,00	14.395.119.415,00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.886.804.955,00	5.505.392.537,00	93,52	381.412.418,00	4.288.484.899,00
24	Kecamatan Katingan Kuala	4.465.241.671,00	4.173.769.891,00	93,47	291.471.780,00	3.955.849.099,00
25	Kecamatan Kamipang	3.034.010.244,00	2.977.114.154,00	98,12	56.896.090,00	2.436.547.353,00
26	Kecamatan Tasik Payawan	2.928.079.650,00	2.732.942.209,00	93,34	195.137.441,00	2.447.820.311,00
27	Kecamatan Katingan Hilir	6.387.038.219,00	5.892.845.677,00	92,26	494.192.542,00	5.169.648.223,00
28	Kecamatan Tewang S. Garing	4.962.241.552,00	4.082.815.511,00	82,28	879.426.041,00	4.163.723.518,00
29	Kecamatan Pulau Malan	3.250.292.793,00	3.185.402.193,00	98,00	64.890.600,00	3.097.189.120,00
30	Kecamatan Katingan Tengah	5.174.420.613,00	4.710.604.939,00	91,04	463.815.674,00	4.678.243.478,96
31	Kecamatan Sanaman Mantikei	2.506.828.144,00	2.350.233.103,00	93,75	156.595.041,00	2.063.622.592,00
32	Kecamatan Marikit	2.456.769.679,00	2.268.517.883,00	92,34	188.251.796,00	2.051.589.355,00
33	Kecamatan Katingan Hulu	3.865.552.068,00	3.399.611.542,00	87,95	465.940.526,00	3.349.101.458,00
34	Kecamatan Mendawai	2.570.293.964,00	2.393.379.876,00	93,12	176.914.088,00	2.167.718.684,00
35	Kecamatan Bukit Raya	1.903.166.531,00	1.706.092.600,00	89,64	197.073.931,00	1.546.184.442,00
36	Kecamatan Petak Malai	2.181.821.216,00	1.958.028.625,00	89,74	223.792.591,00	1.891.730.295,00
37	Inspektorat	9.555.011.323,00	8.892.382.779,00	93,07	662.628.544,00	7.356.147.494,00
38	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	10.679.036.068,00	9.046.048.823,00	84,71	1.632.987.245,00	7.867.150.588,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.419.304.034,00	17.565.136.016,50	78,35	4.854.168.017,50	24.518.856.889,69
40	BPKAD (PPKD)	255.568.544.015,00	249.056.814.167,50	97,45	6.511.729.847,50	82.816.869.922,00
41	BKPP	8.794.383.031,00	7.368.410.844,00	83,79	1.425.972.187,00	5.814.046.092,00
	Jumlah	1.341.796.597.440,00	1.208.390.801.885,47	90,05	131.257.913.880,52	873.205.345.703,96

Dari perhitungan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah di atas dapat diketahui bahwa terjadi Surplus anggaran sebesar Rp16.480.981.960,27 ditambah dengan Pembiayaan Netto Rp167.381.102.082,84 sehingga SiLPA TA 2021 adalah sebesar Rp183.862.084.043,11.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Kabupaten Katingan adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. PD bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan PD yang bertindak Perangkat Daerah (PD) adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh PD. Dan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh pemerintah provinsi (34), dan seluruh kabupaten/kota.



Entitas pelaporan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan sudah mengarah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi merupakan pilihan teknik akuntansi yang berpengaruh besar terhadap informasi keuangan yang akan dihasilkan oleh setiap organisasi, termasuk instansi pemerintah. Pilihan basis akuntansi menentukan kapan dampak keuangan suatu transaksi atau kejadian lainnya diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asling dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun



anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Aset dicatat sebagai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebagai nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan Yang Ada Didalam SAP

Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan menerapkan SAP Berbasis Akrual, terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan, terdiri dari:
 - a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Penyajian Laporan Keuangan (Kebijakan Akuntansi 01);
 - c. Laporan Realisasi Anggaran (Kebijakan Akuntansi 02);
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Kebijakan Akuntansi 02);
 - e. Neraca (Kebijakan Akuntansi 03);
 - f. Laporan Operasional (Kebijakan Akuntansi 04);
 - g. Laporan Perubahan Ekuitas (Kebijakan Akuntansi 04);
 - h. Laporan Arus Kas (Kebijakan Akuntansi 05); dan
 - i. Catatan atas Laporan Keuangan (Kebijakan Akuntansi 06).
2. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas :
 - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:

- a. Akuntansi Kas dan Setara Kas (Kebijakan Akuntansi 07)

Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiahnya dan apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah



menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penyajian saldo kas dan setara kas termuat dalam Neraca dan Laporan Arus Kas, mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena merupakan bagian dari manajemen kas.

b. Akuntansi Piutang (Kebijakan Akuntansi 08)

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah atau surat penagihan lainnya dan belum dilunasi, pengukurannya disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Penyajian piutang dilakukan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu selisih antara nominal piutang dengan penyisihan piutang yang dikelompokkan menjadi empat kategori kualitas yaitu:

- 1) Kualitas piutang lancar dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun serta tarif taksiran piutang tak tertagih sebesar 0,5% dari nilai piutang;
- 2) Kualitas piutang kurang lancar dengan kriteria umur piutang 1 – 2 tahun serta tarif taksiran piutang tak tertagih sebesar 10% dari nilai piutang;
- 3) Kualitas piutang diragukan dengan kriteria umur piutang 3 – 5 tahun serta tarif taksiran piutang tak tertagih sebesar 50% dari nilai piutang; dan
- 4) Kualitas piutang kurang lancar dengan kriteria umur piutang lebih dari 5 tahun serta tarif taksiran piutang tak tertagih sebesar 100% dari nilai piutang.

c. Akuntansi Investasi (Kebijakan Akuntansi 09)

Suatu pengeluaran pemerintah dapat diakui sebagai investasi apabila dimasa mendatang terdapat kemungkinan pemerintah akan mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, atau jasa potensial serta nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal. Berdasarkan tingkat likuiditasnya investasi dibagi menjadi dua kategori yaitu investasi jangka pendek (dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama maksimal 12 bulan) dan investasi jangka panjang (dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan). Pengukuran investasi dilakukan berdasarkan nilai/biaya perolehan dan apabila tidak memungkinkan akan diukur berdasarkan nilai wajar. Metode penilaian investasi didasarkan pada prosentase kepemilikan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan < 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20 – 50% atau < 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan
- 3) Kepemilikan > 50% menggunakan metode ekuitas.

d. Akuntansi Persediaan (Kebijakan Akuntansi 10)

Pengakuan persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pada umumnya metode penilaian persediaan yang dilakukan adalah metode FIFO (*First in First out*) dan metode pencatatan yang digunakan adalah metode periodik. Pengukuran persediaan dilakukan pada saat akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi. Selain persediaan berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang masih dalam proses produksi, barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat juga dicatat sebagai persediaan.

e. Akuntansi Aset Tetap (Kebijakan Akuntansi 11)

Aset tetap diklasifikasikan dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset tetap dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yaitu



berupa barang berwujud, masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur dengan andal, diperoleh/dibangun dengan maksud digunakan sendiri serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain dalam operasi normal entitas, nilainya memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan. Pengukuran aset tetap dilakukan berdasarkan biaya perolehan atau apabila tidak memungkinkan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, kecuali aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan.

- f. Akuntansi Aset Lainnya (Kebijakan Akuntansi 12)

Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Secara umum aset lainnya diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, serta kepemilikan atau penguasaannya berpindah berdasarkan dokumen yang sesuai dan sah. Tagihan penjualan angsuran dan tagihan kerugian daerah dinilai berdasarkan nilai nominal dalam dokumen yang resmi dikurangi dengan nilai angsuran atau setoran yang telah dilakukan ke kas umum daerah. Kemitraan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai aset yang diserahkan yang dicatat terpisah dari aset tetap. Aset tak berwujud dinilai berdasarkan nilai perolehan dikurangi nilai amortisasi yang dihitung berdasarkan metode garis lurus. Aset Lain-Lain disajikan berdasarkan nilai buku berupa aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjamkaikan kepada unit pemerintah lain, atau aset yang diserahkan kepada pihak lain tetapi belum ada dokumen penyerahannya.
- g. Akuntansi Dana Cadangan (Kebijakan Akuntansi 13)

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan berdasarkan peraturan daerah dan diakui pada saat terbitnya SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pengukuran dana cadangan berdasarkan nominal kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan tersebut. Dana cadangan disajikan dalam neraca kelompok aset non lancar, pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA – Penerimaan Pembiayaan dan Laporan Arus Kas – arus masuk kas dari aktivitas investasi, pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA – Pengeluaran Pembiayaan dan laporan arus kas – arus keluar kas dari aktivitas investasi, sedangkan pendapatan dari hasil pengelolaan dana cadangan dicatat dalam Pendapatan LO-Lain-Lain PAD yang Sah.
- h. Akuntansi Kewajiban (Kebijakan Akuntansi 14)

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek (diselesaikan dalam tempo kurang dari 12 bulan), dan kewajiban jangka panjang (diselesaikan dalam tempo lebih dari 12 bulan). Kewajiban diakui apabila besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas nilai kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur secara andal. Kewajiban diukur dan dicatat sebesar nominal kewajiban yang belum dibayar.
- i. Akuntansi Pendapatan-Laporan Operasional dan Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (Kebijakan Akuntansi 15)

Pendapatan Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas pada tahun anggaran berjalan. Pendapatan – LO diakui pada saat



timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan tersebut direalisasikan dengan masuknya sumber daya ekonomi yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Pengakuan pendapatan - LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas tahun berjalan atau diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Pendapatan - LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan nilai pendapatan bruto tanpa dikompensasi dengan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum anggaran yang menambah Saldo Anggaran Lebih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada rekening kas umum daerah (RKUD) atau kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, atau kas atas pendapatan tersebut telah diterima dan langsung digunakan tanpa disetorkan ke RKUD dengan syarat telah dilaporkan dan disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Pendapatan – LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

j. Akuntansi Beban dan Belanja (Kebijakan Akuntansi 16)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, timbulnya konsumsi aset, dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur sesuai dengan nilai perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi apabila nilai perolehan tidak diperoleh.

Belanja-LRA adalah semua pengeluaran dari RKUD dan bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran berjalan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga serta belanja transfer. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD, pada saat pengeluaran dari bendahara pengeluaran disahkan oleh unit perbendaharaan. Pengukuran belanja mempergunakan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

k. Akuntansi Transfer (Kebijakan Akuntansi 17)

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk pada LRA diakui pada saat tanggal transfer masuk ke RKUD, sedangkan transfer masuk-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan ketetapan/dokumen yang sah atau saat pendapatan direalisasikan dan diukur berdasarkan nilai nominal pada dokumen atau nominal yang masuk pada RKUD. Transfer keluar pada LRA diakui saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar dan diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum disana, sedangkan transfer keluar pada LO diakui pada saat terbitnya SP2D atau saat terbitnya dokumen yang menyatakan kewajiban pemda kepada entitas lainnya dan diukur berdasarkan nilai nominal dalam dokumen tersebut.

l. Akuntansi Pembiayaan (Kebijakan Akuntansi 18)

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali pada tahun



anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterima/dikeluarkan dari RKUD dan diukur berdasarkan azas bruto.

- m. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan (Kebijakan Akuntansi 19)

Koreksi atas kesalahan dapat disebabkan antara lain oleh keterlambatan bukti transaksi, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan atau interpretasi. Terhadap kesalahan segera dilakukan koreksi segera setelah diketahui pada akun yang bersangkutan dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi dapat berupa perubahan didalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode serta estimasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan dalam Laporan perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

**V. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN****5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Pendapatan-LRA adalah Pendapatan Daerah yang diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
2. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai Pendapatan Daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Pendapatan kas yang diterima PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerimaan wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakui sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengukuran terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Penjelasan masing-masing Akun LRA sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan**Rp1.224.871.783.845,74**

Jumlah anggaran Pendapatan tahun 2021 sebesar Rp1.174.509.182.685,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan TA 2021. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp1.224.871.783.845,74 atau 104,29% dari realisasi target pendapatan yang dianggarkan dalam APBD. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.1
Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
PENDAPATAN - LRA	1.174.509.182.685,00	1.224.871.783.845,74	104,29	1.145.921.004.280,13
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	80.000.000.000,00	67.037.292.027,92	83,80	60.601.704.700,23
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.060.781.224.784,00	1.123.156.836.343,82	105,88	1.050.416.365.210,90
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	33.727.957.901,00	34.677.655.474,00	102,82	34.902.934.369,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp1.145.874.324.280,13 realisasi pencapaian target pendapatan pada tahun 2021 sebesar Rp1.224.871.783.845,74 mengalami kenaikan Rp78.950.781.565,61 hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Meningkatnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah diakibatkan situasi perekonomian mulai bangkit setelah pandemic Covid-19 dan meningkatnya upaya penagihan yang dilakukan sepanjang tahun 2021; dan
2. Naiknya penerimaan dari Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Rp67.037.292.027,92

Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Katingan terdiri dari:

Tabel 5.1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Naik/(Turun)
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	25.282.423.902,00	14.754.038.100,80	58,36	16.919.152.120,00	(2.165.114.019,20)
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	6.259.088.218,00	3.220.291.235,00	51,45	4.354.333.425,00	(1.134.042.190,00)
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	15.370.215.980,00	9.867.993.171,00	64,20	7.738.215.980,00	2.129.777.191,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	33.088.271.900,00	39.194.969.521,12	118,46	31.590.003.175,23	7.604.966.345,89
Jumlah	80.000.000.000,00	67.037.292.027,92	83,80	60.601.704.700,23	6.435.587.327,69

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Rp14.754.038.100,80

Pendapatan Pajak Daerah merupakan realisasi pendapatan dari pajak daerah dalam periode TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.3
Pendapatan Pajak Daerah Berdasarkan Objek Pajak
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pajak Hotel - LRA	93.647.805,00	64.760.000,00	69,15	64.502.805,00
Pajak Restoran - LRA	2.664.732.155,00	2.419.570.418,80	90,80	2.142.279.960,00
Pajak Hiburan - LRA	3.000.000,00	0	0,00	0
Pajak Reklame - LRA	154.000.000,00	225.107.960,00	146,17	128.216.690,00
Pajak Penerangan Jalan - LRA	13.255.850.000,00	8.037.901.397,00	60,64	7.830.941.186,00
Pajak Air Tanah - LRA	209.440.000,00	1.568.721,00	0,75	13.585.689,00
Pajak Sarang Burung Walet - LRA	277.800.000,00	432.070.700,00	155,53	333.624.550,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	3.623.953.942,00	2.309.864.677,00	63,74	1.956.036.816,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	1.000.000.000,00	683.553.366,00	68,36	887.835.809,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	4.000.000.000,00	579.640.861,00	14,49	3.562.128.615,00
Jumlah	25.282.423.902,00	14.754.038.100,80	58,36	16.919.152.120,00

Pendapatan Pajak Daerah dengan target sebesar Rp25.282.423.902,00 terealisasi sebesar Rp14.754.038.100,80 atau terealisasi 58,36%.

- Pajak reklame dan pajak sarang burung walet melampaui target yang ditetapkan selain karena adanya pelunasan piutang tahun sebelumnya juga disebabkan oleh meningkatnya kesadaran wajib pajak dan hasil dari sosialisasi dan penagihan yang intensif dari BPKAD sebagai lembaga yang menangani urusan pajak.
- Pajak-pajak lainnya tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan antara lain disebabkan oleh data wajib pajak yang belum selesai dimutakhirkan, penetapan target yang belum menganalisis potensi riil dan kegiatan penagihan yang belum berjalan dengan optimal.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.4
Pendapatan Pajak Daerah Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

PD Pemungut	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Naik/(Turun)
Sekretariat Daerah	4.089.243.942,00	2.335.800.370,00	57,12	2.026.241.230,00	309.559.140,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	21.193.179.960,00	12.418.237.730,80	58,60	14.892.910.890,00	(2.474.673.159,20)
Jumlah	25.282.423.902,00	14.754.038.100,80	58,36	16.919.152.120,00	(2.165.114.019,20)

Terdapat 2 PD yang melakukan pemungutan atas pajak daerah yaitu Sekretariat Daerah dengan realisasi sebesar Rp2.335.800.370,00 dari target anggaran sebesar Rp4.089.243.942,00 atau 57,12% dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp12.418.237.730,80 dari target anggaran sebesar Rp21.193.179.960,00 atau 58,60%. Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan objek pajak selama Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di atas.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**Rp3.220.291.235,00**

Pendapatan Restribusi Daerah merupakan realisasi pendapatan dari retribusi daerah Kabupaten Katingan dalam periode Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.5
Pendapatan Retribusi Daerah Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

SKPD Pemungut	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dinas Pendidikan	5.000.000,00	15.400.000,00	308,00	3.559.000,00
Dinas Kesehatan	1.011.421.000,00	817.812.500,00	80,86	1.626.316.800,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	1.130.000.000,00	553.650.000,00	49,00	221.106.000,00
Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan	1.500.600.000,00	331.662.000,00	22,10	1.067.432.100,00
Dinas Sosial	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	95.600.000,00	600.000,00	0,63	37.317.600,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	411.350.000,00	355.395.900,00	86,40	227.378.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	517.482.000,00	434.685.000,00	84,00	421.406.000,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	245.000.000,00	65.853.000,00	26,88	44.880.000,00
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	293.665.218,00	202.860.000,00	69,08	109.500.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	350.000.000,00	264.000.000,00	75,43	282.000.000,00
Kecamatan Katingan Kuala	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Kecamatan Kamipang	5.000.000,00	6.225.200,00	124,50	3.450.000,00
Kecamatan Tasik Payaw an	5.000.000,00	5.150.000,00	103,00	3.900.000,00
Kecamatan Katingan Hilir	5.000.000,00	5.500.000,00	110,00	4.300.000,00
Kecamatan Tew ang Sangalang Garing	5.000.000,00	5.265.000,00	105,30	3.150.000,00
Kecamatan Pulau Malan	5.000.000,00	5.050.000,00	101,00	3.001.000,00
Kecamatan Katingan Tengah	5.000.000,00	17.080.000,00	341,60	3.250.000,00
Kecamatan Sanaman Mantikei	5.000.000,00	5.690.000,00	113,80	5.700.000,00
Kecamatan Marikit	5.000.000,00	5.203.600,00	104,07	4.114.000,00
Kecamatan Katingan Hulu	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.014.000,00
Kecamatan Mendaw ai	5.000.000,00	5.860.000,00	117,20	5.160.000,00
Kecamatan Bukit Raya	5.000.000,00	5.350.000,00	107,00	4.000.000,00
Kecamatan Petak Malai	5.000.000,00	5.021.600,00	100,43	4.031.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	59.120.000,00	29.200.000,00	49,39	18.200.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	316.350.000,00	59.027.435,00	18,66	239.916.925,00
Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	5.800.000,00	6.200.000,00	106,90	5.250.000,00
Sekretariat DPRD	1.500.000,00	1.350.000,00	90,00	0,00
Jumlah	6.259.088.218,00	3.220.291.235,00	51,45	4.354.333.425,00



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Target pendapatan retribusi tersebar di 30 PD, hanya 1 PD yang tidak teralisasi yaitu Dinas Komunikasi Persandian dan Statistik dengan pendapatan Rp.0, Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan objek retribusi selama Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.6
Pendapatan Retribusi Daerah Berdasarkan Objek Retribusi
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	1.000.000.000,00	805.365.500,00	80,54	1.626.316.800,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	140.500.000,00	104.520.400,00	74,39	104.303.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	40.000.000,00	41.317.000,00	103,29	18.800.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar Los - LRA	128.300.000,00	31.093.500,00	24,23	70.500.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	25.000.000,00	50.060.000,00	200,24	48.220.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.308.043.000,00	935.321.835,00	71,51	367.425.425,00
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan yang dikontrakkan- LRA	518.480.000,00	376.280.000,00	72,57	370.620.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	50.000.000,00	6.551.500,00	13,10	3.658.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	80.000.000,00	85.562.000,00	106,95	10.950.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA	150.000.000,00	53.047.000,00	35,36	31.588.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	223.765.218,00	135.610.500,00	60,60	123.846.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor /Sewa Alat Berat -LRA	0,00	0,00	0,00	191.356.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	1.500.000.000,00	331.062.000,00	22,07	1.067.432.100,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	350.000.000,00	264.500.000,00	75,57	282.000.000,00
Ret. Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi untuk Darat dan Sungai	0,00	0,00	0,00	37.317.600,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	6.259.088.218,00	3.220.291.235,00	51,45	4.354.333.425,00

Pendapatan Restribusi Daerah dengan target sebesar Rp6.259.088.218,00 terealisasi sebesar Rp3.220.291.235,00 atau terealisasi 51.45% sedangkan dibanding pendapatan retribusi tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp1.134.042.190,00

Pelampauan Retribusi melebihi target terdapat pada Parkir di tepi jalan umum, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Restribusi Pelayanan Pelabuhan. Sedangkan sisanya tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD, hal ini antara lain disebabkan karena:

1. Berkurangnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akibat terserapnya anggaran pemda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Sehingga kegiatan-kegiatan yang biasanya menyumbangkan pendapatan seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah menjadi berkurang;
2. Berkurangnya pendapatan Restribusi tempat khusus parkir disebabkan berkurangnya kegiatan atau keramaian akibat himbauan pemerintah untuk tetap tinggal dirumah selama wabah pandemi covid – 19;



3. Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Restribusi Pelayanan tempat olahraga juga mengalami penurunan disebabkan banyak tutupnya tempat rekreasi dan sarana olahraga akibat wabah pandemi covid – 19;
4. Model transportasi air semakin ditinggalkan masyarakat akibat semakin meratanya akses jalan darat di seluruh wilayah, berakibat tidak terealisasinya pendapatan dari retribusi ijin trayek kendaraan sungai. Selain itu juga dengan semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi dan menjamurnya sarana transportasi umum darat (taksi/travel) liar (tidak mengantongi ijin trayek) mengakibatkan realisasi retribusi ijin trayek tidak mencapai target;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing sama sekali tidak terealisasi.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp9.867.993.171,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp9.867.993.171,00 atau 64,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.370.215.980,00 Realisasi tersebut berasal dari Dividen Tahun Buku 2020 Rp9.850.815.979,00 atas investasi pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sesuai Akta Notaris Nomor 38 Tanggal 28 Mei 2021 dan Deviden PT. Jaminan Kredit Daerah Sejumlah Rp.17.177.192,00 terdiri atas Deviden tahun 2019 Sebesar Rp10.436.820,00 dan Deviden Tahun 2020 sebesar Rp6.740.372,00 berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 Tanggal 25 Agustus 2021.

Tabel 5.1.7
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Naik/(Turun)
Bank Pembangunan Kalteng	15.338.215.980,00	9.850.815.979,00	64,22	7.738.215.980,00	2.112.599.999,00
PT. Jaminan Kredit Daerah	2.000.000,00	17.177.192,00	858,86	0,00	17.177.192,00
PDAM	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	15.370.215.980,00	9.867.993.171,00	64,20	7.738.215.980,00	2.129.777.191,00

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah **Rp39.194.969.521,12**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah lain-lain selama periode TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.1.8
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2020	%	Realisasi 2020
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	269.300.000,00	110.168.400,00	40,91	575.605.604,00
Penerimaan Jasa Giro - LRA	2.432.971.900,00	908.729.453,00	37,35	2.290.383.053,00
Pendapatan Bunga - LRA	5.000.000.000,00	5.453.548.255,78	109,07	4.704.269.732,60
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	20.000.000,00	14.419.516,00	72,10	0,00
Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain-LRA	1.810.000.000,00	0,00	-	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	56.000.000,00	208.384.830,68	372,12	116.427.814,11
Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA	50.000.000,00	27.877.326,00	55,75	46.248.217,00
Pendapatan dari Pengembalian - LRA	950.000.000,00	7.834.954.431,68	824,73	2.360.146.612,52
Pendapatan BLUD - LRA	15.500.000.000,00	20.232.709.808,00	130,53	14.083.818.599,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	-	13.379.618,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	7.000.000.000,00	4.393.177.500,00	62,76	7.399.723.925,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LRA	0,00	11.000.000,00	-	0,00
Jumlah	33.088.271.900,00	39.194.969.521,14	118,46	31.590.003.175,23

Berdasarkan tabel 5.1.8, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah target sebesar Rp33.088.271.900,00 terealisasi sebesar Rp39.194.969.521,14 atau terealisasi 118,46%. apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp7.604.966.345,91. Realisasi yang melebihi target terdiri dari Pendapatan Bunga terealisasi 109,07%, Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi 372,12%, Pendapatan dari Pengembalian tereliasiasi 824,73%, dan Pendapatan BLUD terealisasi 130,53 %,

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Rp.1.123.156.836.343,82

Pendapatan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Katingan selama TA 2021 melalui Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.9
Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran TA. 2021	Realisasi TA. 2021	%	Realisasi TA. 2020
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.050.016.720.000,00	1.086.745.605.001,00	103,50	1.020.531.370.898,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	10.764.504.784,00	36.411.231.342,82	338,25	29.884.994.312,90
Jumlah	1.060.781.224.784,00	1.123.156.836.343,82	105,88	1.050.416.365.210,90

Terdapat perubahan format dalam penyajian Pendapatan Transfer dengan tahun sebelumnya, pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) yang di tahun sebelumnya disajikan tersendiri di akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sekarang disajikan masuk kedalam rincian akun Pendapatan Transfer pemerintah Pusat.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Rp1.086.745.605.001,00

Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan dana Desa. Pagu dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.1.10
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran TA. 2021	Realisasi TA. 2021	%	Realisasi TA. 2020
Dana Perimbangan	899.375.894.000,00	936.104.779.001,00	104,08	863.011.124.898,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	10.079.243.000,00
Dana Desa	150.640.826.000,00	150.640.826.000,00	100,00	147.441.003.000,00
Jumlah	1.050.016.720.000,00	1.086.745.605.001,00	103,50	1.020.531.370.898,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1.086.745.605.001 atau 103,50% dari target anggaran sebesar Rp1.050.016.720.000,00. Realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp66.214.234.103,00 atau 6,49% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan**Rp.936.104.779.001,00**

Dana Perimbangan merupakan bagian pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.11
Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran TA. 2021	Realisasi TA. 2021	%	Realisasi TA. 2020
Dana Bagi Hasil	68.756.117.000,00	114.929.030.607,00	167,15	88.784.395.773,00
Dana Alokasi Umum	625.956.787.000,00	625.956.787.000,00	100,00	634.091.753.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	107.968.538.000,00	104.062.115.932,00	96,38	48.977.786.316,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	96.694.452.000,00	91.156.845.462,00	94,27	91.157.189.809,00
Jumlah	899.375.894.000,00	936.104.779.001,00	104,08	863.011.124.898,00

Dana Bagi Hasil target sebesar Rp68.756.117.000,00 terealisasi sebesar Rp114.929.030.607,00 atau terealisasi 167,15% mengalami peningkatan Rp26.144.634.834,00. Dana Alokasi Umum terealisasi 100% sebesar Rp625.956.787.000,00 mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.134.966.000,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik target sebesar Rp107.968.538.000,00 terealisasi Rp104.062.115.932,00 atau sebesar 96,38% mengalami peningkatan dari realisasi sebelumnya sebesar Rp55.084.329.616,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari pagu sebesar Rp96.694.452.000,00 terealisasi sebesar Rp91.156.845.462,00 atau sebesar 94,27% atau mengalami penurunan sebesar Rp344.347,00 dari tahun sebelumnya.

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)**Rp0,00**

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Katingan tidak memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp10.079.243.000,00 dari pencatatan tahun sebelumnya.

5.1.1.2.1.3 Dana Desa**Rp150.640.826.000,00**

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa terealisasi



100% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.640.826.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.199.823.000,00 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp147.441.003.000,00.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah **Rp36.411.231.342,42**

Pendapatan yang berasal dari Transfer Antar Daerah untuk TA. 2021 terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yang ditransfer di tahun 2021 sebesar Rp36.411.231.342,42.

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil **Rp36.411.231.342,42**

Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yang ditransfer di tahun 2021 sebesar Rp36.411.231.342,42, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.12
Pendapatan Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran TA. 2021	Realisasi TA. 2021	%	Realisasi TA. 2020
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.295.818.342,00	5.888.892.526,87	454,45	3.572.698.082,92
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.446.778.789,00	6.467.580.565,80	447,03	4.715.033.137,45
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	4.981.303.626,00	16.034.460.323,65	321,89	14.793.931.046,24
Pajak Pengembalian Dan Pemanfaatan Air Permukaan	9.800.842,00	18.487.019,10	188,63	12.246.423,29
Pajak Rokok	3.030.803.185,00	8.001.810.907,00	264,02	6.791.085.623,00
Jumlah	10.764.504.784,00	36.411.231.342,42	338,25	29.884.994.312,90

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah **Rp34.677.655.474,00**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Katingan selama Tahun Anggaran 2021 berasal Pendapatan atas hibah ini berasal dari pihak ketiga (Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri) dan pendapatan dari Hibah Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yakni berupa dana BOS dan Bansos Pendidikan yang tidak dianggarkan dalam APBD akan tetapi wajib disajikan dalam Laporan Realisasi APBD berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 02, yang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.13
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Hibah	0,00	2.824.760.600,00	0,00	34.902.934.369,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	33.727.957.901,00	31.852.894.874,00	94,44	0,00
Jumlah	33.727.957.901,00	34.677.655.474,00	102,82	34.902.934.369,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah **Rp2.824.760.600,00**

Pendapatan hibah ini berasal dari pemerintah pusat/daerah lainnya serta pihak ketiga (Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri), penyajian akun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang menyajikan pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Secara rinci pendapatan hibah dapat disajikan sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.14
Pendapatan Hibah
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	1.032.260.600,00	0,00	34.902.934.369,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	1.792.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	2.824.760.600,00	0,00	34.902.934.369,00

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp2.824.760.600,00 terealisasi berupa:

- Sumbangan Pihak Ketiga Sebesar Rp.1.792.500.000,00
- Hibah dari Badan Usaha Swasta sebesar Rp.1.032.260.600 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.15
Pendapatan Hibah Badan Usaha Swasta
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi
Set .PT Dharma Kencana	111.177.210,00
Set. PT Putra Katingan Pratama	50.000.000,00
Set. PT Arjuna Utama Sawit	225.000.000,00
Set .PT Bisma Dharma Kencana	136.083.390,00
Set. PT Trubus Bumi Sejahtera/Distan	25.000.000,00
Set. PT Pagatan Usaha Makmur/Distan	10.000.000,00
Set. PT Katingan Mujur Sejahtera/Distan	25.000.000,00
Set. PT Dewi Karya Putra	300.000.000,00
Set. Mustorif	150.000.000,00
Jumlah	1.032.260.600,00

5.1.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Rp31.852.894.874,00

Merupakan hibah dari Pemerintah Propinsi dalam bentuk dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) kepada sekolah-sekolah SDN dan SMPN di Kabupaten Katingan sebesar Rp31.852.894.874,00.

Tabel 5.1.16
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Lain-Lain Pendapatan	33.727.957.901,00	31.852.894.874,00	94,44	0,00
Jumlah	33.727.957.901,00	31.852.894.874,00	94,44	0,00

**5.1.2 Belanja****Rp1.208.390.801.885,47**

Pada TA 2021, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2021 serta Realisasi TA 2021 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.17
Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Operasi	846.653.276.300,00	749.814.354.732,61	88,56	701.852.127.626,30
Belanja Modal	249.289.173.324,00	218.416.756.625,36	87,62	138.308.812.837,66
Belanja Tak Terduga	19.009.925.516,00	13.499.051.785,50	71,01	33.044.405.240,00
Belanja Transfer	226.934.222.300,00	226.660.638.742,00	99,88	227.640.189.770,57
Jumlah	1.341.886.597.440,00	1.208.390.801.885,47	90,05	1.100.845.535.474,53

Anggaran Belanja TA 2021 sebesar Rp1.341.886.597.440,00 terealisasi Rp1.208.390.801.885,47 atau 90,05% jika dibandingkan Realisasi Belanja TA 2020 Rp1.100.845.535.474,53 mengalami kenaikan sebesar Rp107.545.266.411.

5.1.2.1 Belanja Operasi**Rp749.814.354.732,61**

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Katingan dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran dan realisasi TA 2021 dan TA 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.1.18
Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Pegawai	426.911.402.123,00	409.053.422.538,28	95,82	451.083.723.763,47
Belanja Barang dan Jasa	338.290.184.151,00	266.049.553.823,46	78,65	200.995.939.180,83
Belanja Subsidi	1.488.700.000,00	1.459.590.100,00	98,04	1.416.385.700,00
Belanja Hibah	70.372.512.333,00	64.220.930.745,87	91,26	23.157.850.000,00
Belanja Bantuan Sosial	9.590.477.693,00	9.030.857.525,00	94,16	25.198.228.982,00
Jumlah	846.653.276.300,00	749.814.354.732,61	88,56	701.852.127.626,30

Dari anggaran Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp846.653.276.300,00 dapat terealisasi Rp749.814.354.732,61 atau 88,56%, dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp701.852.127.626,30 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp47.962.227.106,00. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai**Rp409.053.422.538,28**

Dari Anggaran untuk Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp426.911.402.123,00 dapat terealisasi Rp409.053.422.538,28 atau 95,82%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp451.083.723.763,47 berarti mengalami penurunan sebesar Rp42.030.301.225,19. Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Daerah, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan pimpinan & anggota DPRD, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Uang Lembur, Belanja Honorarium PNS/Non PNS, dan belanja Pegawai BLUD dengan Anggaran dan Realisasi TA 2021 serta Realisasi TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.19
Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan	224.630.662.276,00	218.042.101.001,00	97,07	223.479.781.276,00
2	Dinas Kesehatan	61.366.178.059,00	59.380.037.616,40	96,76	67.572.000.827,00
3	BLUD Mas Amsyar	5.500.000.000,00	3.942.109.293,88	71,67	5.237.554.735,47
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	5.541.801.264,00	5.281.606.854,00	95,30	6.974.176.034,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.644.790.859,00	3.500.228.526,00	96,03	5.636.075.735,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.741.216.126,00	2.607.079.069,00	95,11	4.542.242.123,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	4.785.743.515,00	4.519.703.546,00	94,44	11.158.437.228,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.861.696.076,00	2.785.571.001,00	97,34	2.869.097.353,00
9	Dinas Sosial	2.835.089.878,00	2.653.531.629,00	93,60	2.898.515.344,00
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.164.655.475,00	2.949.255.699,00	93,19	3.231.795.896,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.432.268.204,00	3.361.340.786,00	97,93	4.026.752.442,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	4.015.398.016,00	3.880.800.270,00	96,65	5.313.741.582,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.565.409.844,00	2.378.831.843,00	92,73	3.206.560.890,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.166.899.678,00	2.852.152.077,00	90,06	3.370.030.419,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	3.505.661.345,00	3.261.186.443,00	93,03	3.611.396.352,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	3.295.283.802,00	3.165.989.877,00	96,08	3.595.150.705,00
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.469.407.592,00	3.349.326.707,00	96,54	4.137.007.904,00
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	8.598.414.740,00	7.609.394.724,00	88,50	7.910.742.443,00
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	0,00	11.412.124.510,00
20	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	0,00	540.999.072,00
21	Sekretariat Daerah	12.659.840.098,00	11.877.077.717,00	93,82	14.702.406.868,00
22	Sekretariat DPRD	15.071.298.842,00	14.490.908.243,00	96,15	3.780.826.371,00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.342.957.387,00	3.195.823.836,00	95,60	3.268.759.214,00
24	Kecamatan Katingan Kuala	2.031.770.325,00	1.931.801.648,00	95,08	2.140.501.359,00
25	Kecamatan Kumpang	1.648.721.547,00	1.611.765.271,00	97,76	1.654.680.353,00
26	Kecamatan Tasik Payawan	2.141.862.550,00	2.016.018.333,00	94,12	1.945.750.727,00
27	Kecamatan Katingan Hilir	3.397.803.830,00	3.163.926.648,00	93,12	3.380.418.178,00
28	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	3.180.510.368,00	2.912.237.350,00	91,57	3.078.865.546,00
29	Kecamatan Pulau Malan	2.738.437.660,00	2.682.243.817,00	97,95	2.710.344.184,00
30	Kecamatan Katingan Tengah	2.828.195.700,00	2.534.323.602,00	89,61	3.137.991.491,00
31	Kecamatan Saranan Mantikei	1.612.835.800,00	1.564.559.804,00	97,01	1.517.566.080,00
32	Kecamatan Marikit	1.490.152.367,00	1.365.519.438,00	91,64	1.403.587.818,00
33	Kecamatan Katingan Hulu	2.007.098.650,00	1.920.939.129,00	95,71	2.109.598.463,00
34	Kecamatan Mendawai	1.659.692.878,00	1.541.544.951,00	92,88	1.657.773.430,00
35	Kecamatan Bukit Raya	1.047.533.100,00	910.519.800,00	86,92	1.065.190.442,00
36	Kecamatan Petak Malai	995.949.000,00	909.358.725,00	91,31	1.100.749.995,00
37	Inspektorat Kabupaten	4.939.411.462,00	4.937.049.190,00	99,95	4.902.479.142,00
38	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	3.871.274.371,00	3.695.436.139,00	95,46	4.374.249.510,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.165.472.814,00	7.563.591.799,00	92,63	9.642.893.530,00
40	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.960.006.625,00	2.708.530.136,00	91,50	2.784.908.192,00
	Jumlah	426.911.402.123,00	409.053.422.538,28	95,82	451.083.723.763,47



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.20
Belanja Pegawai Per Objek
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	252.960.399.276,00	246.699.753.758,00	97,53	311.410.189.674,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	86.839.702.963,00	82.071.375.032,00	94,51	81.233.093.831,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	68.211.310.660,00	63.788.090.907,40	93,52	0,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	602.000.000,00	601.600.000,00	99,93	3.529.000.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.256.876.573,00	11.784.808.888,00	96,15	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	541.112.651,00	165.684.659,00	30,62	0,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	220.438.539,00
Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	1.934.801.000,00
Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	244.835.000,00
Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	43.073.143.284,00
Belanja Pegawai BLUD	5.500.000.000,00	3.942.109.293,88	71,67	5.237.554.735,47
Belanja Pegawai Dana BOS	0,00	0,00	0,00	4.200.676.700,00
JUMLAH	426.911.402.123,00	409.053.422.538,28	95,82	451.083.732.763,47

Penurunan realisasi disebabkan ada beberapa perubahan dalam struktur penganggaran diantaranya adalah perubahan pos Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS dan Belanja Uang Lembur yang di tahun sebelumnya berada di Belanja Pegawai di tahun 2021 dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Rp266.049.553.823,46

Perincian belanja barang dan jasa berdasarkan PD dan per objek Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.21
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan	12.004.210.277,00	10.027.910.021,00	83,54	37.930.257.733,60
2	Dinas Kesehatan	120.223.134.781,00	84.342.122.478,48	70,15	56.034.374.971,70
3	BLUD Mas Amsyar	12.951.393.078,00	10.543.468.308,09	81,41	10.019.686.683,69
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	17.374.939.751,00	15.096.993.306,69	86,89	3.530.230.685,00
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	13.258.139.146,00	10.112.301.957,00	76,27	7.362.429.985,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.227.558.818,00	2.137.200.721,00	95,94	650.080.060,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	12.600.697.106,00	9.697.618.697,00	76,96	1.219.282.689,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.536.182.372,00	2.917.464.322,00	82,50	10.995.908.807,00
9	Dinas Sosial	2.729.742.523,00	2.536.099.856,00	92,91	1.273.327.464,00
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.937.145.570,00	1.895.537.027,00	97,85	792.811.523,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.103.256.161,00	5.347.082.028,00	75,28	4.359.646.711,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	10.178.748.271,00	8.692.931.227,00	85,40	4.988.391.162,88
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.827.710.448,00	2.789.074.850,00	98,63	1.324.856.119,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.660.090.805,00	4.614.248.330,80	81,52	1.256.011.747,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	5.460.582.895,00	4.806.811.008,00	88,03	3.840.984.441,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	3.045.858.890,00	2.709.210.829,00	88,95	1.629.249.777,00
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan	3.875.713.035,00	3.760.734.137,00	97,03	1.422.579.397,00
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	7.033.605.128,00	5.689.351.324,00	80,89	4.938.207.301,00
19	Sekretariat Daerah	22.735.482.460,00	18.915.116.194,90	83,20	14.413.962.963,00
20	Sekretariat DPRD	17.768.202.296,00	14.466.600.796,00	81,42	10.144.313.044,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.212.476.196,00	1.981.362.703,00	89,55	807.881.685,00
22	Kecamatan Katingan Kuala	2.053.272.330,00	1.871.151.243,00	91,13	1.191.460.740,00
23	Kecamatan Kampang	1.048.121.951,00	1.031.233.883,00	98,39	660.728.000,00
24	Kecamatan Tasik Payaw an	753.672.600,00	684.379.376,00	90,81	491.069.584,00
25	Kecamatan Katingan Hilir	2.171.847.686,00	1.951.232.832,00	89,84	1.158.531.045,00
26	Kecamatan Tew ang Sangalang Garing	1.427.504.080,00	840.825.189,00	58,90	788.057.972,00
27	Kecamatan Pulau Malan	511.855.133,00	503.158.376,00	98,30	382.844.936,00
28	Kecamatan Katingan Tengah	2.039.902.561,00	1.921.781.337,00	94,21	1.306.557.987,96
29	Kecamatan Sanaman Mantikei	866.155.987,00	760.073.299,00	87,75	537.056.512,00
30	Kecamatan Marikit	908.861.814,00	873.498.445,00	96,11	633.001.537,00
31	Kecamatan Katingan Hulu	1.475.873.603,00	1.418.692.825,00	96,13	551.047.995,00
32	Kecamatan Mendaw ai	828.186.998,00	773.464.925,00	93,39	443.945.254,00
33	Kecamatan Bukit Raya	751.031.848,00	718.472.800,00	95,66	412.494.000,00
34	Kecamatan Petak Malai	902.549.476,00	765.617.900,00	84,83	557.639.300,00
35	Inspektorat Kabupaten	4.480.888.506,00	3.821.333.589,00	85,28	2.453.668.352,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	6.566.680.876,00	5.109.585.164,00	77,81	3.210.289.978,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.120.372.509,00	15.460.775.207,50	80,86	4.841.652.638,00
38	Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	5.638.536.186,00	4.465.037.311,00	79,19	2.441.418.400,00
JUMLAH		338.290.184.151,00	266.049.553.823,46	78,65	200.995.939.180,83



Tabel.5.1.22
Belanja Barang dan Jasa Per Objek
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Bahan Pakai Habis	59,499,801,420.00	48,006,365,847.18	80.68	13,887,063,210.00
Belanja Bahan/Material	-	-	0.00	4,184,273,116.70
Belanja Jasa Kantor	127,699,954,690.00	99,143,203,131.00	77.64	15,048,202,744.00
Belanja Premi Asuransi	16,523,766,695.00	13,683,151,130.50	82.81	17,076,000.00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	0.00	9,544,893,434.00
Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	0.00	6,272,221,162.88
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,170,015,000.00	842,044,000.00	71.97	366,835,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	0.00	1,549,450,000.00
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	0.00	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,685,823,680.00	2,513,553,143.00	68.20	165,730,000.00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	57,100,000.00	30,240,000.00	52.96	-
Belanja Makanan dan Minuman	-	-	0.00	9,013,513,599.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	0.00	523,979,500.00
Belanja Pakaian Kerja	-	-	0.00	219,100,000.00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	-	0.00	3,150,160,100.00
Belanja Perjalanan Dinas	76,901,688,583.00	56,768,766,206.00	73.82	36,159,185,389.50
Belanja Pemeliharaan	19,288,471,438.00	17,055,585,074.69	88.42	14,729,895,194.96
Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi dan Non Kontruksi	15,958,734,567.00	14,157,539,840.00	88.71	3,567,946,463.00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	0.00	23,761,617,142.00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3,848,335,000.00	3,149,732,643.00	81.85	890,234,400.00
Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	150,000,000.00	50,904,500.00	33.94	-
Belanja Uang dan /atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	555,100,000.00	105,000,000.00	18.92	2,356,200,000.00
Belanja Barang Dana BOS	-	-	0.00	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	12,951,393,078.00	10,543,468,308.09	81.41	10,019,686,683.69
Belanja Pemeriksaan Laboratorium	-	-	0.00	62,235,000.00
Belanja Jasa Medik dan Perawatan	-	-	0.00	11,783,848,711.50
Belanja Peralatan Pemeliharaan Taman	-	-	0.00	72,179,850.00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	-	-	0.00	990,137,130.00
Belanja Jasa Komunikasi/Telepon Seluler	-	-	0.00	27,772,531.00
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	0.00	1,312,745,328.00
Belanja Operasional Penyuluhan KB dan Pengolahan Data	-	-	0.00	31,313,157,490.60
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS - LRA	-	-	0.00	4,000,000.00
Belanja Biaya Jasa Pembuatan Jurnal / Artikel	-	-	0.00	2,600,000.00
Jumlah	338,290,184,151.00	266,049,553,823.46	78.65	200,995,939,180.83

Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp338.290.184.151,00 dapat terealisasi Rp266.049.553.823,46 atau 78,65%, dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp200.995.939.180,83 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp65.053.614.642,63 Termasuk realisasi yang dapat dikategorikan sebagai Belanja Barang dan Jasa yaitu Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak ketiga ,dan Belanja Uang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Rp1.459.590.100,00

Anggaran Belanja Subsidi TA 2021 sebesar Rp1.488.700.000,00 dapat terealisasi Rp1.459.590.100,00 atau 98,04%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.416.385.700,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp43.204.400,00 Belanja



Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Katingan yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kasongan untuk pemberian subsidi selisih tarif dari harga yang ditetapkan oleh PDAM kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pemberian Subsidi Selisih Tarif Air Minum Kepada Masyarakat Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan yakni sebagai berikut:

Tabel 5.1.23
Belanja Subsidi
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Subsidi	1.488.700.000,00	1.459.590.100,00	98,04	1.416.385.700,00
Jumlah	1.488.700.000,00	1.459.590.100,00	98,04	1.416.385.700,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Rp64.220.930.745,87

Belanja Hibah TA 2021 merupakan Belanja Hibah yang berupa uang maupun barang Pemerintah Kabupaten Katingan kepada badan/lembaga/organisasi swasta sebagaimana Peraturan Bupati Katingan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.24
Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	480.000.000,00	474.457.500,00	98,85	0,00
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	33.471.604.215,00	30.975.526.981,40	92,54	20.510.000.000,00
Belanja Hibah Dana Bos	35.643.305.701,00	31.993.343.847,47	89,76	2.647.850.000,00
Belanja Hibah Bantuan Kepada Partai Politik	777.602.417,00	777.602.417,00	100,00	0,00
Jumlah	70.372.512.333,00	64.220.930.745,87	91,26	23.157.850.000,00

Anggaran Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp70.372.512.333,00 dapat terealisasi Rp64.220.930.745,87 atau 91,26%, dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp23.157.850.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp41.063.080.745,87 terdiri atas Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Sebesar Rp474.457.500,00 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan sebesar Rp30.975.526.981,40 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Rp20.510.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.465.526.981,40 atau sebesar 92,54%, Belanja Hibah Dana Bos dengan Anggaran 2021 sebesar Rp35.643.305.702 dengan realisasi sebesar Rp31.993.343.847,47 dengan persentase 89,76% mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp29.345.493.847,47 dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan Anggaran 2021 sebesar Rp777.602.417,00 dengan persentase 100% mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp777.602.417,00.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Rp9.030.857.525,00

Belanja Bantuan Sosial untuk periode TA 2021 sebagaimana Peraturan Bupati Katingan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan. Anggaran Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp9.590.477.693,00 dapat terealisasi



Rp9.030.857.525,00 atau 94,16%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.198.228.982,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp16.167.371.457,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.25
Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat (individu dan Keluarga)	1.035.011.153,00	475.826.385,00	45,97	1.242.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial/Kelompok Masyarakat	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	100,00	23.956.228.982,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	6.735.466.540,00	6.735.031.140,00	99,99	0,00
Jumlah	9.590.477.693,00	9.030.857.525,00	94,16	25.198.228.982,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Rp218.416.756.625,36

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja modal Pemerintah Kabupaten Katingan meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.26
Belanja Modal
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	0,00	0,00	721.300.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.025.983.978,00	42.371.889.964,60	84,70	42.605.692.336,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.534.814.424,00	59.853.368.408,95	92,75	38.763.843.708,97
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	133.509.870.923,00	115.350.629.751,81	86,40	52.673.339.171,69
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	968.503.999,00	840.868.500,00	86,82	3.544.637.621,00
Jumlah	249.289.173.324,00	218.416.756.625,36	87,62	138.308.812.837,66

Anggaran Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp249.289.173.324,00 terealisasi Rp218.416.756.625,36 atau 87,62% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp138.308.812.837,66 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp80.107.943.787,70.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Rp0,00

Anggaran belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp250.000.000.000,00 terealisasi Rp0,00 atau 0%. Mengalami Penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp721.300.000,00 .

Tabel 5.1.27
Realisasi Belanja Modal Tanah Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	721.300.000,00
2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	250.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		250.000.000.000,00	0,00	0,00	721.300.000,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp42.371.889.964,60

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 ditargetkan sebesar Rp50.025.983.978,00 terealisasi Rp42.371.889.964,60 atau 84,70%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp42.605.692.336,00 berarti mengalami penurunan sebesar Rp223.802.371,40.

Tabel 5.1.28
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per PD
Tahun Anggaran 2021



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan	3.120.103.184,00	2.906.540.700,00	93,16	5.074.168.600,00
2	Dinas Kesehatan	25.629.068.205,00	23.500.643.219,60	91,70	19.497.867.484,00
3	BLUD Mas Amsyar	820.000.000,00	493.330.265,00	60,16	809.651.862,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	4.518.081.058,00	4.492.128.675,00	99,43	9.900.000,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.225.101.843,00	1.046.108.000,00	85,39	423.632.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	66.301.395,00	64.475.500,00	97,25	29.903.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.870.831.455,00	267.095.000,00	9,30	9.000.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	139.093.206,00	138.775.227,00	99,77	2.966.100.850,00
9	Dinas Sosial	218.587.359,00	209.803.000,00	95,98	76.287.490,00
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	89.721.245,00	89.415.245,00	99,66	87.600.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	549.457.492,00	544.188.500,00	99,04	4.500.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.096.386.252,00	1.089.761.818,00	99,40	595.909.500,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.939.996,00	198.000.000,00	99,03	49.749.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	66.143.179,00	61.200.000,00	92,53	25.000.000,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	126.203.106,00	126.203.000,00	100,00	87.411.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	28.447.499,00	26.895.000,00	94,54	318.959.000,00
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	160.938.160,00	157.833.000,00	98,07	226.753.000,00
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	1.123.991.159,00	745.175.090,00	66,30	189.212.000,00
19	Sekretariat Daerah	1.803.015.788,00	1.499.156.293,00	83,15	1.086.243.000,00
20	Sekretariat DPRD	1.550.742.305,00	1.486.947.710,00	95,89	319.990.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	145.541.992,00	143.205.998,00	98,39	11.980.000,00
22	Kecamatan Katingan Kuala	81.981.816,00	72.600.000,00	88,56	168.491.000,00
23	Kecamatan Kamping	26.166.746,00	26.115.000,00	99,80	89.750.000,00
24	Kecamatan Tasik Payawan	32.544.500,00	32.544.500,00	100,00	11.000.000,00
25	Kecamatan Katingan Hilir	163.344.495,00	163.269.497,00	99,95	187.774.000,00
26	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	111.928.804,00	87.454.672,00	78,13	11.800.000,00
27	Kecamatan Pulau Malan	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
28	Kecamatan Katingan Tengah	61.454.352,00	54.600.000,00	88,85	106.000.000,00
29	Kecamatan Sanaman Mantikei	27.836.357,00	25.600.000,00	91,97	9.000.000,00
30	Kecamatan Marikit	57.755.498,00	29.500.000,00	51,08	15.000.000,00
31	Kecamatan Katingan Hulu	59.979.815,00	59.979.588,00	100,00	46.000.000,00
32	Kecamatan Mendawai	82.414.088,00	78.370.000,00	95,09	66.000.000,00
33	Kecamatan Bukit Raya	104.601.583,00	77.100.000,00	73,71	68.500.000,00
34	Kecamatan Petak Malai	148.792.740,00	148.752.000,00	99,97	0,00
35	Inspektorat Kabupaten	134.711.355,00	134.000.000,00	99,47	0,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	241.080.821,00	241.027.520,00	99,98	152.711.100,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.947.854.910,00	1.659.252.550,00	56,29	9.182.128.450,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	195.840.220,00	194.843.397,00	99,49	587.719.500,00
	Jumlah	50.025.983.978,00	42.371.889.964,60	84,70	42.605.692.336,00

Tabel 5.1.29
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Objek
Tahun Anggaran 2021



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	228.972.929,00	216.973.700,00	94,76	60.000.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.237.346.000,00	1.248.530.000,00	20,02	11.320.805.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	491.818.170,00	490.908.600,00	99,82	129.745.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	21.260.000,00	21.220.000,00	99,81	246.320.000,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tidak Bermotor	40.909.091,00	16.000.000,00	39,11	0,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	96.554.086,00	94.901.500,00	98,29	0,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	1.899.999,00	1.850.000,00	97,37	0,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	2.069.943.466,00	2.048.308.000,00	98,95	365.348.500,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	202.584.398,00	169.343.350,00	83,59	0,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.459.790.077,00	978.151.355,00	67,01	2.003.263.350,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.648.799.818,50	3.226.369.911,70	88,42	4.560.678.762,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	2.670.552.345,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	111.002.677,00	106.703.650,00	96,13	110.877.490,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	718.476.669,00	642.078.686,00	89,37	451.220.950,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	282.066.405,00	276.208.600,00	97,92	652.832.400,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	288.673.681,00	285.095.000,00	98,76	2.000.000,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	875.608.800,00	859.002.000,00	98,10	7.497.927.161,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Umum	20.668.390.688,00	19.770.260.868,60	95,65	7.227.739.778,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	129.699.999,00	129.300.000,00	99,69	0,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	486.225.000,00	437.093.114,00	89,90	4.734.916.600,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	341.449.999,00	340.700.000,00	99,78	317.467.000,00
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Komputer Unit	3.300.593.114,00	3.069.646.172,20	93,00	0,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer	5.391.552.566,50	5.029.898.582,10	93,29	0,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Eksplorasi Geofisika	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Sumur	501.288.333,00	495.940.000,00	98,93	0,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja SAR	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	58.250.000,00	53.000.000,00	90,99	0,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.351.828.012,00	2.343.406.875,00	99,64	0,00
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	253.998.000,00
	Jumlah	50.025.983.978,00	42.371.889.964,60	84,70	42.605.692.336,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**Rp59.853.368.408,95**

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp64.534.814.424,00 terealisasi Rp59.853.368.408,95 atau 92,75%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp38.763.843.708,97 mengalami kenaikan sebesar Rp21.089.524.699,98.



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.30
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan	9.947.247.300,00	9.100.745.541,85	91,49	21.216.320.390,00
2	Dinas Kesehatan	33.532.816.928,00	33.199.990.246,00	99,01	5.411.274.407,00
3	BLUD Mas Amsyar	1.068.825.000,00	399.952.000,00	37,42	479.745.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	398.000.000,00	397.100.000,00	99,77	591.600.900,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.306.941.000,00	6.265.650.000,00	85,75	2.838.654.900,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	217.750.111,97
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	74.789.000,00
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	149.999.300,00	149.800.000,00	99,87	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	799.500.000,00	798.400.000,00	99,86	1.221.601.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.347.570.100,00	2.336.700.000,00	99,54	323.425.200,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	125.000.000,00	124.610.000,00	99,69	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	174.496.000,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0,00	0,00	0,00	24.948.000,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1.942.287.088,00	800.000.000,00	41,19	1.025.550.900,00
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.647.555.000,00	3.291.775.594,10	90,25	2.793.806.500,00
17	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	599.400.000,00	596.992.079,00	0,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	1.284.960.000,00	1.052.746.248,00	81,93	199.473.000,00
18	Sekretariat DPRD	252.341.120,00	250.000.000,00	99,07	149.990.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	185.829.380,00	185.000.000,00	99,55	199.864.000,00
20	Kecamatan Katingan Kuala	0,00	0,00	0,00	123.996.000,00
21	Kecamatan Kamipang	311.000.000,00	308.000.000,00	99,04	31.389.000,00
22	Kecamatan Katingan Hilir	459.042.208,00	419.606.700,00	91,41	442.925.000,00
23	Kecamatan Tewang Sangkalang Garing	0,00	0,00	0,00	285.000.000,00
24	Kecamatan Katingan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Katingan Hulu	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
26	Kecamatan Petak Malai	90.000.000,00	89.950.000,00	99,94	233.341.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	129.900.000,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	70.000.000,00	69.850.000,00	99,79	544.003.400,00
Jumlah		64.534.814.424,00	59.853.368.408,95	92,75	38.763.843.708,97



Tabel 5.1.31
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Objek
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	57.815.953.304,00	53.548.596.869,95	92,62	38.527.863.208,97
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.809.800.000,00	3.400.550.000,00	89,26	149.990.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Rambu	0,00	0,00	0,00	78.490.500,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Rambu Lintas Udara	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.909.061.120,00	2.904.221.539,00	0,00	0,00
Jumlah		64.534.814.424,00	59.853.368.408,95	92,75	38.763.843.708,97

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**Rp115.350.629.751,81**

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp133.509.870.923,00 terealisasi Rp115.350.629.751,81 atau 86,40%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp52.673.339.171,69 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp62.677.290.580,12.

Tabel 5.1.32
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan	81.900.000,00	81.771.600,00	99,84	89.700.000,00
2	Dnas Kesehatan	779.965.000,00	49.498.009,00	6,35	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	108.137.741.226,00	91.459.273.042,81	84,58	33.359.205.550,00
4	Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	22.976.501.197,00	22.594.411.800,00	98,34	17.091.749.750,00
5	Dinas Transnaker	0,00	0,00	0,00	34.996.500,00
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	30.000.000,00	29.950.000,00	99,83	816.651.500,00
7	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	156.250.000,00	156.150.000,00	99,94	0,00
8	Kecamatan Katingan Kuala	298.217.200,00	298.217.000,00	100,00	331.400.000,00
9	Kecamatan Katingan Hilir	195.000.000,00	194.810.000,00	99,90	0,00
10	Kecamatan Tew ang Sangalang Garing	242.298.300,00	242.298.300,00	100,00	0,00
11	Kecamatan Katingan Tengah	244.868.000,00	199.900.000,00	81,64	127.694.000,00
12	Kecamatan Katingan Hulu	322.600.000,00	0,00	0,00	612.455.000,00
13	Kecamatan Petak Malai	44.530.000,00	44.350.000,00	0,00	0,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	209.486.871,69
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		133.509.870.923,00	115.350.629.751,81	86,40	52.673.339.171,69



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.33
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Objek
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi - Jalan	115.226.803.335,00	98.870.668.737,06	85,81	41.225.460.621,69
2	Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi - Jembatan	1.942.682.500,00	1.503.757.658,75	77,41	270.694.000,00
3	Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi - Bangunan Air Irigasi	7.693.698.300,00	7.269.800.347,00	94,49	5.789.952.750,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	0,00	0,00	0,00	168.400.000,00
5	Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi - Bangunan Air Bersih/Air baku	630.000.000,00	625.430.000,00	99,27	2.652.883.000,00
6	Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi - Bangunan Air Kotor	400.963.200,00	396.000.000,00	98,76	1.368.148.000,00
7	Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi - Instalasi Air Bersih Baku	44.530.000,00	44.350.000,00	99,60	0,00
8	Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi - Jaringan Air Minum	300.000.000,00	0,00	0,00	1.162.804.300,00
9	Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi - Jaringan Listrik	1.218.233.588,00	756.398.009,00	62,09	34.996.500,00
10	Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi - Jaringan Gas	6.052.960.000,00	5.884.225.000,00	97,21	0,00
Jumlah		133.509.870.923,00	115.350.629.751,81	86,40	52.673.339.171,69

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp840.868.500,00

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 target sebesar Rp968.503.999,00 terealisasi Rp840.868.500,00 atau 86,82%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.544.637.521,00 berarti mengalami penurunan sebesar Rp2.703.769.121,00.

Tabel 5.1.34
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1.294.688.436,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	89.999.999,00	89.650.000,00	99,61	2.007.467.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	24.539.185,00
5	Sekretariat Daerah	488.504.000,00	363.318.500,00	74,37	119.251.000,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	390.000.000,00	387.900.000,00	99,46	98.692.000,00
Jumlah		968.503.999,00	840.868.500,00	86,82	3.544.637.621,00



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.35
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Objek
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pengadaan Buku	463.504.000,00	338.318.500,00	72,99	1.413.939.436,00
2	Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	0,00	98.692.000,00
4	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	2.032.006.185,00
5	Pengadaan Aset Tidak Berwujud	504.999.999,00	502.550.000,00	99,51	0,00
Jumlah		968.503.999,00	840.868.500,00	86,82	3.544.637.621,00

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Rp13.499.051.785,50

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD Kabupaten Katingan TA 2021 sebesar Rp19.009.925.516,00 terealisasi sebesar Rp13.499.0451.785,50 Sebesar 71,01%.

Tabel 5.1.36
Belanja Tak Terduga
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Tak Terduga	19.009.925.516,00	13.499.051.785,50	71,01	33.044.405.240,00
Jumlah	19.009.925.516,00	13.499.051.785,50	71,01	33.044.405.240,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

Rp226.660.638.742,00

Anggaran Belanja Transfer TA 2021 sebesar Rp226.934.222.300,00 dapat terealisasi sebesar Rp226.660.638.742,00 atau 99,88% Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp227.640.189.770,57 mengalami penurunan sebesar Rp979.551.028,57.

Tabel 5.1.37
Transfer
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Transfer Bagi Hasil	2.500.000.000,00	2.474.916.442,00	99,00	2.359.731.055,57
Transfer Bantuan Keuangan	224.434.222.300,00	224.185.722.300,00	99,89	225.280.458.715,00
Jumlah	226.934.222.300,00	226.660.638.742,00	99,88	227.640.189.770,57

**5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil Rp2.474.916.442,00**

Anggaran Transfer TA 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00 terealisasi Rp2.474.916.442,00 atau 99%, dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.359.731.055,57 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp115.185.386,43.

Tabel 5.1.38
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Tahun Anggaran 2021

(dalam daerah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.500.000.000,00	1.486.571.658,00	99,10	2.011.460.183,30
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.000.000.000,00	988.344.784,00	98,83	348.270.872,27
Jumlah	2.500.000.000,00	2.474.916.442,00	99,00	2.359.731.055,57

5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan Rp224.185.722.300,00

Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 terdiri Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.39
Transfer Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	2.006.000.000,00	1.757.500.000,00	114,14	777.602.417,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	222.183.222.300,00	222.183.222.300,00	100,00	224.257.856.298,00
Jumlah	224.434.222.300,00	224.185.722.300,00	99,89	225.280.458.715,00

Anggaran Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp224.434.222.300,00 terealisasi Rp.224.185.722.300,00 atau 99,89% terdiri atas Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa merupakan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Insentif RT/RW, Honor DKA, Sekretaris Damang dan Mantir Adat, selanjutnya Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 Rp225.280.458.715,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp1.094.736.415,00.

5.1.3 Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran Rp16.480.981.960,27

Dari realisasi Pendapatan sebesar Rp1.224.871.783.845,74 dan Belanja sebesar Rp1.208.390.801.885,47 pada Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Katingan mengalami Surplus sebesar Rp16.480.981.960,27 Dibandingkan dengan Surplus tahun 2020 sebesar Rp45.075.468.805,60 mengalami penurunan Rp28.594.484.845,33.

**5.1.4 Pembiayaan****Rp167.381.102.082,84**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan ataupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi Pembiayaan (Netto) Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2021 sebesar Rp167.381.102.082,84 atau 100,00 % dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD-P TA 2021 sebesar Rp167.377.414.755,00 hal tersebut jika dibandingkan dengan pembiayaan Netto TA 2020 sebesar Rp137.180.945.949,23 mengalami kenaikan sebesar Rp30.200.156.134,61 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.1.40
Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi TA 2020
Penerimaan Pembiayaan	182.256.414.755,00	182.259.102.082,84	100,00	2.687.327,84	144.395.945.949,23
Pengeluaran Pembiayaan	14.879.000.000,00	14.878.000.000,00	99,99	(1.000.000,00)	7.215.000.000,00
Jumlah	167.377.414.755,00	167.381.102.082,84	100,00	3.687.327,84	137.180.945.949,23

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan**Rp182.259.102.082,84**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah berasal dari penggunaan SiLPA tahun lalu sebesar Rp182.259.102.082,84 dari anggaran sebesar Rp182.256.414.755,00 atau 100,00%. Dibandingkan dengan penggunaan Silpa Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp. 144.395.945,949,23 mengalami kenaikan sebesar Rp 37.863.156.133,61.

Terdapat perbedaan antara target anggaran sebesar Rp182.256.414.755,00 dengan perhitungan SiLPA tahun 2020 sebesar Rp182.256.414.754,83 atau sebesar Rp0,17 diakibatkan oleh pembulatan pada saat proses perhitungan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Tabel 5.1.41
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
Penerimaan Pembiayaan	182.256.414.755,00	182.259.102.082,84	100,00	144.395.945.949,23
Jumlah	182.256.414.755,00	182.259.102.082,84	100,00	144.395.945.949,23

Pengeluaran Pembiayaan**Rp14.878.000.000,00**

Merupakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan TA 2021 atas penyertaan modal daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.42
Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi TA 2020
Penyertaan Modal Daerah PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kasongan	14.879.000.000,00	14.878.000.000,00	99,99	(1.000.000,00)	7.215.000.000,00
Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Katingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	14.879.000.000,00	14.878.000.000,00	99,99	(1.000.000,00)	7.215.000.000,00



Realisasi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Katingan TA 2021 sebesar Rp14.878.000.000,00 atau 99,99% dari anggaran Rp14.879.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp7.215.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.663.000.000,00

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp183.862.084.043,11

SiLPA TA 2021 sebesar Rp183.862.084.043,11 mengalami kenaikan sebesar Rp1.605.669.288,28 dari SiLPA TA 2020 sebesar Rp182.256.414.754,83.

5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal Rp182.256.414.754,83

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelum dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp182.256.414.754,83

5.2.2 Penggunaan SAL Rp182.259.102.082,84

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2021 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp182.259.102.082,84

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) Rp183.862.084.043,11

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama 1 (satu) tahun periode pelaporan.

Sisa lebih/kurang tahun 2021 sebesar Rp Rp183.862.084.043,11 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp182.256.414.754,83
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar (Rp182.259.102.082,84)
- c. Selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan SAL sebesar Rp2.687.328,01 dan



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) adalah sebesar Rp183.862.084.043,11

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp2.687.328,01

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi kurang atas kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebesar Rp2.687.328,01 yaitu koreksi atas lebih saji Kas Dana BOS.

5.2.5 Lain-lain Rp0,00

Tidak terdapat koreksi lain-lain pada SAL.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp183.862.084.043,11

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 sebesar Rp183.862.084.043,11 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.2.1
Rincian Saldo Anggaran Lebih
Tahun Anggaran 2021**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik / (Turun)
1	Kas di BUD	171.480.602.731,07	172.813.740.884,88	-1.333.138.153,81
2	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	30.597,00	-30.597,00
3	Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	46.680.000,00	-46.680.000,00
4	Kas Di BLUD	9.690.018.018,34	4.836.168.077,31	4.853.849.941,03
5	Kas Di Bendahara FKTP	901.338.247,98	2.642.958.504,46	-1.741.620.256,48
6	Kasn Di Bendahara BOS	1.777.925.045,72	1.916.836.691,18	-138.911.645,46
7	Lainnya	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
Jumlah		183.862.084.043,11	182.256.414.754,83	1.605.669.288,28

5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Neraca Pemerintahan Kabupaten Katingan terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta atau Aset sebesar Rp2.896.210.736.080,58 Kewajiban sebesar Rp5.562.169.893,82 dan Ekuitas sebesar Rp2.890.648.566.186,76

5.3.1 Aset	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	2.896.210.736.080,58	3.139.298.402.168,34

Total saldo Aset Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.896.210.736.080,58 atau mengalami penurunan sebesar Rp243.087.666.087,76 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp3.139.298.402.168,34 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1
Rincian Aset
Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Naik / turun	
			%	(Rp)
Aset Lancar	220.728.811.999,16	218.177.290.383,80	1,17	2.551.521.615,36
Investasi Jangka Panjang	67.059.917.939,27	56.635.837.791,19	18,41	10.424.080.148,08
Aset Tetap	2.480.832.435.188,13	2.698.177.064.680,26	(8,06)	(217.344.629.492,13)
Dana Cadangan	-	-	0,00	0,00
Aset Lainnya	127.589.570.954,02	166.308.209.313,09	(23,28)	(38.718.638.359,07)
Jumlah	2.896.210.736.080,58	3.139.298.402.168,34	(7,74)	(243.087.666.087,76)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.3.1.1 Aset Lancar **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
220.728.811.999,16 **218.177.290.383,80**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp220.728.811.999,16 atau ada kenaikan sebesar Rp2.551.521.615,36 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp218.177.290.383,80 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2
Aset Lancar
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-21	31 Desember 2020	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
Kas di Kas Daerah	171.480.602.731,07	172.813.740.884,88	(0,77)	(1.333.138.153,81)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	46.680.000,00	(100,00)	(46.680.000,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	30.597,00	(100,00)	(30.597,00)
Kas di BLUD	9.690.018.018,34	4.836.168.077,31	100,37	4.853.849.941,03
Kas di Bendahara BOS	1.777.925.045,72	1.916.836.691,18	(7,25)	(138.911.645,46)
Kas di Bendahara FKTP	901.338.247,98	2.642.958.504,46	(65,90)	(1.741.620.256,48)
Kas Lainnya	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	6.868.340.544,00	6.286.506.333,00	9,26	581.834.211,00
Piutang Retribusi daerah	80.946.901,00	48.997.336,00	65,21	31.949.565,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang lain-lain PAD yang sah	715.598.671,58	939.419.715,00	(23,83)	(223.821.043,42)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer antar Daerah	15.536.406.135,65	14.128.261.245,30	9,97	1.408.144.890,35
Piutang Lainnya	378.119.651,00	385.119.651,00	(1,82)	(7.000.000,00)
Penyisihan Piutang	(3.601.015.630,40)	(3.095.084.006,24)	16,35	(505.931.624,16)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	16.888.331.683,22	17.227.655.354,91	(1,97)	(339.323.671,69)
Jumlah	220.728.811.999,16	218.177.290.383,80	1,17	2.551.521.615,36

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
171.480.602.731,07 **172.813.740.884,88**

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah terdiri Kas di Rekening Kas Daerah sebesar Rp171.480.602.731,07 ada penurunan sebesar Rp1.333.138.153,81 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp172.813.740.884,88.



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.5
Kas BLUD RSUD Mas Amsyar
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-21	31 Desember 2020	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
Rek. 1050102001488	9.674.159.011,34	4.827.822.884,31	100,38	4.846.336.127,03
Kas Bendahara Penerimaan	15.859.007,00	8.345.193,00	90,04	7.513.814,00
Jumlah	9.690.018.018,34	4.836.168.077,31	100,37	4.853.849.941,03

dapat dilihat pada tabel di atas terdapat peningkatan saldo Kas BLUD RSUD Mas Amsyar sebesar Rp4.853.849.941,03 jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS	1.777.925.045,72	1.916.836.691,18

Saldo akhir kas di bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.777.925.045,72 di awal tahun 2021 dilakukan terdapat koreksi Kas di Bendahara BOS dan reklasifikasi Kas di bendahara BOP PAUD ke Kas lainnya per 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.6
Koreksi dan Reklasifikasi Kas BOS
Per 1 Januari 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Kas TA. 2020	Koreksi	Reklasifikasi	Saldo Awal TA. 2021
Dana BOS Afirmasi				
- SDN	716.731.134,00	0,00	0,00	716.731.134,00
- SMPN	182.814.218,00	0,00	0,00	182.814.218,00
Dana BOS Kinerja				
- SDN	191.618.742,00	0,00	0,00	191.618.742,00
- SMPN	508.068,00	0,00	0,00	508.068,00
Dana BOS Reguler			0,00	
- SDN	458.015.824,97	8.387.259,72		466.403.084,69
- SMPN	365.959.822,01	(5.699.931,71)	0,00	360.259.890,30
BOSDA				
Bansos Pendidikan	38.882,20	0,00	0,00	38.882,20
BOP PAUD	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	0,00
Jumlah	1.916.836.691,18	2.687.328,01	(1.150.000,00)	1.918.374.019,19

Tabel 5.3.7
Kas BOS
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal Kas 2021	Pendapatan 2021	Belanja 2021	Saldo Akhir 2021	Kenaikan/Penurunan
Dana BOS Afirmasi					
- SDN	716.731.134,00	2.360.017.012,00	2.769.046.068,00	307.702.078,00	(409.029.056,00)
- SMPN	182.814.218,00	760.000.000,00	940.500.268,00	2.313.950,00	(180.500.268,00)
Dana BOS Kinerja					
- SDN	191.618.742,00	180.000.000,00	371.099.313,00	519.429,00	(191.099.313,00)
- SMPN	508.068,00	60.000.000,00	60.000.000,00	508.068,00	0,00
Dana BOS Reguler					
- SDN	466.403.084,69	18.765.679.068,00	18.360.673.651,03	871.408.501,66	405.005.416,97
- SMPN	360.259.890,30	9.727.198.794,00	9.492.024.547,44	595.434.136,86	235.174.246,56
BOSDA					
Bansos Pendidikan	38.882,20	0,00	0,00	38.882,20	0,00
BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.918.374.019,19	31.852.894.874,00	31.993.343.847,47	1.777.925.045,72	(140.448.973,47)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Saldo diatas tidak termasuk saldo per 31 Desember 2021 atas rekening-rekening yang ada di sekolah-sekolah penyelenggara kegiatan Diknas sebesar Rp1.073.256,40 karena sampai dengan tanggal pelaporan rekening tersebut belum merupakan bagian dari rekening Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Selanjutnya akan dilakukan penelaahan lebih lanjut atas rekening tersebut apakah akan ditetapkan menjadi rekening daerah atau ditutup dan saldonya disetorkan ke kas daerah.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	901.338.247,98	2.642.958.504,46

Saldo kas di bendahara FKTP yang merupakan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp901.338.247,98 mengalami penurunan sebesar Rp1.741.620.256,48 bila dibandingkan tahun sebelumnya Rp2.642.958.504,46.

5.3.1.1.7 Kas Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	12.200.000,00	0,00

Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Katingan per 1 Januari tahun 2021 Kas Saldo Awal Kas Lainnya di lakukan reklasifikasi dari Kas Dana BOS sebesar Rp1.150.000,00 yang merupakan saldo di bendahara BOP PAUD, saldo per 31 Desember 2021 di bendahara BOP PAUD sebesar Rp12.200.000,00.

5.3.1.1.8 Setara Kas	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	0,00	0,00

Saldo setara kas per 31 Desember 2021 adalah nihil, sama dengan saldo tahun sebelumnya.

5.3.1.1.9 Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	0,00	0,00

Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2021 adalah nihil, sama dengan saldo tahun sebelumnya.

5.3.1.1.10 Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	6.868.340.544,00	6.286.506.333,00

Piutang Pajak Daerah adalah tagihan pajak daerah yang menjadi hak pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.8
Piutang Pendapatan Pajak Daerah
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir
Piutang Pajak Hotel	9.085.000,00	0,00	0,00	9.085.000,00
Piutang Pajak Restoran	100.968.849,00	0,00	0,00	100.968.849,00
Piutang Pajak Hiburan	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Piutang Pajak reklame	6.809.073,00	0,00	0,00	6.809.073,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	653.439.538,00	698.620.374,00	653.439.538,00	698.620.374,00
Piutang PBB-P2	5.508.953.873,00	603.730.693,00	67.077.318,00	6.045.607.248,00
Piutang BPHTB	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
Jumlah	6.286.506.333,00	1.302.351.067,00	720.516.856,00	6.868.340.544,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.3.1.1.11	Piutang Retribusi	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Daerah	80.946.901,00	48.997.336,00

Piutang Retribusi Daerah adalah tagihan retribusi daerah yang menjadi hak pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.9
Piutang Pendapatan Retribusi Daerah
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir
Piutang Retribusi Parkir	11.117.000,00	-	11.117.000,00	-
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir	31.732.000,00	7.625.000,00	7.900.000,00	31.457.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.148.336,00	44.049.900,00	708.335,00	49.489.901,00
Jumlah	48.997.336,00	51.674.900,00	19.725.335,00	80.946.901,00

5.3.1.1.12	Piutang Hasil	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 adalah nihil, sama dengan saldo tahun sebelumnya.

5.3.1.1.13	Piutang Lain-Lain	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	PAD yang Sah	715.598.671,58	939.419.715,00

Selanjutnya Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri atas pengakuan piutang bunga atas penempatan deposito tahun 2021 di BRI, pengakuan piutang pada RSUD Mas Amsyar kepada pihak lain di luar pemerintah daerah dan sudah terverifikasi nilainya, serta Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya berupa pencatatan piutang kepada PT. AVIASTAR sejak tahun 2014 (berdasarkan surat Dirut AVIASTAR No. 102REV/ASM/DZ/III/2014) yang masih belum dapat terkonfirmasi karena saat ini PT. AVIASTAR sudah tidak beroperasi lagi.

Tabel 5.3.10
Koreksi Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah
1 Januari 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Akhir
Piutang BLUD	881.769.003,00	9.145.346.700,00	10.027.115.703,00
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	53.150.712,00	0,00	53.150.712,00
Jumlah	934.919.715,00	9.145.346.700,00	10.080.266.415,00

Tabel 5.3.11
Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir
Piutang Bunga Deposito	-	81.224.925,58	-	81.224.925,58
Piutang BLUD	10.027.115.703,00	581.223.034,00	10.027.115.703,00	581.223.034,00
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	53.150.712,00	-	0,00	53.150.712,00
Jumlah	10.080.266.415,00	662.447.959,58	10.027.115.703,00	715.598.671,58



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.3.1.1.14	Piutang Transfer	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Pemerintah Pusat	0,00	0,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 adalah nihil, sama dengan saldo tahun sebelumnya.

5.3.1.1.15	Piutang Transfer	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Antar Daerah	15.536.406.135,65	14.128.261.245,30

Piutang Transfer Antar Daerah mencatat pengakuan Piutang dari Kurang Salur Bagi Hasil Dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/75/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten Kota Se-Kalimantan Tengah Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/115/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Yang Akan Disalurkan Pada Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.12
Piutang Transfer Antar Daerah
(Bagi Hasil Pajak Provinsi)
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Pengurangan Piutang	Penambahan Piutang	Saldo Akhir
Pajak Rokok	1.474.610.469,00	1.474.610.469,00	1.423.143.330,00	1.423.143.330,00
Pajak Kendaraan Bermotor	2.983.137.299,08	2.983.137.299,08	2.463.684.367,61	2.463.684.367,61
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.656.561.883,44	2.656.561.883,44	3.043.372.941,08	3.043.372.941,08
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.006.896.158,78	7.006.896.158,78	8.592.901.920,36	8.592.901.920,36
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	7.005.435,00	7.005.435,00	13.303.576,60	13.303.576,60
Jumlah	14.128.211.245,30	14.128.211.245,30	15.536.406.135,65	15.536.406.135,65

5.3.1.1.16	Piutang Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		378.119.651,00	385.119.651,00

Piutang lainnya merupakan bagian lancar dari piutang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara dan Non Bendahara yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021, yang diharapkan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran (tahun anggaran berikutnya) dan telah ditetapkan SKTJM. Rincian Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.13
Piutang Lainnya
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Piutang 2021	Saldo Piutang 2020	Naik/(Turun)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap bendahara	129.118.851,00	129.118.851,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Non bendahara	249.000.800,00	256.000.800,00	(7.000.000,00)
Jumlah	378.119.651,00	385.119.651,00	(7.000.000,00)



Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
Bagian Lancar TGR terhadap Bendahara
Per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Pengurangan Piutang	Penambahan Piutang	Saldo Akhir
SY	129.118.851,00	0,00	0,00	129.118.851,00
RU	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	129.118.851,00	0,00	0,00	129.118.851,00

Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Non Bendahara mengalami penurunan sebesar Rp7.000.000,00 jika dibandingkan dengan saldo Piutang atas Tuntutan Ganti Rugi terhadap Non Bendahara tahun sebelumnya, akibat adanya pengurangan piutang melalui angsuran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.15
Bagian Lancar TGR terhadap Non Bendahara
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Pengurangan Piutang	Penambahan Piutang	Saldo Akhir
IKL-M3	237.000.000,00	0,00	0,00	237.000.000,00
KG	800,00	0,00	0,00	800,00
DD	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
JL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	256.000.800,00	7.000.000,00	0,00	249.000.800,00

5.3.1.1.17 Penyisihan Piutang **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
(3.601.015.630,40) **(3.095.084.006,24)**

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor 08 tentang piutang, penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain, adapun penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.16
Penyisihan Piutang
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	(Naik)/Turun
Penyisihan Piutang Pajak	(3.534.246.104,00)	(3.087.750.969,56)	(446.495.134,44)
Penyisihan Piutang Retribusi	(10.306.574,60)	(6.425.536,68)	(3.881.037,92)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(56.462.951,80)	(907.500,00)	(55.555.451,80)
Jumlah	(3.601.015.630,40)	(3.095.084.006,24)	(505.931.624,16)



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.17
Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualifikasi
31 Desember 2021

dalam Rupiah

Uraian	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Total
Penyisihan Piutang Pajak	6.490.686,20	138.260.435,80	798.103.965,00	2.591.391.017,00	3.534.246.104,00
Penyisihan Piutang Reribusi	258.374,60	1.583.200,00	4.975.000,00	3.490.000,00	10.306.574,60
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD	-	-	-	56.462.951,80	56.462.951,80
Jumlah	6.749.060,80	139.843.635,80	803.078.965,00	2.651.343.968,80	3.601.015.630,40

5.3.1.1.18	Beban Di Bayar Di Muka	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		0,00	0,00

Beban Dibayar Dimuka merupakan beban yang belum menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan tapi telah dibayar oleh pemerintah daerah terlebih dahulu, sehingga jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban pemerintah daerah untuk periode yang bersangkutan dan kategorikan masuk kedalam pos Aset Lancar. Beban Dibayar Dimuka yang disajikan dalam laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2021 adalah sebesar Nihil.

5.3.1.1.19	Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		16.888.331.683,22	17.227.655.354,91

Saldo persediaan sebesar Rp 13.777.067.394,66 merupakan saldo persediaan 31 Desember 2021 berdasarkan hasil stok opname atau hasil inventarisasi fisik dengan menggunakan nilai perolehan terakhir.

Persediaan per 31 Desember 2021 pada masing-masing PD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3.18
Persediaan
Per 31 Desember 2021

Keterangan	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020	Naik / (Turun)
Dinas Kesehatan	9.361.038.863,71	10.145.043.296,14	(1.434.281.220,99)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	49.872.900,00	30.160.820,00	19.834.080,00
Obat-obatan	9.311.165.963,71	10.086.330.076,14	(1.425.562.900,99)
Bahan Makanan Pokok	0,00	26.052.400,00	(26.052.400,00)
Bahan Bakar Minyak	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
BLUD RSUD Mas Amsyar	2.789.371.517,81	4.252.376.768,77	(1.463.005.250,96)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.845.000,00		
Obat-obatan	2.787.526.517,81	4.252.376.768,77	(1.464.850.250,96)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	0,00	103.900.000,00	(103.900.000,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Keterangan	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020	Naik / (Turun)
Bahan Bakar Minyak	0,00	103.900.000,00	(103.900.000,00)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.478.457.500,00	17.470.000,00	2.460.987.500,00
Persediaan Untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat	2.478.457.500,00	0,00	2.478.457.500,00
Bahan Bakar Minyak	0,00	17.470.000,00	(17.470.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	95.000,00	(95.000,00)
Bahan Bakar Minyak	0,00	95.000,00	(95.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	10.350.000,00	(10.350.000,00)
Bahan Bakar Minyak		10.350.000,00	(10.350.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	841.542.250,00	1.515.236.390,00	(673.694.140,00)
Persediaan Untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat	841.542.250,00	1.505.876.390,00	(664.334.140,00)
Bahan Bakar Minyak	0,00	9.360.000,00	(9.360.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	195.637.500,00	196.257.500,00	(620.000,00)
Persediaan Untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat	195.637.500,00	195.637.500,00	0,00
Bahan Bakar Minyak	0,00	620.000,00	(620.000,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
Bahan Bakar Minyak	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	184.398.200,00	0,00	184.398.200,00
Persediaan Untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat	184.398.200,00	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	6.651.000,00	(6.651.000,00)
Bahan Bakar Minyak	0,00	6.651.000,00	(6.651.000,00)
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	728.604.653,00	606.614.370,00	121.990.283,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	64.898.363,00	70.510.970,00	(5.612.607,00)
Persediaan Untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat	551.324.800,00	529.903.400,00	21.421.400,00
Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga- jaga	112.381.490,00	5.000.000,00	107.381.490,00
Bahan Bakar Minyak	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)
Sekretariat Daerah	237.313.198,70	273.299.826,00	(35.986.627,30)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	237.313.198,70	245.636.202,00	(8.323.003,30)



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Keterangan	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020	Naik / (Turun)
Persediaan Untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat	0,00	27.663.624,00	(27.663.624,00)
Sekretariat DPRD	0,00	3.330.000,00	(3.330.000,00)
Bahan Bakar Minyak	0,00	3.330.000,00	(3.330.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.764.000,00	16.382.204,00	(11.618.204,00)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	4.764.000,00	16.382.204,00	(11.618.204,00)
Kecamatan Katingan Hilir	0,00	430.000,00	(430.000,00)
Bahan Bakar Minyak	0,00	430.000,00	(430.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	4.260.000,00	(4.260.000,00)
Bahan Bakar Minyak	0,00	4.260.000,00	(4.260.000,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	67.204.000,00	68.964.000,00	(1.760.000,00)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	67.204.000,00	68.964.000,00	(1.760.000,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	4.995.000,00	(4.995.000,00)
Bahan Bakar Minyak	0,00	4.995.000,00	(4.995.000,00)
Jumlah	16.888.331.683,22	17.227.655.354,91	(339.323.671,69)

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	67.059.917.939,27	56.635.837.791,19

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp67.059.917.939,27 terdiri dari investasi non permanen sebesar Rp402.109.620,00 dan investasi permanen sebesar Rp66.657.808.319,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.19
Investasi Jangka Panjang
31 Desember 2021

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
Investasi Non Permanen	402.109.620,00	402.109.620,00	-	0,00
Investasi Permanen	66.657.808.319,27	56.233.728.171,19	18,54	10.424.080.148,08
Jumlah	67.059.917.939,27	56.635.837.791,19	18,41	10.424.080.148,08

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	402.109.620,00	402.109.620,00

Saldo Investasi Non Permanen sebesar Rp402.109.620,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut :



Tabel 5.3.20
Investasi Non Permanen
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyer-taan Modal Tahun 2019	Hasil Penyer-taan Modal (Inves-tasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7
1	2006	KSU LEPP-M3, Kelompok Nelayan & Pembudidayaan Ikan	M o U	-	402.109.620,00	0,00	0,00	402.109.620,00
J U M L A H					402.109.620,00	0,00	0,00	402.109.620,00

Pada laporan keuangan tahun 2020 pada Catatan atas Laporan Keuangan telah di jelaskan bahwa potensi tidak tertagih atas penyertaan modal kelompok pembudidaya ikan dan nelayan adalah sangat tinggi sehingga dipertimbangkan untuk dilakukan lelang jaminan atas sebuah bidang tanah (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dengan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 593.1/031/BAPT-KPHu-I/PEM, dan melalui Surat Tugas Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan pada Tahun 2018 telah dilakukan survey terhadap bidang tanah yang menjadi jaminan tersebut dan atas hasil survey tersebut diperoleh informasi bahwa jaminan berupa bidang tanah tersebut siap untuk diproses lelang. Saat ini masih dikonsultasikan kepada KPKNL terkait proses lelang yang akan dilakukan.

5.3.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		66.657.818.319,27	56.233.728.171,19

Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Katingan berupa penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018 Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 44, penyertaan modal pada PT. Katingan Mandiri Persada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada Tahun 2014-2018 Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 18 dan penyertaan modal pada PT. Jaminan Kredit Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 45.

Memperhatikan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2020 dan PT. KMP Tahun 2020, dilakukan koreksi atas saldo penyertaan modal pemerintah daerah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.21
Koreksi Saldo Awal Penyertaan Modal Pemda

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 2020	Koreksi	Saldo Awal 2021
PDAM	3.525.797.589,00	(3.207.681.010,00)	318.116.579,00
PT. KMP	4.804.567.865,00	(1.726.661.324,16)	3.077.906.540,84

Memperhatikan Laporan Keuangan PT. Katingan Mandiri Persada (PT. KMP) tahun 2021 (audited) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tahun 2021 (unaudited) maka komposisi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.22
Investasi Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)
31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Nama Badan Usaha	Dasar Hukum Penyertaan	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penambahan Penyertaan Modal Tahun Berjalan	Akumulasi Kerugian s/d Tahun Lalu	Laba/Rugi Tahun berjalan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8
PT. Bank Pembangunan Kalteng	Perda No. 13 Tahun 2006, Perda No. 7 Tahun 2011 & Perda No. 6 Tahun 2014	46.215.000.000,00	14.878.000.000,00	0,00	0,00	0,00	61.093.000.000,00
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Katingan	Perda No. 17 Tahun 2004 & Perda No. 10 Tahun 2008	14.061.448.703,74	0,00	(13.733.332.125,00)	883.096.246,00	(10.000.000,00)	1.201.212.824,74
PD. Katingan Jaya Mandiri	Perda No. 23 Tahun 2004 & Perda No. 9 Tahun 2008	11.950.000.000,00	0,00	(11.261.637.282,81)	0,00	0,00	688.362.717,19
PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)	Perda No. 7 Tahun 2014	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
PT. Katingan Mandiri Persada (PT. KMP)	Perda No. 8 Tahun 2014	7.000.000.000,00	0,00	(3.922.093.459,16)	(402.673.763,50)	0,00	2.675.232.777,34
		80.226.448.703,74	14.878.000.000,00	(28.917.062.866,97)	480.422.482,50	(10.000.000,00)	66.657.808.319,27



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Pada tahun 2021 dilakukan tambahan penyeteroran modal kepada PT Bank pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp14.878.000.000,00.

5.3.1.3 Aset Tetap	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	2.480.832.435.188,13	2.698.177.064.680,92

Saldo Aset Tetap pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.480.832.435.188,13 mengalami penurunan sebesar Rp217.344.629.492,13 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.23
Aset Tetap
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	NAIK/ (TURUN)
1	TANAH	665.453.853.839,50	653.448.682.311,50	12.005.171.528,00
2	PERALATAN DAN MESIN	467.873.890.034,84	421.585.927.851,12	46.287.962.183,72
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	962.943.261.132,59	898.486.567.040,45	64.456.694.092,14
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.510.420.187.268,74	2.408.266.685.613,04	102.153.501.655,70
5	ASET TETAP LAINNYA	192.670.648.089,15	190.825.463.634,15	1.845.184.455,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	20.768.301.593,21	17.231.064.304,11	3.537.237.289,10
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	4.820.130.141.958,03	4.589.844.390.754,37	230.285.751.203,66
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(2.339.297.706.769,90)	(1.891.667.326.074,11)	(447.630.380.695,79)
	JUMLAH ASET TETAP	2.480.832.435.188,13	2.698.177.064.680,26	(217.344.629.492,13)

Aset Tetap dalam nilai perolehan sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp4.820.130.141.958,03 dibandingkan Aset Tetap sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp4.589.844.390.754,37 mengalami kenaikan sebesar Rp230.285.751.203,66, jika kenaikan tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal TA 2021 sebesar Rp218.416.756.625,36 terdapat perbedaan nilai (Rp11.868.994.578,30) yang dipengaruhi oleh:

1)	BELANJA MODAL TA 2021	218.416.756.625,36
	<u>PENAMBAHAN ASET TETAP TA.2021</u>	<u>230.285.751.203,66</u>
	Perbedaan Belanja Modal dan Penambahan Aset Tetap	(11.868.994.578,30)
2)	Penambahan Koreksi Aset Tetap	178.426.800,00
	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	4.687.303.563,58
	Belanja BOS SMP dan SD	7.740.114.266,00
	Belanja Tak Terduga Covid-19	786.000.000,00
	Penambahan Hibah	24.911.597.482,00
	Barang Persediaan Yang Menjadi Aset tetap	52.064.320,00
	Jumlah Penambahan	38.355.506.431,58
3)	Pengurangan Penghapusan Aset Tetap	524.350.000,00
	Barang Extracomtable Atas Belanja Modal TA.2020	840.702.948,00
	Aset Tetap Reklas ke Aset Lain-lain	3.916.965.695,28
	Belanja Modal yang Menjadi Aset Tak Berwujud	741.776.600,00
	Belanja Modal Yang menjadi Beban Barang	113.608.785,00
	Aset Tetap Yang di Hibahkan	20.349.107.825,00
	Jumlah Pengurangan	26.486.511.853,28
	Jumlah (1+2-3)	(0,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2021 **31 Desember 2020**

665.453.853.839,50 **653.448.682.311,50**

Saldo Aset Tetap Tanah pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp665.453.853.839,50 mengalami kenaikan sebesar Rp12.005.171.528,00 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.24
Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI PERUBAHAN SELAMA TAHUN 2020		SALDO PER 31 DESEMBER 2021	NAIK/ (TURUN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	TANAH	653.448.682.311,50	21.303.330.585,00	9.298.159.057,00	665.453.853.839,50	12.005.171.528,00
JUMLAH NILAI PEROLEHAN		653.448.682.311,50	21.303.330.585,00	9.298.159.057,00	665.453.853.839,50	12.005.171.528,00

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah dijelaskan sebagai berikut:

Tanah

Saldo Awal	653.448.682.311,50
Koreksi Saldo Awal	178.426.800,00
Saldo Awal setelah koreksi	653.627.109.111,50
Penambahan - Aset Hibah	11.875.244.728,00
- Mutasi Masuk Antar SOPD	9.249.659.057,00
Jumlah Penambahan	21.124.903.785,00
Pengurangan - Aset Tetap Yang di Hibahkan	48.500.000,00
Jumlah Pengur Mutasi Keluar Antar SOPD	9.249.659.057,00
Saldo Akhir	665.453.853.839,50



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.25
Aset Tetap Tanah berdasarkan PD
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	2021	2020	naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	27.972.708.169,00	27.732.708.169,00	240.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	3.678.620.213,00	3.643.620.213,00	35.000.000,00
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	10.161.511.000,00	9.551.256.000,00	610.255.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	159.479.993.030,50	147.644.869.302,50	11.835.123.728,00
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan	4.490.096.970,00	3.439.686.900,00	1.050.410.070,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	898.386.000,00	898.386.000,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	129.564.000,00	129.564.000,00	0,00
9	Dinas Sosial	3.545.000.000,00	3.545.000.000,00	0,00
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	5.276.681.075,00	430.000.000,00	4.846.681.075,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	344.300.000,00	344.300.000,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2.864.428.310,00	2.864.428.310,00	0,00
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	866.068.500,00	593.568.000,00	272.500.500,00
17	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	3.655.322.160,00	3.647.685.360,00	7.636.800,00
18	Sekretariat Daerah	432.091.158.600,00	441.191.466.657,00	(9.100.308.057,00)
19	Sekretariat DPRD	83.160.000,00	83.160.000,00	0,00
20	Kecamatan Katingan Kuala	784.110.400,00	784.110.400,00	0,00
21	Kecamatan Kampang	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00
22	Kecamatan Tasik Payaw an	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00
23	Kecamatan Katingan Hilir	421.288.000,00	421.288.000,00	0,00
24	Kecamatan Tew ang Sangalang Garing	1.210.874.000,00	1.210.874.000,00	0,00
25	Kecamatan Pulau Malan	303.720.000,00	303.720.000,00	0,00
26	Kecamatan Katingan Tengah	135.814.000,00	135.814.000,00	0,00
27	Kecamatan Sanaman Mantikei	329.299.000,00	329.299.000,00	0,00
28	Kecamatan Marikit	148.996.000,00	148.996.000,00	0,00
29	katingan hulu	119.146.000,00	119.146.000,00	0,00
30	Kecamatan Mendaw ai	510.975.000,00	510.975.000,00	0,00
31	Kecamatan Bukit Raya	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
32	Kecamatan Petak Malai	24.613.000,00	24.613.000,00	0,00
33	Inspektorat Daerah	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	510.048.000,00	510.048.000,00	0,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.460.000.000,00	340.000.000,00	1.120.000.000,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	0,00	48.500.000,00	(48.500.000,00)
37	Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	1.136.372.412,00	0,00	1.136.372.412,00
	Jumlah	665.453.853.839,50	653.448.682.311,50	12.005.171.528,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
467.873.890.034,84 **421.585.927.851,12**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp467.873.890.034,84 mengalami peningkatan sebesar Rp46.287.962.183,72 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.26
Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI PERUBAHAN TAHUN 2020		SALDO PER 31 DESEMBER 2021	NAIK/ (TURUN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	PERALATAN DAN MESIN	421.585.927.851,12	66.692.886.200,00	20.404.924.016,28	467.873.890.034,84	46.287.962.183,72
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	421.585.927.851,12	66.692.886.200,00	20.404.924.016,28	467.873.890.034,84	46.287.962.183,72

Adapun ringkasan mutasi aset tetap peralatan dan mesin dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin

Saldo Awal		421.585.927.851,12
Koreksi Saldo Awal		-
Saldo Awal setelah koreksi		421.585.927.851,12
Penambahan		
	Belanja Modal	42.371.889.964,60
	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Menjadi Aset Peralatan dan Mesin	330.848.800,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Menjadi Aset Peralatan dan Mesin	129.745.000,00
	Reklasifikasi Belanja Aset Tetap Lainnya Menjadi Aset Peralatan dan Mesin	19.525.000,00
	Reklas Antar KIB	1.712.137.500,00
	Belanja Barang dan Jasa	131.759.246,40
	Belanja Barang Jasa BOS	5.811.621.081,00
	Belanja Tak Terduga Satgas Covid-19	786.000.000,00
	Hibah	3.665.905.300,00
	Mutasi Masuk Antar SKPD	12.436.081.588,00
	Barang Persediaan yang menjadi Aset Tetap	52.064.320,00
Jumlah Penambahan		67.447.577.800,00
Pengurangan		
	Penghapusan Aset Tetap	524.350.000,00
	Hibah	2.573.215.000,00
	Barang Extracomtable Atas Belanja Modal TA.2021	840.702.948,00
	Mutasi Keluar Antar SOPD	12.436.081.588,00
	Reklas Ke Aset Lain-lain	3.916.965.695,28
	Belanja Modal Yang menjadi Beban Barang	113.608.785,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan Mesin Menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	495.940.000,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan Mesin Menjadi Aset Tak Berwujud	258.751.600,00
Jumlah Pengurangan		21.159.615.616,28
Saldo Akhir		467.873.890.034,84



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.27
Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	2021	2020	naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	67.791.124.559,05	55.642.943.078,05	12.148.181.481,00
2	Dinas Kesehatan	71.453.641.164,07	57.911.258.496,87	13.542.382.667,20
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	64.400.688.166,22	54756050357	9.644.637.809,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	32.912.355.161,00	27.569.586.986,00	5.342.768.175,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.334.792.755,57	6.679.834.755,57	654.958.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.683.966.211,92	2.969.888.549,59	(285.922.337,67)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	13.619.057.965,15	12.474.012.965,15	1.145.045.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.499.818.863,00	16.218.803.636,00	281.015.227,00
9	Dinas Sosial	2.007.540.504,38	1.747.552.504,38	259.988.000,00
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.300.555.170,02	4.217.936.424,02	82.618.746,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.545.511.946,00	5.906.119.046,00	639.392.900,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	23.930.084.973,12	22.972.773.155,12	957.311.818,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.938.282.016,15	4.744.927.016,15	193.355.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.325.950.016,68	3.264.750.016,68	61.200.000,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	6.348.027.845,00	6.221.824.845,00	126.203.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	6.007.896.753,44	5.739.801.753,44	268.095.000,00
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.180.394.259,30	5.029.036.259,30	151.358.000,00
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	16.731.231.115,64	16.077.900.225,64	653.330.890,00
19	Sekretariat Daerah	41.359.258.073,68	40.462.964.441,68	896.293.632,00
20	Sekretariat DPRD	11.468.182.809,77	10.651.172.537,58	817.010.272,19
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.240.383.458,12	2.050.760.160,12	189.623.298,00
22	Kecamatan Katingan Kuala	1.293.566.000,01	984.446.000,01	309.120.000,00
23	Kecamatan Kampang	1.722.345.900,00	1.428.719.000,00	293.626.900,00
24	Kecamatan Tasik Payawan	813.173.400,00	723.947.000,00	89.226.400,00
25	Kecamatan Katingan Hilir	1.873.847.432,00	1.556.845.775,00	317.001.657,00
26	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	946.033.732,00	988.796.900,00	(42.763.168,00)
27	Kecamatan Pulau Malan	873.774.066,66	710.799.066,66	162.975.000,00
28	Kecamatan Katingan Tengah	1.421.739.400,00	1.338.339.400,00	83.400.000,00
29	Kecamatan Sanaman Mantikei	852.389.150,00	773.093.250,00	79.295.900,00
30	Kecamatan Marikit	914.634.502,94	860.682.602,94	53.951.900,00
31	Kecamatan Katingan Hulu	1.196.719.900,00	1.113.995.000,00	82.724.900,00
32	Kecamatan Mendawai	893.750.900,00	762.059.350,00	131.691.550,00
33	Kecamatan Bukit Raya	1.119.871.900,00	641.010.000,00	478.861.900,00
34	Kecamatan Petak Malai	1.148.833.250,00	983.757.000,00	165.076.250,00
35	Inspektorat Daerah	3.053.124.703,44	2.925.031.703,44	128.093.000,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	11.585.205.068,30	11.327.026.048,30	258.179.020,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.207.118.561,79	23.949.037.561,79	(4.741.919.000,00)
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	1.117.440.299,98	1.135.420.299,98	(17.980.000,00)
39	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.761.578.080,44	6.073.024.683,44	688.553.397,00
	Jumlah	467.873.890.034,84	421.585.927.851,12	46.287.962.183,72



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
962.943.261.132,59 **898.486.567.040,45**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp962.943.261.132,59 mengalami peningkatan sebesar Rp64.456.694.092,14 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.28
Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI PERUBAHAN TAHUN 2021		SALDO PER 31 DESEMBER 2021	NAIK/ (TURUN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	GEDUNG DAN BANGUNAN	898.486.567.040,45	69.937.629.792,14	5.480.935.700,00	962.943.261.132,59	64.456.694.092,14
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	898.486.567.040,45	69.937.629.792,14	5.480.935.700,00	962.943.261.132,59	64.456.694.092,14

Adapun ringkasan mutasi aset tetap gedung dan bangunan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan

Saldo Awal		898.486.567.040,45
Koreksi Saldo Awal		-
Saldo Awal setelah koreksi		898.486.567.040,45
Penambahan		
	Belanja Modal	59.853.368.408,95
	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	2.615.041.199,29
	Belanja Barang Jasa BOS	299.124.330,00
	Mutasi Masuk Antar SKPD	1.119.460.000,00
	Hibah	9.075.879.948,00
	Rekalas Antar KIB	34.730.300,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	560.350.000,00
Jumlah Penambahan		73.557.954.186,24
Pengurangan		
	Mutasi Keluar Antar SOPD	1.119.460.000,00
	Hibah	2.746.542.600,00
	Rekalas Antar KIB	1.614.933.100,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Menjadi Aset Peralatan dan Mesin	330.848.800,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Menjadi Kontruksi Dalam Pengerjaan	3.289.475.594,10
Jumlah Pengurangan		9.101.260.094,10
Saldo Akhir		962.943.261.132,59



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.29
Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	2021	2020	naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	294.884.226.981,20	285.524.462.109,35	9.359.764.871,85
2	Dinas Kesehatan	110.922.363.278,78	76.831.401.432,78	34.090.961.846,00
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	17.709.493.050,00	16.593.967.050,00	1.115.526.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	43.784.270.660,00	35.782.060.160,00	8.002.210.500,00
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan	75.795.483.004,29	69.119.172.100,00	6.676.310.904,29
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.534.481.312,05	2.534.481.312,05	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	5.336.072.861,97	5.336.072.861,97	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	810.107.500,00	810.107.500,00	0,00
9	Dinas Sosial	7.457.394.094,00	7.457.394.094,00	0,00
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9.166.785.200,00	9.016.985.200,00	149.800.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.994.270.200,00	7.121.000.200,00	873.270.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	19.188.127.400,81	16.824.036.100,81	2.364.091.300,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.429.419.630,00	2.304.809.630,00	124.610.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.862.765.000,00	5.460.052.600,00	(2.597.287.600,00)
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	6.762.385.620,00	6.762.385.620,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	48.024.037.890,42	46.884.937.890,42	1.139.100.000,00
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	47.552.154.219,18	46.578.294.219,18	973.860.000,00
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	47.577.310.635,18	46.420.239.213,18	1.157.071.422,00
19	Sekretariat Daerah	101.126.084.736,90	101.148.303.088,90	(22.218.352,00)
20	Sekretariat DPRD	25.781.627.461,00	25.500.292.961,00	281.334.500,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.448.337.338,60	3.249.244.338,60	199.093.000,00
22	Kecamatan Katingan Kuala	4.513.503.950,00	4.513.503.950,00	0,00
23	Kecamatan Kamipang	2.764.849.900,00	2.435.960.900,00	328.889.000,00
24	Kecamatan Tasik Payaw an	1.054.825.000,00	1.054.825.000,00	0,00
25	Kecamatan Katingan Hilir	4.347.026.650,00	3.927.419.950,00	419.606.700,00
26	Kecamatan Tew ang Sangalang Garing	1.646.725.000,00	1.646.725.000,00	0,00
27	Kecamatan Pulau Malan	855.760.979,00	855.760.979,00	0,00
28	Kecamatan Katingan Tengah	1.251.395.500,00	1.251.395.500,00	0,00
29	Kecamatan Sanaman Mantikei	986.690.900,00	986.690.900,00	0,00
30	Kecamatan Marikit	722.098.200,00	722.098.200,00	0,00
31	Kecamatan Katingan Hulu	875.110.400,00	875.110.400,00	0,00
32	Kecamatan Mendaw ai	1.200.200.000,00	1.200.200.000,00	0,00
33	Kecamatan Bukit Raya	922.676.200,00	922.676.200,00	0,00
34	Kecamatan Petak Malai	3.526.250.011,00	3.436.300.011,00	89.950.000,00
35	Inspektorat Daerah	6.649.443.400,00	6.649.443.400,00	0,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	13.485.226.690,00	13.485.226.690,00	0,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.093.684.532,21	30.362.934.532,21	(269.250.000,00)
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	244.548.305,00	244.548.305,00	0,00
39	Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	6.656.047.441,00	6.656.047.441,00	0,00
	Jumlah	962.943.261.132,59	898.486.567.040,45	64.456.694.092,14



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
2.510.420.187.268,74 **2.408.266.685.613,04**

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.510.420.187.268,74 mengalami peningkatan sebesar Rp102.153.501.655,70 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.30
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI PERUBAHAN TAHUN 2021		SALDO PER 31 DESEMBER 2021	NAIK/ (TURUN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2.408.266.685.613,04	123.413.631.060,70	21.260.129.405,00	2.510.420.187.268,74	102.153.501.655,70
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	2.408.266.685.613,04	123.413.631.060,70	21.260.129.405,00	2.510.420.187.268,74	102.153.501.655,70

Adapun ringkasan mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat disajikan dalam tabel berikut:

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Awal		2.408.266.685.613,04
Koreksi Saldo Awal		-
Saldo Awal setelah koreksi		2.408.266.685.613,04
Penambahan		
Belanja Modal	115.350.629.751,81	
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	1.658.011.122,89	
Belanja Barang Jasa BOS	25.298.500,00	
Hibah	294.567.506,00	
Mutasi Antar SKPD	6.279.279.180,00	
Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menjadi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	495.940.000,00	
Jumlah Penambahan		124.103.726.060,70
Pengurangan		
Hibah	14.980.850.225,00	
Mutasi Antar SKPD	6.279.279.180,00	
Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menjadi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.745.000,00	
Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	560.350.000,00	
Jumlah Pengurangan		21.950.224.405,00
Saldo Akhir		2.510.420.187.268,74



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.31
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	2021	2020	naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	2.035.168.070,00	1.748.097.970,00	287.070.100,00
2	Dinas Kesehatan	2.683.731.846,00	2.634.233.837,00	49.498.009,00
3	BLUD Mas Amsyar	423.950.900,00	423.950.900,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	2.263.799.230.177,56	2.165.367.705.698,75	98.431.524.478,81
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan	141.592.675.069,46	122.478.350.596,57	19.114.324.472,89
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	449.003.750,00	449.003.750,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	836.207.500,00	836.207.500,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.050.000,00	6.287.329.180,00	(6.279.279.180,00)
9	Dinas Sosial	1.099.325.000,00	1.099.325.000,00	0,00
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.833.391.140,00	1.833.391.140,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	545.650.000,00	545.650.000,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.224.461.175,00	6.224.461.175,00	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	939.171.588,00	939.171.588,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	332.345.415,25	332.345.415,25	0,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	775.341.700,00	775.341.700,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1.320.034.767,00	1.320.034.767,00	0,00
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.238.588.250,00	2.208.638.250,00	29.950.000,00
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	15.495.281.262,00	15.295.771.262,00	199.510.000,00
19	Sekretariat Daerah	9.457.985.654,00	9.457.985.654,00	0,00
20	Sekretariat DPRD	2.758.958.815,00	2.758.958.815,00	0,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.411.150.939,00	1.411.150.939,00	0,00
22	Kecamatan Katingan Kuala	1.037.702.000,00	739.485.000,00	298.217.000,00
23	Kecamatan Kamipang	32.458.700,00	32.458.700,00	0,00
24	Kecamatan Katingan Hilir	200.310.000,00	5.500.000,00	194.810.000,00
25	Kecamatan Tew ang Sangalang Garing	487.298.300,00	245.000.000,00	242.298.300,00
26	Kecamatan Katingan Tengah	1.133.174.625,00	905.450.125,00	227.724.500,00
27	Kecamatan Marikit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
28	Kecamatan Katingan Hulu	966.455.000,00	966.455.000,00	0,00
29	Kecamatan Mendaw ai	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
30	Kecamatan Petak Malai	68.264.000,00	23.914.000,00	44.350.000,00
31	Inspektorat Daerah	403.070.441,28	403.070.441,28	0,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.986.703.725,00	1.986.703.725,00	0,00
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.987.497.940,19	3.987.497.940,19	0,00
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	42.355.935.527,00	53.042.431.552,00	(10.686.496.025,00)
35	Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	1.470.613.992,00	1.470.613.992,00	0,00
	Jumlah	2.510.420.187.268,74	2.408.266.685.613,04	102.153.501.655,70



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.3.1.3.5 Aset tetap Lainnya **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
192.670.648.089,15 **190.825.463.634,15**

Saldo Aset Tetap Lainnya pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp192.670.648.089,15 mengalami peningkatan sebesar Rp1.845.184.455,00 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.32
Aset Tetap Lainnya
Per 31 desember 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI PERUBAHAN TAHUN 2021		SALDO PER 31 DESEMBER 2021	NAIK/ (TURUN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	ASET TETAP LAINNYA	190.825.463.634,15	1.942.388.855,00	97.204.400,00	192.670.648.089,15	1.845.184.455,00
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	190.825.463.634,15	1.942.388.855,00	97.204.400,00	192.670.648.089,15	1.845.184.455,00

Adapun ringkasan mutasi aset tetap Lainnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

ASET TETAP LAINNYA

Saldo Awal		190.825.463.634,15
Koreksi Saldo Awal		-
Saldo Awal setelah koreksi		190.825.463.634,15
Penambahan	Belanja Modal	840.868.500,00
	Belanja Barang Jasa BOS	1.604.070.355,00
Jumlah Penambahan		2.444.938.855,00
Pengurangan	Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Menjadi Aset Peralaan dan Mesin	19.525.000,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Menjadi Aset Tak Berwujud	483.025.000,00
	Reklas Antar KIB	97.204.400,00
Jumlah Pengurangan		599.754.400,00
Saldo Akhir		192.670.648.089,15



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.33
Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	2021	2020	naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	28.764.224.245,15	27.183.658.290,15	1.580.565.955,00
2	Dinas Kesehatan	306.750.000,00	306.750.000,00	0,00
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	34.965.000,00	34.965.000,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	155.681.922.800,00	155.681.922.800,00	0,00
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan	694.709.400,00	694.709.400,00	0,00
6	Dinas Sosial	5.232.000,00	5.232.000,00	0,00
7	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	137.893.844,00	137.893.844,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	101.225.900,00	101.225.900,00	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.393.700,00	25.393.700,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	140.338.030,00	140.338.030,00	0,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	29.999.400,00	29.999.400,00	0,00
13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.993.014.500,00	1.993.014.500,00	0,00
14	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	1.321.791.500,00	1.321.791.500,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	2.847.289.220,00	2.582.670.720,00	264.618.500,00
16	Sekretariat DPRD	334.831.250,00	334.831.250,00	0,00
17	Inspektorat Daerah	22.966.000,00	22.966.000,00	0,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	44.530.000,00	44.530.000,00	0,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	103.142.000,00	103.142.000,00	0,00
20	Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	40.429.300,00	40.429.300,00	0,00
Jumlah		192.670.648.089,15	190.825.463.634,15	1.845.184.455,00

5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		20.768.301.593,21	17.231.064.304,11

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.768.301.593,21 mengalami peningkatan sebesar Rp3.537.237.289,10 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.34
Kontruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI PERUBAHAN TAHUN 2021		SALDO PER 31 DESEMBER 2021	NAIK/ (TURUN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	17.231.064.304,11	3.571.967.589,10	34.730.300,00	20.768.301.593,21	3.537.237.289,10
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	17.231.064.304,11	3.571.967.589,10	34.730.300,00	20.768.301.593,21	3.537.237.289,10



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Adapun ringkasan mutasi Kontruksi Dalam Pekerjaan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Saldo Awal		17.231.064.304,11
Koreksi Saldo Awal		-
Saldo Awal setelah koreksi		17.231.064.304,11
Penambahan	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	282.491.995,00
	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Yang Menjadi Kontruksi Dalam Pengerjaan	3.289.475.594,10
Jumlah Penambahan		3.571.967.589,10
Pengurangan	Reklas Barang Antar KIB	34.730.300,00
Jumlah Pengurangan		34.730.300,00
Saldo Akhir		20.768.301.593,21

Tabel 5.3.35
Kontruksi Dalam Pengerjaan
Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	2021	2020	naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	798.236.813,20	714.344.818,20	83.891.995,00
2	Dinas Kesehatan	708.583.100,00	708.583.100,00	0,00
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	508.574.160,00	508.574.160,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	10.153.531.975,91	10.153.531.975,91	0,00
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan	1.973.300.250,00	1.973.300.250,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	750.211.000,00	750.211.000,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	524.649.000,00	148.690.300,00	375.958.700,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	24.948.000,00	24.948.000,00	0,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1.115.382.700,00	1.115.382.700,00	0,00
10	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.098.275.594,10	371.501.000,00	2.726.774.594,10
11	Sekretariat Daerah	371.501.000,00	0,00	371.501.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	717.370.000,00	717.370.000,00	0,00
13	Kecamatan Kamipang		20.889.000,00	(20.889.000,00)
14	Kecamatan Petak Malai	13.838.000,00	13.838.000,00	0,00
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
	Jumlah	20.768.301.593,21	17.231.064.304,11	3.537.237.289,10

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
(2.339.297.706.769,90) **(1.891.667.326.074,11)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.339.297.706.769,90 mengalami penurunan sebesar Rp447.630.380.695,79 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.36
Akumulasi Penyusutan
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI PERUBAHAN TAHUN 2021		SALDO PER 31 DESEMBER 2021	NAIK/ (TURUN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.891.667.326.074,11)	15.433.829.483,85	463.064.210.179,64	(2.339.297.706.769,90)	(447.630.380.695,79)
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	(1.891.667.326.074,11)	15.433.829.483,85	463.064.210.179,64	(2.339.297.706.769,90)	(447.630.380.695,79)

Adapun ringkasan mutasi Akumulasi Penyusutan dapat disajikan dalam tabel berikut:

AKUMULASI PENYUSUTAN

Saldo Awal		(1.891.667.326.074,11)
Koreksi Saldo Awal		(226.374.528.287,59)
Saldo Awal setelah koreksi		(2.118.041.854.361,70)
Penambahan		
	Penghapusan Aset Tetap	524.350.000,00
	Hibah Keluar	3.904.353.976,12
	Mutasi Keluar Antar SOPD	7.288.396.300,25
	Reklas Ke Aset Lain-lain	3.716.729.207,48
Jumlah Penambahan		15.433.829.483,85
Pengurangan		
	Mutasi Masuk Antar SOPD	7.288.396.300,25
	Beban Penyusutan Tahun Berjalan	229.401.285.591,80
Jumlah Pengurangan		236.689.681.892,05
Saldo Akhir		(2.339.297.706.769,90)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.37
Akumulasi Penyusutan
Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	2021	2020	naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	(99.993.375.531,43)	(72.059.579.625,62)	(27.933.795.905,81)
2	Dinas Kesehatan	(63.673.214.036,77)	(48.262.771.498,13)	(15.410.442.538,64)
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	(51.817.838.097,02)	(41.020.899.139,93)	(10.796.938.957,09)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	(1.755.988.021.092,92)	(1.418.323.783.752,42)	(337.664.237.340,50)
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan	(57.240.614.588,44)	(40.921.142.865,88)	(16.319.471.722,56)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.256.130.511,27)	(3.240.449.947,14)	(15.680.564,13)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	(13.770.290.405,89)	(12.603.964.264,12)	(1.166.326.141,77)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(9.037.267.020,75)	(5.341.006.781,18)	(3.696.260.239,57)
9	Dinas Sosial	(3.486.920.263,99)	(2.957.121.364,11)	(529.798.899,88)
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(7.837.894.895,40)	(7.089.996.156,11)	(747.898.739,29)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(6.779.681.986,62)	(5.723.065.466,31)	(1.056.616.520,31)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(27.721.531.665,09)	(24.768.160.820,24)	(2.953.370.844,85)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.519.284.650,44)	(4.777.583.867,04)	(741.700.783,40)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(4.003.752.198,56)	(3.909.499.866,27)	(94.252.332,29)
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	(7.039.398.719,46)	(5.653.119.491,03)	(1.386.279.228,43)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	(13.784.369.247,78)	(11.220.187.412,13)	(2.564.181.835,65)
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	(14.248.362.248,03)	(12.717.124.606,03)	(1.531.237.642,00)
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	(34.212.156.816,27)	(30.782.256.036,72)	(3.429.900.779,55)
19	Sekretariat Daerah	(60.440.760.091,53)	(54.847.482.188,07)	(5.593.277.903,46)
20	Sekretariat DPRD	(16.621.832.757,25)	(16.168.182.166,05)	(453.650.591,20)
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(3.429.265.535,16)	(2.828.273.101,93)	(600.992.433,23)
22	Kecamatan Katingan Kuala	(1.843.531.083,65)	(1.215.531.100,93)	(627.999.982,72)
23	Kecamatan Kamipang	(1.927.455.363,06)	(1.195.797.414,42)	(731.657.948,64)
24	Kecamatan Tasik Payaw an	(961.192.347,14)	(795.254.884,29)	(165.937.462,85)
25	Kecamatan Katingan Hilir	(1.987.823.452,49)	(1.448.679.654,92)	(539.143.797,57)
26	Kecamatan Tew ang Sangalang Garing	(1.271.999.058,00)	(1.185.251.118,20)	(86.747.939,80)
27	Kecamatan Pulau Malan	(1.036.960.019,34)	(764.787.851,73)	(272.172.167,61)
28	Kecamatan Katingan Tengah	(2.139.272.668,22)	(1.663.453.291,05)	(475.819.377,17)
29	Kecamatan Sanaman Mantikei	(1.058.822.256,00)	(878.476.256,93)	(180.345.999,07)
30	Kecamatan Marikit	(998.150.483,51)	(837.901.466,56)	(160.249.016,95)
31	Kecamatan Katingan Hulu	(1.250.771.726,58)	(824.776.068,60)	(425.995.657,98)
32	Kecamatan Mendaw ai	(1.036.731.471,43)	(851.370.687,58)	(185.360.783,85)
33	Kecamatan Bukit Raya	(1.046.873.085,21)	(502.353.185,30)	(544.519.899,91)
34	Kecamatan Petak Malai	(1.446.890.999,01)	(1.095.618.618,52)	(351.272.380,49)
35	Inspektorat Daerah	(4.248.819.364,88)	(3.605.622.656,35)	(643.196.708,53)
36	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(14.115.057.923,15)	(12.511.244.425,89)	(1.603.813.497,26)
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(23.852.443.104,53)	(20.070.102.770,38)	(3.782.340.334,15)
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	(11.084.548.883,57)	(9.932.641.112,61)	(1.151.907.770,96)
39	Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	(8.088.401.120,06)	(7.072.813.093,39)	(1.015.588.026,67)
	Jumlah	(2.339.297.706.769,90)	(1.891.667.326.074,11)	(447.630.380.695,79)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.3.1.4 Dana Cadangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	0,00	0,00

Saldo dana cadangan per 31 Desember 2020 sebesar Nihil sama dengan saldo di tahun sebelumnya.

5.3.1.5 Aset Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	127.589.570.954,02	166.308.209.313,09

Nilai Saldo Aset Lainnya Rp127.589.570.954,02 terdiri atas akumulasi saldo Tagihan Jangka Panjang, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-Lain. Dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya tahun sebelumnya sebesar Rp166.308.209.313,09 terdapat penurunan sebesar Rp38.718.638.359,07 yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.3.38
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020	Naik/(turun)
Tagihan Jangka Panjang	707.380.077,00	707.380.077,00	0,00
Kemitraan Pihak Ketiga	0	0	0,00
Aset Tak Berwujud	3.550.413.250,99	3.651.645.447,86	(101.232.196,87)
Aset Lain-Lain	123.331.777.626,03	161.949.183.788,23	(38.617.406.162,20)
Jumlah	127.589.570.954,02	166.308.209.313,09	(38.718.638.359,07)

Berdasarkan tabel di atas terdapat penurunan nilai aset lainnya, antara lain dikarenakan oleh penambahan Aset Tak Berwujud dan penurunan Aset Lain-Lain daerah pada TA 2021.

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	707.380.077,00	707.380.077,00

Tagihan jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp707.380.077,00 terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Tabel 5.3.39
Tagihan Jangka Panjang
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	580.127.577,00	0,00	0,00	580.127.577,00
Tagihan Penjualan Angsuran	127.252.500,00	0,00	0,00	127.252.500,00
Jumlah	707.380.077,00	0,00	0,00	707.380.077,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan bagian tidak lancar dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berupa tagihan dan tagihan kelebihan pembayaran gaji atas pensiunan pegawai sebesar Rp580.127.577,00.

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp127.252.500,00 yang jumlahnya sama dengan saldo tahun sebelumnya, merupakan saldo tagihan atas Penjualan Angsuran berupa Kredit Ternak (Sapi) dan Kredit Kendaraan (Traktor) yang tidak ada diperoleh angsuran pembayarannya selama tahun 2021.

5.3.1.5.2 Aset Tak Berwujud	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	10.200.910.500,00	9.459.133.900,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.200.910.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp741.776.600 dari saldo tahun sebelumnya. Penambahan nilai aset tak berwujud merupakan hasil pengadaan Tahun 2021.



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.40
Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Mutasi Perubahan Tahun 2021		Saldo Per 31 Desember 2021
		Penambahan	Pengurangan	
Aset Tak Berwujud	9.459.133.900,00	741.776.600,00	-	10.200.910.500,00

Tabel 5.3.41
Aset Tidak Berwujud
Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	2021	2020	naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	817.841.300,00	817.841.300,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	74.635.000,00	74.635.000,00	0,00
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	1.554.050.000,00	1.554.050.000,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	749.342.000,00	659.692.000,00	89.650.000,00
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan	2.482.874.500,00	2.437.974.500,00	44.900.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64.388.000,00	64.388.000,00	0,00
7	Dinas Sosial	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	37.570.000,00	37.570.000,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	248.851.600,00	35.000.000,00	213.851.600,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	186.920.000,00	186.920.000,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94.455.000,00	94.455.000,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	107.675.000,00	107.675.000,00	0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	31.093.500,00	31.093.500,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	434.301.000,00	409.301.000,00	25.000.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	370.470.000,00	370.470.000,00	0,00
17	Kecamatan Katingan Kuala	19.580.000,00	19.580.000,00	0,00
18	Inspektorat Daerah	229.040.000,00	229.040.000,00	0,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	393.047.500,00	393.047.500,00	0,00
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.852.095.000,00	1.483.720.000,00	368.375.000,00
21	Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	382.681.100,00	382.681.100,00	0,00
	Jumlah	10.200.910.500,00	9.459.133.900,00	741.776.600,00

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain

31 Desember 2021	31 Desember 2020
123.331.777.626,03	161.949.183.788,23

Akun ini berisi hasil reklasifikasi barang-barang yang sebelumnya masuk kedalam kelompok aset tetap akibat hasil pendataan dan penilaian kembali yang dilakukan pada periode sebelumnya harus dikeluarkan karena berbagai alasan, seperti kondisi barang rusak berat, barang tidak diketemukan, atau barang tersebut tidak cocok diklasifikasikan sebagai aset tetap. Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp123.331.777.626,03 mengalami penurunan sebesar Rp38.617.406.162,20 dari saldo tahun sebelumnya.



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.42
Aset Lain lain
Per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Mutasi Perubahan Tahun 2021		Saldo Per 31 Desember 2021
		Penambahan	Pengurangan	
Nilai Perolehan Aset lain-lain	168.406.914.063,74	3.916.965.695,28	38.817.642.650,00	133.506.237.109,02
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(6.457.730.275,51)		3.716.729.207,48	(10.174.459.482,99)
Nilai Buku	161.949.183.788,23	3.916.965.695,28	42.534.371.857,48	123.331.777.626,03

Penambahan Nilai Perolehan sebesar Rp3.916.965.695,28 disebabkan oleh adanya reklas Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain dan pengurangan sebesar Rp38.817.642.650,00 terdiri dari penghapusan sebesar Rp8.817.642.650,00 dan koreksi pencatatan bandara Tumbang Samba sebesar Rp30.000.000.000,00. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp3.716.729.207,48 disebabkan oleh adanya reklas Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain.

5.3.1.5.4	Akumulasi Amortisasi	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Aset Tak Berwujud	(6.650.497.249,01)	(5.807.488.452,14)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar (Rp6.650.497.249,01) mengalami penurunan sebesar Rp843.008.797 dari saldo tahun sebelumnya, yang merupakan beban amortisasi aset tak berwujud tahun 2021.

Tabel 5.3.43
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Mutasi Perubahan Tahun 2021		Saldo Per 31 Desember 2021
		Penambahan	Pengurangan	
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.807.488.452,14)	-	843.008.796,87	(6.650.497.249,01)



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.44
Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	2021	2020	naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	(519.330.541,39)	(475.719.654,92)	(43.610.886,47)
2	Dinas Kesehatan	(27.584.810,76)	(20.127.440,11)	(7.457.370,65)
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	(869.512.927,94)	(755.701.471,60)	(113.811.456,34)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	(617.606.624,84)	(599.356.487,93)	(18.250.136,91)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(1.236.882.006,82)	(772.496.256,31)	(464.385.750,51)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(39.446.998,36)	(36.458.335,98)	(2.988.662,38)
7	Dinas Sosial	(35.000.000,00)	(35.000.000,00)	0,00
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(16.882.519,17)	(13.327.467,14)	(3.555.052,03)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(40.181.678,14)	(35.000.000,00)	(5.181.678,14)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(85.256.469,93)	(69.569.363,45)	(15.687.106,48)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(64.909.813,05)	(58.969.195,74)	(5.940.617,31)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(35.000.000,00)	(35.000.000,00)	0,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	(102.534.854,04)	(101.695.543,88)	(839.310,16)
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	(19.176.922,65)	(16.969.387,06)	(2.207.535,59)
15	Sekretariat Daerah	(374.716.216,62)	(360.188.489,39)	(14.527.727,23)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(370.364.555,11)	(358.024.490,10)	(12.340.065,01)
17	Kecamatan Katingan Kuala	(7.946.987,49)	(5.990.595,48)	(1.956.392,01)
18	Inspektorat Daerah	(228.907.186,86)	(228.907.186,86)	0,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(392.926.032,85)	(392.926.032,85)	0,00
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(1.210.165.140,32)	(1.090.517.809,72)	(119.647.330,60)
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(356.164.962,67)	(345.543.243,62)	(10.621.719,05)
Jumlah		(6.650.497.249,01)	(5.807.488.452,14)	(843.008.796,87)

5.3.2 Kewajiban **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
5.562.169.893,82 **9.313.680.571,42**

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.562.169.893,82 mengalami pengurangan sebesar Rp3.751.510.677,60 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.45
Kewajiban
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Jenis kewajiban	Saldo per 31 Desember 2021	Saldo per 31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Kewajiban jangka pendek	5.562.169.893,82	9.313.680.571,42	(3.751.510.677,60)
Kewajiban jangka panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.562.169.893,82	9.313.680.571,42	(3.751.510.677,60)

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
5.562.169.893,82 **9.313.680.571,42**

Saldo kewajiban jangka pendek yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.562.169.893,82 mengalami penurunan sebesar Rp3.751.510.677,60 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.46
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Jenis kewajiban /Utang Jangka Pendek	Saldo per 31 Desember 2021	Saldo per 31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
Pendapatan diterima dimuka	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Utang beban	5.560.169.893,82	9.313.680.571,42	(3.753.510.677,60)
Utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.562.169.893,82	9.313.680.571,42	(3.751.510.677,60)

5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		0,00	0,00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

5.3.2.1.2	Utang Bunga	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		0,00	0,00

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

5.3.2.1.3	Utang Pinjam Jangka Pendek	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		0,00	0,00

Saldo Utang Pinjam Jangka Pendek per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

5.3.2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		0,00	0,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

5.3.2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		2.000.000,00	0,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 adalah Rp2.000.000,00 mengalami kenaikan dibandingkan saldo tahun sebelumnya, yang merupakan pembayaran atas biaya sewa toko sampai dengan Tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

5.3.2.1.6	Utang Belanja	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		5.560.169.893,82	9.313.680.571,42

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 adalah Rp5.560.169.893,82 atau berkurang Rp3.753.510.677,60 dari saldo tahun sebelumnya yang disajikan dalam akun Utang Beban.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.47
Utang Belanja
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	1.772.003.235,34	4.939.316.495,15	(1.772.003.235,34)	4.939.316.495,15
Utang Belanja Barang Jasa	7.535.217.719,08	614.393.781,67	(7.535.217.719,08)	614.393.781,67
Utang Belanja Bagi Hasil	6.459.617,00	0,00	0,00	6.459.617,00
JUMLAH	9.313.680.571,42	5.553.710.276,82	(9.307.220.954,42)	5.560.169.893,82

Utang Beban Pegawai sebesar Rp4.939.316.495,15 merupakan pengakuan saldo Utang Pegawai BLUD, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Saldo Awal	Rp1.772.003.235,34
- Koreksi Saldo Awal BLUD	Rp0,00
- Penambahan	
• Pengakuan utang Pegawai BLUD	Rp4.939.316.495,15
- Pengurangan	
• Pengakuan Pembayaran hutang Pegawai BLUD	(Rp1.772.003.235,34)
	Rp4.939.316.495,15

Utang belanja barang jasa sebesar Rp7.535.217.719,08 merupakan pengakuan saldo Utang Barang dan Jasa BLUD dan Pengakuan Utang atas Jampersal, Utang Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19, dan utang atas Hak Jasa Puskesmas atas realisasi pendapatan retribusi Kesehatan Tahun Anggaran 2020, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Saldo Awal	Rp7.535.217.719,08
- Koreksi Saldo Awal BLUD	Rp 0,00
- Penambahan	
• Pengakuan Utang Barang dan Jasa BLUD	Rp614.393.781,67
- Pengurangan	
• Pembayaran Utang Barang dan Jasa BLUD	Rp(1.007.706.967,08)
• Pembayaran Utang Insentif Nakes Covid 19 Dinkes	Rp(5.356.233.953,00)
• Pembayaran Utang Jasa Puskesmas	Rp (586.345.560,00)
• Pembayaran Utang Jampersal – Dinkes	Rp (584.931.239,00)
Saldo Akhir	Rp614.393.781,67

Utang belanja bagi hasil merupakan pengakuan atas Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun sebelumnya yang sampai laporan selesai dibuat belum terkonfirmasi pembayarannya.

5.3.2.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		0,00	0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00

5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

5.3.2.2.1	Utang Dalam Negeri	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		0,00	0,00



Saldo Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

5.3.2.2.2	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LBK)	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		0,00	0,00

Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LBK) per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

5.3.2.2.3	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		0,00	0,00

Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

5.3.2.2.4	Utang Kepada Masyarakat	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		0,00	0,00

Saldo Utang Kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

5.3.3	Ekuitas	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		2.890.648.566.186,76	3.129.984.721.596,92

Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.890.648.566.186,76 mengalami penurunan sebesar Rp239.336.155.410,16 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya Rp3.129.984.721.596,92

5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional digunakan dalam mengevaluasi pendapatan – LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut :

1. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan – LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; pendapatan -LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan; beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyajian Laporan Operasional tahun 2021 mengalami perubahan format dengan laporan tahun sebelumnya akibat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

**5.4.1 Pendapatan – LO****Rp1.245.633.1.052,67**

Menurut kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor 15 tentang Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA, Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan dalam pengakuannya Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), atau pada saat pendapatan dapat direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan – LO Kabupaten Katingan adalah pendapatan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.245.633.171.052,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1
Pendapatan – LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Asli Daerah – LO	59.115.135.906,50	59.125.136.530,23	(10.000.623,73)
Pendapatan Transfer – LO	1.124.564.981.234,17	1.052.775.989.126,26	71.788.992.107,91
Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	61.953.053.912,00	52.485.922.441,00	9.467.131.471,00
Jumlah	1.245.633.171.052,67	1.164.387.048.097,49	81.246.122.955,18

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO**Rp59.115.135.906,50**

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Katingan adalah Pendapatan Operasional untuk Periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp59.115.135.906,50. Adapun komponen dari penyusun Pendapatan Asli Daerah yang tersaji dalam Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.2
Pendapatan Asli Daerah – LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Pajak Daerah - LO	15.335.872.311,80	17.281.656.234,00	(1.945.783.922,20)
Retribusi daerah - LO	3.250.240.800,00	4.395.404.425,00	(1.145.163.625,00)
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO	10.751.089.417,00	7.982.714.342,00	2.768.375.075,00
Lain- Lain Pendapatan Daerah yang sah - LO	29.777.933.377,70	29.465.361.529,23	312.571.848,47
Jumlah	59.115.135.906,50	59.125.136.530,23	(10.000.623,73)

**5.4.1.1.1 Pajak Daerah – LO****Rp15.335.872.311,80**

Pendapatan Pajak Daerah - LO merupakan pengakuan pendapatan dari pajak daerah dalam periode TA 2021. Adapun Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.3
Pendapatan Pajak Daerah – LO Per PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Sekretariat Daerah	2.335.800.370,00	2.026.241.230,00	309.559.140,00
BPKAD	13.000.071.941,80	15.255.415.004,00	(2.255.343.062,20)
Jumlah	15.335.872.311,80	17.281.656.234,00	(1.945.783.922,20)

Tabel 5.4.4
Pendapatan Pajak Daerah – LO Per Objek
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Pajak Hotel - LO	64.760.000,00	71.692.805,00	(6.932.805,00)
Pajak restoran- LO	2.419.570.418,80	2.157.349.960,00	262.220.458,80
Pajak Hiburan - LO	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame - LO	225.107.960,00	128.216.690,00	96.891.270,00
Pajak penerangan Jalan - LO	8.037.901.397,00	7.803.068.372,00	234.833.025,00
Pajak Air Tanah - LO	1.568.721,00	13.585.689,00	(12.016.968,00)
Pajak Sarang Burung Walet - LO	432.070.700,00	333.624.550,00	98.446.150,00
Pajak mineral bukan logam dan batuan - LO	2.309.864.677,00	1.956.036.816,00	353.827.861,00
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan - LO	1.265.387.577,00	1.255.202.737,00	10.184.840,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB)- LO	579.640.861,00	3.562.878.615,00	(2.983.237.754,00)
Jumlah	15.335.872.311,80	17.281.656.234,00	(1.945.783.922,20)

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah – LO**Rp3.250.240.800,00**

Pendapatan Retribusi Daerah - LO merupakan pengakuan pendapatan dari retribusi daerah dalam periode Tahun Anggaran 2021. Adapun Pendapatan Restribusi Daerah - LO dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.4.5
Pendapatan Retribusi Daerah – LO Per PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan	15.400.000,00	3.559.000,00	11.841.000,00
Dinas Kesehatan	817.812.500,00	1.626.316.800,00	(808.504.300,00)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	542.533.000,00	232.223.000,00	310.310.000,00
Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	331.662.000,00	1.067.432.100,00	(735.770.100,00)
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	600.000,00	37.317.600,00	(36.717.600,00)
Dinas Lingkungan Hidup	355.395.900,00	227.378.500,00	128.017.400,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	476.459.900,00	451.360.000,00	25.099.900,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	65.853.500,00	44.880.000,00	20.973.500,00
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	133.560.000,00	109.500.000,00	24.060.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	264.500.000,00	282.000.000,00	(17.500.000,00)
Kecamatan Katingan Kuala	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
Kecamatan Kamipang	6.225.200,00	3.450.000,00	2.775.200,00
Kecamatan Tasik Payaw an	5.150.000,00	3.900.000,00	1.250.000,00
Kecamatan Katingan Hilir	5.500.000,00	4.300.000,00	1.200.000,00
Kecamatan Tew ang Sangalang Garing	5.265.000,00	3.150.000,00	2.115.000,00
Kecamatan Pulau Malan	5.050.000,00	3.001.000,00	2.049.000,00
Kecamatan Katingan Tengah	17.080.000,00	3.250.000,00	13.830.000,00
Kecamatan Sanaman Mantihei	5.690.000,00	5.700.000,00	(10.000,00)
Kecamatan Marikit	5.203.600,00	4.114.000,00	1.089.600,00
Kecamatan Katingan Hulu	5.000.000,00	3.014.000,00	1.986.000,00
Kecamatan Mendaw ai	5.860.000,00	5.160.000,00	700.000,00
Kecamatan Bukit Raya	5.350.000,00	4.000.000,00	1.350.000,00
Kecamatan Petak Malai	5.021.600,00	4.031.500,00	990.100,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	29.200.000,00	18.200.000,00	11.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	127.118.600,00	239.916.925,00	(112.798.325,00)
Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	6.200.000,00	5.250.000,00	950.000,00
Sekretariat DPRD	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Dinas Sosial	600.000,00	0,00	600.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	600.000,00	0,00	600.000,00
Jumlah	3.250.240.800,00	4.395.404.425,00	(1.145.163.625,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.4.6
Pendapatan Retribusi Daerah – LO Per Objek
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Perangkat Daerah	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	805.365.500,00	1.626.316.800,00	(820.951.300,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	104.520.400,00	104.303.500,00	216.900,00
Retribusi Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum - LO	30.200.000,00	29.917.000,00	283.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	31.093.500,00	70.500.000,00	(39.406.500,00)
Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang - LO	50.060.000,00	48.220.000,00	1.840.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	976.913.400,00	369.175.425,00	607.737.975,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	375.755.000,00	398.824.000,00	(23.069.000,00)
Retribusi tempat khusus parkir	5.658.500,00	3.658.000,00	2.000.500,00
Retribusi pelayanan kepelabuhan - LO	85.562.000,00	10.950.000,00	74.612.000,00
Retribusi tempat rekreasi dan olahraga- LO	53.940.000,00	31.588.000,00	22.352.000,00
Retribusi penjualan produksi usaha daerah - LO	135.610.500,00	123.846.000,00	11.764.500,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	331.062.000,00	1.067.432.100,00	(736.370.100,00)
Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol - LO	264.500.000,00	282.000.000,00	(17.500.000,00)
Restribusi Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	0,00	37.317.600,00	(37.317.600,00)
	0,00		
Retribusi sewa alat berat - LO	0,00	191.356.000,00	(191.356.000,00)
Jumlah	3.250.240.800,00	4.395.404.425,00	(1.145.163.625,00)

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Rp10.751.089.417,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO merupakan pengakuan pendapatan dari penyertaan modal/investasi daerah dalam periode TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Kalteng	9.850.815.979,00	7.982.714.342,00	1.868.101.637,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA	17.177.192,00	0,00	17.177.192,00
Bagian laba Atas Penyertaan Modal Pada PDAM	883.096.246,00	0,00	883.096.246,00
Jumlah	10.751.089.417,00	7.982.714.342,00	2.768.375.075,00

**5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah – LO****Rp29.777.933.377,70**

Lain-Lain PAD Yang Sah - LO merupakan pengakuan pendapatan dari Lain-Lain PAD Yang Sah dalam periode Tahun Anggaran 2021. Lain-Lain PAD Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.8
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	69.300.000,00	0,00	69.300.000,00
Penerimaan Jasa Giro - LO	908.729.453,00	2.290.383.053,00	(1.381.653.600,00)
Pendapatan Bunga - LO	5.534.773.181,36	4.704.269.732,60	830.503.448,76
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	7.419.516,00	19.000.000,00	(11.580.484,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	900.000,00	0,00	900.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	208.384.830,68	130.539.284,11	77.845.546,57
Pendapatan Denda Pajak - LO	27.877.326,00	46.248.217,00	(18.370.891,00)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian -LO	7.829.554.431,66	2.346.035.142,52	5.483.519.289,14
Pendapatan BLUD - LO	10.786.817.139,00	12.506.282.557,00	(1.719.465.418,00)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	22.879.618,00	(22.879.618,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	4.393.177.500,00	7.399.723.925,00	(3.006.546.425,00)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Tidak Terdapat Dalam Ayat-Ayat/Pbs Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Jumlah	29.777.933.377,70	29.465.361.529,23	312.571.848,47

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO**Rp1.124.564.981.234,17**

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor 17 tentang Transfer, pendapatan transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, realisasi pendapatan transfer pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp71.788.992.107,91 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.052.775.989.126,26 yang didalamnya termasuk saldo Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – Pendapatan Lainnya Dana Desa sebesar Rp147.441.003.000,00 pada penyajian laporan tahun sebelumnya. Pendapatan transfer dalam laporan operasional terdiri atas:

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO**Rp1.086.745.605.001,00**

Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dan Dana Desa, pada TA 2021 pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar Rp66.214.234.103,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.020.531.370.898,00

Tabel 5.4.9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana Perimbangan	936.104.779.001,00	873.090.367.898,00	63.014.411.103,00
Dana Desa-LO	150.640.826.000,00	147.441.003.000,00	3.199.823.000,00
JUMLAH	1.086.745.605.001,00	1.020.531.370.898,00	66.214.234.103,00

**5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan****Rp936.104.779.001,00**

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik terealisasi sebesar Rp936.104.779.001,00 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp63.014.411.103,00.

Tabel 5.4.10
Dana Perimbangan – LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana Bagi Hasil (DBH)	114.929.030.607,00	88.784.395.773,00	26.144.634.834,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	625.956.787.000,00	634.091.753.000,00	(8.134.966.000,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	104.062.115.932,00	48.977.786.316,00	55.084.329.616,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO	91.156.845.462,00	91.157.189.809,00	(344.347,00)
Dana Insentif daerah (DID)	0,00	10.079.243.000,00	(10.079.243.000,00)
JUMLAH	936.104.779.001,00	873.090.367.898,00	63.014.411.103,00

Dana Bagi Hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – Sumber Daya Alam (SDA) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.10
Dana Bagi Hasil – LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	28.097.473.226,00	35.238.265.997,00	(7.140.792.771,00)
DBH Pajak Penghasilan	4.673.824.200,00	5.552.794.928,00	(878.970.728,00)
DBH Cukai Hasil Tembakau	200,00	1.447.357,00	(1.447.157,00)
DBH SDA Minyak Bumi	113.037.009,00	15.852.850,00	97.184.159,00
DBH SDA Landrent	47.161.342.409,00	1.338.844.150,00	45.822.498.259,00
DBH SDA Kehutanan	22.974.235.879,00	9.423.172.100,00	13.551.063.779,00
DBH SDA Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IUPH)	10.551.498.534,00	0,00	10.551.498.534,00
DBH-SDA Perikanan	1.357.619.150,00	788.276.289,00	569.342.861,00
DBH SDA - Royalti	0,00	36.417.709.952,00	(36.417.709.952,00)
DBH SDA Gas Bumi	0,00	8.032.150,00	(8.032.150,00)
JUMLAH	114.929.030.607,00	88.784.395.773,00	26.144.634.834,00

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi DAU Tahun 2021 sebesar Rp625.956.787.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.134.966.000,00 dari realisasi tahun sebelumnya.

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu, pada tahun 2021 Kabupaten Katingan tidak memperoleh alokasi DID.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

dikategorikan ke dalam Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang realisasinya pada tahun 2021 sebesar Rp195.218.961.394,00 mengalami kenaikan sebesar Rp55.083.985.269,00 dari realisasi tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
Dana Alokasi Khusus – LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler	9.331.725.927,00	15.842.328.236,00	(6.510.602.309,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB	52.824.451.805,00	22.177.990.380,00	30.646.461.425,00
DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	912.770.200,00	905.024.200,00	7.746.000,00
DAK Fisik Bidang Jalan	32.629.115.000,00	0,00	32.629.115.000,00
DAK Fisik Bidang Air Minum	4.970.588.000,00	2.357.435.500,00	2.613.152.500,00
DAK Fisik Bidang Sanitasi	2.105.965.000,00	490.000.000,00	1.615.965.000,00
DAK Fisik Bidang Irigasi	1.287.500.000,00	2.416.700.000,00	(1.129.200.000,00)
DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	2.410.973.000,00	(2.410.973.000,00)
DAK Fisik Bidang Pariwisata	0,00	2.377.335.000,00	(2.377.335.000,00)
DAK Non Fisik-TPG PNSD	53.631.031.000,00	47.112.519.000,00	6.518.512.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.005.000.000,00	1.991.000.000,00	(986.000.000,00)
DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.346.566.000,00	0,00	10.346.566.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.885.450.000,00	2.743.200.000,00	142.250.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.100.700.000,00	1.085.350.000,00	15.350.000,00
DAK Non Fisik-BOK	17.807.744.562,00	33.843.426.371,00	(16.035.681.809,00)
DAK Non Fisik-BOKKB	2.353.192.700,00	3.561.238.860,00	(1.208.046.160,00)
DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00	0,00	390.304.000,00
DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	955.059.200,00	720.455.578,00	234.603.622,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	346.625.000,00	100.000.000,00	246.625.000,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	335.173.000,00	0,00	335.173.000,00
JUMLAH	195.218.961.394,00	140.134.976.125,00	55.083.985.269,00

5.4.1.2.1.2 Dana Desa**Rp150.640.826.000,00**

Penerimaan Dana Desa – LO tahun 2021 adalah sebesar Rp150.640.826.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.199.823.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp147.441.003.000,00.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO**Rp37.819,376,233,17**

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi untuk Tahun 2021 sebesar Rp37.819.376.233,17 terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

Tabel 5.4.12
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Bagi Hasil - LO	37.819.376.233,17	32.244.618.228,26	5.574.758.004,91
JUMLAH	37.819.376.233,17	32.244.618.228,26	5.574.758.004,91

**5.4.2.1.18.1 Pendapatan Bagi Hasil – LO****Rp37.819.376.233,17**

Pendapatan Bagi Hasil – LO merupakan realisasi pendapatan bagi hasil dari pemerintah propinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Pendapatan Bagi Hasil - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	5.369.439.595,40	4.374.991.353,87	994.448.241,53
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	6.854.391.623,44	4.669.499.486,47	2.184.892.136,97
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	17.620.466.085,63	14.923.443.540,03	2.697.022.545,60
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan - LO	24.735.160,70	10.987.755,89	13.747.404,81
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	7.950.343.768,00	8.265.696.092,00	(315.352.324,00)
JUMLAH	37.819.376.233,17	32.244.618.228,26	5.574.758.004,91

Pendapatan Bagi Hasil – LO mengalami kenaikan sebesar Rp5.574.758.004,91 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp32.244.618.228,26.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO**Rp61.953.053.912,00**

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Hibah – LO, Pendapatan Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.4.14
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Hibah - LO	30.100.159.038,00	52.485.922.441,00	(22.385.763.403,00)
Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan - LO	31.852.894.874,00	0,00	31.852.894.874,00
Jumlah	61.953.053.912,00	52.485.922.441,00	9.467.131.471,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp9.467.131.471,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO**Rp30.100.159.038,00**

Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, adapun pendapatan hibah – LO Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2021 sebesar Rp30.100.159.038,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.385.763.403,00 dibandingkan dengan pendapatan hibah TA 2020 sebesar Rp52.485.922.441,00. Adapun Pendapatan Hibah - LO dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.4.15
Pendapatan Hibah - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	11.776.037.880,54	45.287.011.231,00	(33.510.973.350,46)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	15.255.991.451,46	3.607.452.320,00	11.648.539.131,46
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	35.000.000,00	310.593.382,00	(275.593.382,00)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO	1.032.260.600,00	3.280.865.508,00	(2.248.604.908,00)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	2.000.869.106,00	0,00	2.000.869.106,00
Jumlah	30.100.159.038,00	52.485.922.441,00	(22.385.763.403,00)

5.4.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundangan- LO Rp31.852.894.874,00

Pendapatan Lainnya-LO berasal dari pendapatan Hibah Dana BOS untuk TA 2021 Rp31.852.894.874,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.739.446.113,00 dibandingkan dari TA 2020 sebesar Rp34.592.340.987,00 yang disajikan pada pos Lain-Lain Pendapatan – Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat.

Tabel 5.4.16
Lain-Lain Pendapatan - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Hibah Dana BOS	31.852.894.874,00	0,00	31.852.894.874,00
Jumlah	31.852.894.874,00	0,00	31.852.894.874,00

5.4.2 Beban - LO Rp1.211.847.682.253,34

Beban-LO merupakan belanja atau beban yang telah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.155.422.609.143,80 dan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.211.847.682.253,34.

5.4.5.1 Beban Operasi - LO Rp1.211.847.682.253,34

Beban operasi terdiri atas Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Lain-lain, Beban Bagi Hasil, dan Beban Bantuan Keuangan



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.4.17
Beban Operasi - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Pegawai	412.220.735.798,09	450.574.337.664,54	(38.353.601.866,45)
Beban Persediaan	63.178.626.007,28	72.298.082.015,00	(9.119.456.007,72)
Beban Jasa	135.841.320.214,20	95.372.951.595,98	40.468.368.618,22
Beban Pemeliharaan	17.036.418.574,69	16.523.008.513,96	513.410.060,73
Beban Perjalanan Dinas	56.768.766.206,00	36.159.185.389,50	20.609.580.816,50
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	1.459.590.100,00	1.416.385.700,00	43.204.400,00
Beban Hibah	57.767.730.246,75	23.157.850.000,00	34.609.880.246,75
Beban Bantuan Sosial	8.920.253.640,00	24.174.639.586,00	(15.254.385.946,00)
Beban Penyisihan Piutang	505.931.624,16	458.109.939,45	47.821.684,71
Beban Lain-lain	1.243.376.711,50	741.150.519,41	502.226.192,09
Beban Penyusutan Peralatan dan M	42.822.238.692,74	36.330.146.303,45	6.492.092.389,29
Beban Penyusutan Gedung dan Ban	18.297.991.603,62	17.142.387.904,04	1.155.603.699,58
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan d	168.281.055.295,44	152.373.984.279,27	15.907.071.016,17
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainn	0,00	201.245.728,51	(201.245.728,51)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwu	843.008.796,87	858.954.233,14	(15.945.436,27)
Beban Bagi Hasil	2.474.916.442,00	2.359.731.055,57	115.185.386,43
Beban Bantuan Keuangan	224.185.722.300,00	225.280.458.715,00	(1.094.736.415,00)
Jumlah	1.211.847.682.253,34	1.155.422.609.142,82	56.425.073.110,52

5.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO

Rp412.220.735.798,09

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai – LO merupakan bagian dari realisasi Beban dalam TA 2021, beban pegawai pada TA 2021 mengalami Penurunan sebesar Rp38.353.601.866,45 dibandingkan dengan realisasi beban pegawai pada TA 2020 yakni sebesar Rp450.574.337.664,54.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.4.18
Beban Pegawai- LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	218.042.101.001,00	223.479.781.276,00	(5.437.680.275,00)
2	Dinas Kesehatan	59.380.037.616,40	67.572.000.827,00	(8.191.963.210,60)
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	7.109.422.553,69	4.728.168.636,54	2.381.253.917,15
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	5.281.606.854,00	6.974.176.034,00	(1.692.569.180,00)
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan	3.500.228.526,00	5.636.075.735,00	(2.135.847.209,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.519.703.546,00	11.158.437.228,00	(6.638.733.682,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.785.571.001,00	2.869.097.353,00	(83.526.352,00)
8	Dinas Sosial	2.653.531.629,00	2.898.515.344,00	(244.983.715,00)
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.949.255.699,00	3.231.795.896,00	(282.540.197,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.361.340.786,00	4.026.752.442,00	(665.411.656,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.880.800.270,00	5.313.741.582,00	(1.432.941.312,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.378.831.843,00	3.206.560.890,00	(827.729.047,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.852.152.077,00	3.370.030.419,00	(517.878.342,00)
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	3.261.186.443,00	3.611.396.352,00	(350.209.909,00)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	3.165.989.877,00	3.595.150.705,00	(429.160.828,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.195.823.836,00	3.268.759.214,00	(72.935.378,00)
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.349.326.707,00	4.137.007.904,00	(787.681.197,00)
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	7.609.394.724,00	7.910.742.443,00	(301.347.719,00)
19	Sekretariat Daerah	11.877.077.717,00	15.243.405.940,00	(3.366.328.223,00)
20	Inspektorat Daerah	4.937.049.190,00	4.902.479.142,00	34.570.048,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	3.695.436.139,00	4.374.249.510,00	(678.813.371,00)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.563.591.799,00	9.642.893.530,00	(2.079.301.731,00)
23	Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	2.708.530.136,00	2.784.908.192,00	(76.378.056,00)
24	Sekretariat DPRD	14.490.908.243,00	15.192.950.881,00	(702.042.638,00)
25	Kecamatan Katingan Kuala	1.931.801.648,00	2.140.501.359,00	(208.699.711,00)
26	Kecamatan Mendawai	1.541.544.951,00	1.657.773.430,00	(116.228.479,00)
27	Kecamatan Kampang	1.611.765.271,00	1.654.680.353,00	(42.915.082,00)
28	Kecamatan Tasik Payawan	2.016.018.333,00	1.945.750.727,00	70.267.606,00
29	Kecamatan Katingan Hilir	3.163.926.648,00	3.380.418.178,00	(216.491.530,00)
30	Kecamatan Tew ang Sangalang Garing	2.912.237.350,00	3.078.865.546,00	(166.628.196,00)
31	Kecamatan Pulau Malan	2.682.243.817,00	2.710.344.184,00	(28.100.367,00)
32	Kecamatan Katingan Tengah	2.534.323.602,00	3.137.991.491,00	(603.667.889,00)
33	Kecamatan Sanaman Mantikei	1.564.559.804,00	1.517.566.080,00	46.993.724,00
34	Kecamatan Marikit	1.365.519.438,00	1.403.587.818,00	(38.068.380,00)
35	Kecamatan Katingan Hulu	1.920.939.129,00	2.109.598.463,00	(188.659.334,00)
36	Kecamatan Petak Malai	909.358.725,00	1.100.749.995,00	(191.391.270,00)
37	Kecamatan Bukit Raya	910.519.800,00	1.065.190.442,00	(154.670.642,00)
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.607.079.069,00	4.542.242.123,00	(1.935.163.054,00)
	Jumlah	412.220.735.798,09	450.574.337.664,54	(38.353.601.866,45)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.4.19
Beban Pegawai-LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	246.699.753.758,00	311.410.189.674,00	(64.710.435.916,00)
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	82.071.375.032,00	81.233.093.831,00	838.281.201,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	601.600.000,00	3.529.000.000,00	(2.927.400.000,00)
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	220.438.539,00	(220.438.539,00)
Beban Uang Lembur - LO	-	1.934.801.000,00	(1.934.801.000,00)
Beban Honorarium PNS	-	244.835.000,00	(244.835.000,00)
Beban Honorarium Non PNS	-	43.073.134.284,00	(43.073.134.284,00)
Beban Belanja Pegawai BLUD	3.942.109.293,88	4.728.168.636,54	(786.059.342,66)
Beban Pegawai Dana BOS - LO	-	4.200.676.700,00	(4.200.676.700,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.955.404.167,21	-	66.955.404.167,21
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	11.784.808.888,00	-	11.784.808.888,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	165.684.659,00	-	165.684.659,00
Jumlah	412.220.735.798,09	450.574.337.664,54	(38.353.601.866,45)

5.4.2.1.2 **Beban Persediaan****Rp63.178.626.007,28**

Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp63.178.626.007,28 mengalami penurunan sebesar Rp9.119.456.007,72 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.72.298.082.015,98 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.20
Beban Persediaan- LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	781.165.711,00	5.162.940.050,00	(4.381.774.339,00)
2	Dinas Kesehatan	12.253.071.275,92	10.559.262.060,56	1.693.809.215,36
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	9.963.282.328,36	7.929.277.871,17	2.034.004.457,19
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	1.245.276.378,00	787.243.830,00	458.032.548,00
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan	695.134.057,00	8.835.873.450,00	(8.140.739.393,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	384.021.421,00	194.241.639,00	189.779.782,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.012.442.228,00	1.654.156.270,00	(641.714.042,00)
8	Dinas Sosial	412.177.502,00	279.103.132,00	133.074.370,00
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	218.501.753,00	113.848.800,00	104.652.953,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	888.355.682,00	626.198.720,00	262.156.962,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.406.911.135,00	1.899.732.586,00	507.178.549,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	856.688.400,00	330.583.800,00	526.104.600,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	851.382.429,80	182.366.521,00	669.015.908,80
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	392.442.781,00	80.084.400,00	312.358.381,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	230.573.430,00	533.285.500,00	(302.712.070,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	187.113.974,00	68.617.516,00	118.496.458,00
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	398.368.974,00	439.686.540,00	(41.317.566,00)
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	7.806.826.097,00	3.166.900.440,00	4.639.925.657,00
19	Sekretariat Daerah	13.831.892.389,20	23.727.350.141,25	(9.895.457.752,05)
20	Inspektorat Daerah	354.018.990,00	138.568.028,00	215.450.962,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	852.332.550,00	269.486.500,00	582.846.050,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.690.043.514,00	1.256.578.835,00	433.464.679,00
23	Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	270.449.728,00	311.830.900,00	(41.381.172,00)
24	Sekretariat DPRD	1.599.052.176,00	2.241.767.450,00	(642.715.274,00)
25	Kecamatan Katingan Kuala	627.025.840,00	77.872.500,00	549.153.340,00
26	Kecamatan Mendaw ai	124.977.125,00	57.358.500,00	67.618.625,00
27	Kecamatan Kamipang	254.626.450,00	156.745.657,00	97.880.793,00
28	Kecamatan Tasik Payaw an	95.955.200,00	73.345.350,00	22.609.850,00
29	Kecamatan Katingan Hilir	583.617.100,00	260.697.740,00	322.919.360,00
30	Kecamatan Tew ang Sangalang Garing	96.455.276,00	60.375.002,00	36.080.274,00
31	Kecamatan Pulau Malai	100.131.400,00	29.255.000,00	70.876.400,00
32	Kecamatan Katingan Tengah	560.685.052,00	290.351.000,00	270.334.052,00
33	Kecamatan Sanaman Mantikei	127.620.000,00	65.050.000,00	62.570.000,00
34	Kecamatan Marikit	122.827.282,00	87.419.000,00	35.408.282,00
35	Kecamatan Katingan Hulu	374.231.104,00	61.871.000,00	312.360.104,00
36	Kecamatan Petak Malai	168.224.300,00	124.160.600,00	44.063.700,00
37	Kecamatan Bukit Raya	104.795.000,00	61.803.000,00	42.992.000,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	255.929.974,00	102.792.687,00	153.137.287,00
	Jumlah	63.178.626.007,28	72.298.082.015,98	(9.119.456.008,70)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.4.21
Beban Persediaan - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Bahan Pakai Habis	63.178.626.007,28	20.000.487.037,02	43.178.138.970,26
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	-	52.297.594.978,96	(52.297.594.978,96)
Jumlah		63.178.626.007,28	72.298.082.015,98	(9.119.456.008,70)

5.4.2.1.3 Beban Jasa**Rp135.841.320.214,20**

Realisasi Beban Jasa TA 2021 sebesar Rp135.841.320.214,20 mengalami kenaikan sebesar Rp40.468.368.618,22 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp95.372.951.595,98 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.22
Beban Jasa - LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	7.689.707.080,00	18.642.780.750,60	(10.953.073.670,60)
2	Dinas Kesehatan	43.608.879.440,60	42.183.030.753,50	1.425.848.687,10
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	2.131.170.226,28	2.330.458.315,00	(199.288.088,72)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	7.413.966.353,00	357.448.028,00	7.056.518.325,00
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan	5.593.338.694,82	4.039.927.973,00	1.553.410.721,82
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.844.426.255,00	213.708.793,00	7.630.717.462,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.564.056.568,00	1.904.311.827,00	(340.255.259,00)
8	Dinas Sosial	952.401.662,00	426.115.889,00	526.285.773,00
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.228.560.141,00	204.265.321,00	1.024.294.820,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.139.028.535,00	2.785.050.123,00	(646.021.588,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.264.917.543,00	1.507.832.587,88	2.757.084.955,12
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	947.078.245,00	433.322.755,00	513.755.490,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.346.422.256,00	377.207.332,00	1.969.214.924,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	3.798.969.027,00	3.094.879.989,00	704.089.038,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1.732.466.665,00	359.601.285,00	1.372.865.380,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	830.532.149,00	182.532.220,00	647.999.929,00
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.328.806.095,00	584.080.870,00	1.744.725.225,00
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	2.078.036.343,00	1.118.191.522,00	959.844.821,00
19	Sekretariat Daerah	7.304.452.822,00	6.346.510.583,00	957.942.239,00
20	Inspektorat Daerah	498.806.399,00	327.164.017,00	171.642.382,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.950.104.834,00	1.468.614.318,00	1.481.490.516,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.223.940.773,50	1.519.753.784,00	2.704.186.989,50
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	7.576.233.540,00	0,00	7.576.233.540,00
24	Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	2.948.599.247,00	1.114.344.218,00	1.834.255.029,00
25	Sekretariat DPRD	5.162.309.915,00	1.638.992.312,00	3.523.317.603,00
26	Kecamatan Katingan Kuala	768.155.403,00	167.122.800,00	601.032.603,00
27	Kecamatan Mendaw ai	229.377.700,00	88.413.700,00	140.964.000,00
28	Kecamatan Kampang	396.317.950,00	162.674.300,00	233.643.650,00
29	Kecamatan Tasik Payaw an	225.618.076,00	103.463.734,00	122.154.342,00
30	Kecamatan Katingan Hilir	1.056.388.732,00	377.623.705,00	678.765.027,00
31	Kecamatan Tew ang Sangalang Garing	454.987.913,00	166.008.280,00	288.979.633,00
32	Kecamatan Pulau Malan	156.188.976,00	92.699.236,00	63.489.740,00
33	Kecamatan Katingan Tengah	849.745.050,00	282.588.836,00	567.156.214,00
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	279.178.299,00	88.709.484,00	190.468.815,00
35	Kecamatan Marikit	353.337.463,00	146.075.737,00	207.261.726,00
36	Kecamatan Katingan Hulu	466.568.196,00	145.741.495,00	320.826.701,00
37	Kecamatan Petak Malai	221.258.600,00	130.512.750,00	90.745.850,00
38	Kecamatan Bukit Raya	148.962.800,00	68.025.000,00	80.937.800,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.078.024.247,00	193.166.973,00	884.857.274,00
Jumlah		135.841.320.214,20	95.372.951.595,98	40.468.368.618,22



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.4.23
Beban Jasa - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Jasa Kantor	103.484.039.281,25	29.573.666.895,88	73.910.372.385,37
2	Beban Premi Asuransi	13.683.151.130,50	17.021.117.752,00	(3.337.966.621,50)
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	842.044.000,00	366.835.000,00	475.209.000,00
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	2.513.553.143,00	1.549.450.000,00	964.103.143,00
5	Beban Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00
6	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	165.730.000,00	(165.730.000,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Kontruksi	4.576.406.872,82	3.029.719.803,00	1.546.687.069,82
8	Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi	4.267.371.450,00	0,00	4.267.371.450,00
9	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.149.732.643,00	890.234.400,00	2.259.498.243,00
10	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	105.000.000,00	2.356.200.000,00	(2.251.200.000,00)
11	Beban Pemeriksaan Laboratorium	0,00	62.235.000,00	(62.235.000,00)
12	Beban Jasa Medik dan Perawatan	0,00	17.726.428.224,50	(17.726.428.224,50)
13	Beban Peralatan Pemeliharaan Taman	0,00	72.179.850,00	(72.179.850,00)
14	Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	0,00	990.137.130,00	(990.137.130,00)
15	Beban Jasa Komunikasi/Telepon Seluler	0,00	27.772.531,00	(27.772.531,00)
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	3.138.877.193,36	2.330.458.315,00	808.418.878,36
17	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur	0,00	1.312.745.328,00	(1.312.745.328,00)
18	Beban Barang dan Jasa Dana BOS - LO	0,00	17.891.441.366,60	(17.891.441.366,60)
19	Beban Biaya Jasa Pembuatan Jurnal / Artikel - LO	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)
20	Beban Sampling	0,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)
21	Beban sewa aset tetap lainnya	30.240.000,00	0,00	30.240.000,00
22	Beban jasa Insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai Non ASN	50.904.500,00	0,00	50.904.500,00
	Jumlah	135.841.320.213,93	95.372.951.595,98	40.468.368.617,95

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Rp17.036.418.574,69

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.036.418.574,69 mengalami Kenaikan sebesar Rp513.410.060,73 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp16.523.008.513,96 dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.4.24
Beban Pemeliharaan - LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	292.946.638,00	174.321.383,00	118.625.255,00
2	Dinas Kesehatan	4.228.817.470,00	2.207.111.073,00	2.021.706.397,00
3	BLUD Mas Amsyar	0,00	135.186.000,00	(135.186.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	2.948.030.761,69	1.170.900.900,00	1.777.129.861,69
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	663.040.000,00	695.068.500,00	(32.028.500,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	382.068.937,00	303.947.057,00	78.121.880,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	235.899.000,00	156.346.165,00	79.552.835,00
8	Dinas Sosial	345.131.649,00	113.024.878,00	232.106.771,00
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	53.622.528,00	153.471.002,00	(99.848.474,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	258.217.731,00	448.724.868,00	(190.507.137,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	749.892.000,00	1.083.231.375,00	(333.339.375,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	128.739.000,00	116.587.364,00	12.151.636,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	294.341.137,00	74.901.150,00	219.439.987,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	88.752.200,00	230.145.177,00	(141.392.977,00)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	55.122.000,00	354.892.187,00	(299.770.187,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	276.562.700,00	168.718.500,00	107.844.200,00
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	314.491.333,00	63.062.700,00	251.428.633,00
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	151.861.078,00	120.685.800,00	31.175.278,00
19	Sekretariat Daerah	1.706.035.822,00	3.228.860.176,00	(1.522.824.354,00)
20	Inspektorat Daerah	342.201.445,00	253.312.674,00	88.888.771,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	386.859.299,00	451.579.926,00	(64.720.627,00)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	449.427.803,00	1.054.466.671,00	(605.038.868,00)
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	413.728.000,00	244.917.456,00	168.810.544,00
24	Sekretariat DPRD	905.627.583,00	1.049.689.700,00	(144.062.117,00)
25	Kecamatan Katingan Kuala	224.575.000,00	677.992.740,00	(453.417.740,00)
26	Kecamatan Mendawai	69.496.500,00	58.347.500,00	11.149.000,00
27	Kecamatan Kamipang	81.202.000,00	76.167.600,00	5.034.400,00
28	Kecamatan Tasik Payawan	73.865.500,00	45.609.500,00	28.256.000,00
29	Kecamatan Katingan Hilir	180.577.000,00	188.695.600,00	(8.118.600,00)
30	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	35.342.000,00	350.697.290,00	(315.355.290,00)
31	Kecamatan Pulau Malan	44.680.000,00	56.060.500,00	(11.380.500,00)
32	Kecamatan Katingan Tengah	133.244.735,00	469.808.551,96	(336.563.816,96)
33	Kecamatan Sanaman Mantikei	51.615.000,00	104.539.800,00	(52.924.800,00)
34	Kecamatan Marikit	65.903.700,00	195.591.000,00	(129.687.300,00)
35	Kecamatan Katingan Hulu	98.969.525,00	57.088.000,00	41.881.525,00
36	Kecamatan Petak Malai	110.445.000,00	94.395.150,00	16.049.850,00
37	Kecamatan Bukit Raya	42.520.000,00	22.226.000,00	20.294.000,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	152.566.500,00	72.636.600,00	79.929.900,00
	Jumlah	17.036.418.574,69	16.523.008.513,96	513.410.060,73



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.4.25
Beban Pemeliharaan – LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / (Penurunan)
1	Beban Pemeliharaan	17,036,418,574.69	16,523,008,513.96	513,410,060.73
	Jumlah	17,036,418,574.69	16,523,008,513.96	513,410,060.73

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas **Rp56.768.766.206,00**

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp56.768.766.206,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp20.609.580.816,50 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp36.159.185.389,50 dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.4.26
Beban Perjalanan Dinas - LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	1.180.198.597	528.499.426	651.699.171
2	Dinas Kesehatan	19.071.600.306	12.227.655.399	6.843.944.908
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	3.015.215.064	1.110.737.927	1.904.477.137
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.519.221.428	877.980.062	641.241.366
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.097.452.084	497.035.200	600.416.884
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	726.696.346	837.401.365	(110.705.019)
7	Dinas Sosial	826.389.043	455.083.565	371.305.478
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	398.075.000	321.226.400	76.848.600
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.986.610.080	499.673.000	1.486.937.080
10	Dinas Lingkungan Hidup	868.480.549	496.974.614	371.505.935
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	856.569.205	444.362.200	412.207.005
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.124.102.508	619.536.744	504.565.764
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	526.647.000	435.874.875	90.772.125
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	692.350.934	560.577.205	131.773.729
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	684.679.084	390.868.965	293.810.119
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	725.718.735	329.098.287	396.620.448
17	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	1.149.570.100	605.823.079	543.747.021
18	Sekretariat Daerah	3.060.857.689	1.893.629.004	1.167.228.685
19	Inspektorat Daerah	2.626.306.755	1.699.423.633	926.883.122
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	924.548.481	1.016.349.234	(91.800.753)
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.522.889.577	976.422.773	546.466.804
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	835.710.336	765.330.826	70.379.510
23	Sekretariat DPRD	6.771.606.622	5.201.533.582	1.570.073.040
24	Kecamatan Katingan Kuala	251.395.000	268.472.700	(17.077.700)
25	Kecamatan Mendawai	349.613.600	239.825.554	109.788.046
26	Kecamatan Kamipang	299.087.483	273.140.443	25.947.040
27	Kecamatan Tasik Payawan	288.940.600	268.651.000	20.289.600
28	Kecamatan Katingan Hilir	131.080.000	129.161.000	1.919.000
29	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	254.040.000	210.977.400	43.062.600
30	Kecamatan Pulau Malan	202.158.000	204.830.200	(2.672.200)
31	Kecamatan Katingan Tengah	350.282.000	263.809.600	86.472.400
32	Kecamatan Sanaman Mantikei	301.660.000	278.757.228	22.902.772
33	Kecamatan Marikit	331.430.000	193.715.800	137.714.200
34	Kecamatan Katingan Hulu	478.924.000	286.347.500	192.576.500
35	Kecamatan Petak Malai	265.690.000	208.570.800	57.119.200
36	Kecamatan Bukit Raya	422.195.000	260.440.000	161.755.000
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	650.775.000	281.388.800	369.386.200
	Jumlah	56.768.766.206	36.159.185.390	20.609.580.817



Tabel 5.4.27
Beban Perjalanan Dinas - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan / (Penurunan)
1	Beban Perjalanan Dinas	56.768.766.206,00	36.159.185.389,50	(20.760.278.516,00)
	Jumlah	56.768.766.206,00	36.159.185.389,50	20.609.580.816,50

5.4.2.1.6 Beban Bunga**Rp0,00**

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda, adapun realisasi beban bunga Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah Rp0,00.

5.4.2.1.7 Beban Subsidi**Rp1.459.590.100,00**

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi yang terealisasi pada tahun 2021 sebesar Rp1.459.590.100,00 lebih rendah Rp43.204.400,00 dari realisasi subsidi tahun sebelumnya.

Adapun rincian beban subsidi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021 merupakan realisasi atas beban subsidi ke Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan dari PPKD sebesar Rp1.320.890.100,00 dan Badan Usaha Milik Swasta dari Dinas koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp138.700.000,00, dapat tergambar sebagai berikut:

Tabel 5.4.28
Beban Subsidi
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Subsidi	1.459.590.100,00	1.416.385.700,00	43.204.400,00
JUMLAH	1.459.590.100,00	1.416.385.700,00	43.204.400,00

5.4.2.1.8 Beban Hibah**Rp57.767.730.246,75**

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, adapun rincian beban hibah Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021 dapat tergambar sebagai berikut:

Tabel 5.4.29
Beban Hibah berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

dalam rupiah

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan	27.722.479.581,47	-	27.722.479.581,47
Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	3.247.902.824,83	-	3.247.902.824,83
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.252.654.957,17	-	2.252.654.957,17
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.413.856.426,40	-	2.413.856.426,40
Sekretariat Daerah	10.554.871.928,56	-	10.554.871.928,56
BPKAD	10.573.362.111,32	23.157.850.000,00	(12.584.487.888,68)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.002.602.417,00	-	1.002.602.417,00
Jumlah	57.767.730.246,75	23.157.850.000,00	34.609.880.246,75



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.4.30
Beban Hibah
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
Beban Hibah Kepada Pemerintah daerah lainnya	16.444.753.848,88	-	16.444.753.848,88
Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	16.292.144.344,40	20.510.000.000,00	(4.217.855.655,60)
Beban Hibah Dana BOS	24.253.229.581,47	2.647.850.000,00	21.605.379.581,47
Beban Bantuan Keuangan kepada Parpol	777.602.417,00	-	777.602.417,00
Jumlah	57.767.730.191,75	23.157.850.000,00	34.609.880.191,75

5.4.2.1.9 Beban Bantuan Sosial

Rp8.920.253.640,00

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, adapun realisasi beban bantuan sosial pada tahun 2021 sebesar Rp8.920.253.640,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.254.385.949,00 dibandingkan dengan realisasi beban bantuan sosial pada tahun 2021 sebesar Rp24.174.639.586,00.

Tabel 5.4.31
Beban Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2021

dalam rupiah

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Kesehatan	6.723.849.140,00	-	6.723.849.140,00
Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	1.820.000.000,00	-	1.820.000.000,00
Dinas Sosial	376.404.500,00	-	376.404.500,00
BPKAD	-	24.174.639.586,00	(24.174.639.586,00)
Jumlah	8.920.253.640,00	24.174.639.586,00	(15.254.385.946,00)

Tabel 5.4.32
Beban Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / (penurunan)
Beban Bantuan Sosial Kepada Individu	105.178.500,00	-	105.178.500,00
Beban Bantuan Sosial Kepada Keluarga	260.044.000,00	-	260.044.000,00
Beban Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1.820.000.000,00	22.932.639.586,00	(21.112.639.586,00)
Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah	6.735.031.140,00	1.242.000.000,00	5.493.031.140,00
Jumlah	8.920.253.640,0000	24.174.639.586,0000	(15.254.385.946,00)

Realisasi Bantuan kepada Masyarakat berupa bantuan uang kepada masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni Sebesar Rp1.820.000.000,00. Beban Bantuan Sosial berupa pembayaran kontribusi bantuan iuran PBPU-BP sebesar. Rp6.735.031.140,00. Bantuan sosial uang kepada individu berupa beras, pakaian, kursi roda dan mesin kompresor sebesar Rp105.178.500,00. Bantuan sosial uang kepada keluarga berupa Bantuan Beras, barang dan BBR (Bahan Bangunan Rumah) kepada masyarakat korban kebakaran sebesar Rp.260.044.000,00.

**5.4.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang****Rp505.931.624,16**

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain, adapun beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp505.931.624,16 untuk gambaran terkait beban penyisihan piutang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.33
Beban Penyisihan Piutang
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	505.931.624,16	458.109.939,45	47.821.684,71
Jumlah	505.931.624,16	458.109.939,45	47.821.684,71

5.4.2.1.11 Beban Lain Lain**Rp1.243.376.711,50**

Beban lain-lain adalah beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi dan beban transfer. Beban lain-lain sebesar Rp1.243.376.711,50 yang merupakan Beban *Extracomptable* dan Beban Penurunan Nilai Investasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.34
Realisasi Beban Extracomptable
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Penurunan Nilai Investasi	402.673.763,50	0,00	402.673.763,50
Beban Extracomptable	840.702.948,00	739.200.519,41	101.502.428,59
Beban Lain-lain	0,00	1.950.000,00	(1.950.000,00)
Jumlah	1.243.376.711,50	741.150.519,41	502.226.192,09

5.4.2.1.12 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**Rp42.822.238.692,74**

Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp42.822.238.692,74 mengalami Kenaikan sebesar Rp6.492.092.389,29 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp36.330.146.303,45 dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.4.35
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Per PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	8.798.823.456,63	4.828.772.142,92	3.970.051.313,71
2	Dinas Kesehatan	8.451.004.338,79	5.543.107.108,69	2.907.897.230,10
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	6.714.822.598,98	5.639.266.983,95	1.075.555.615,03
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	2.010.282.688,92	2.010.172.278,96	110.409,96
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	864.801.689,09	898.692.162,66	(33.890.473,57)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	436.301.333,03	329.168.650,91	107.132.682,12
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.510.776.176,80	2.185.004.213,73	325.771.963,07
8	Dinas Sosial	158.561.608,01	117.295.660,43	41.265.947,58
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	111.157.428,21	197.516.009,94	(86.358.581,73)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	595.869.459,09	565.822.617,77	30.046.841,32
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.290.060.655,24	1.182.547.643,04	107.513.012,20
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	350.454.365,48	411.714.299,86	(61.259.934,38)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	187.946.500,01	253.709.958,47	(65.763.458,46)
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	668.552.501,14	672.405.568,21	(3.853.067,07)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	315.888.258,93	346.639.768,71	(30.751.509,78)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	212.722.650,32	241.979.011,71	(29.256.361,39)
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	296.011.402,47	358.961.634,47	(62.950.232,00)
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	648.023.829,78	773.708.763,83	(125.684.934,05)
19	Sekretariat Daerah	2.763.733.028,35	3.407.050.050,03	(643.317.021,68)
20	Inspektorat Daerah	276.286.953,56	287.855.322,49	(11.568.368,93)
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	707.919.321,25	923.858.520,85	(215.939.199,60)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.574.620.618,92	2.128.675.341,73	(554.054.722,81)
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	7.623.000,00	45.415.791,72	(37.792.791,72)
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	360.988.810,13	343.506.157,40	17.482.652,73
25	Sekretariat DPRD	985.322.576,40	1.010.676.801,95	(25.354.225,55)
26	Kecamatan Katingan Kuala	118.156.907,15	88.249.563,73	29.907.343,42
27	Kecamatan Mendawai	68.164.603,34	63.291.475,64	4.873.127,70
28	Kecamatan Kamipang	209.195.877,12	203.428.395,70	5.767.481,42
29	Kecamatan Tasik Payawan	65.020.941,43	65.944.093,94	(923.152,51)
30	Kecamatan Katingan Hilir	175.587.086,90	144.657.856,77	30.929.230,13
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	74.419.830,86	89.860.176,27	(15.440.345,41)
32	Kecamatan Pulau Malan	43.125.380,00	84.574.973,88	(41.449.593,88)
33	Kecamatan Katingan Tengah	157.730.228,57	140.799.553,31	16.930.675,26
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	30.273.662,86	88.827.132,20	(58.553.469,34)
35	Kecamatan Marikit	52.153.848,57	106.510.887,12	(54.357.038,55)
36	Kecamatan Katingan Hulu	139.044.852,16	127.269.901,88	11.774.950,28
37	Kecamatan Petak Malai	128.604.855,69	134.987.587,25	(6.382.731,56)
38	Kecamatan Bukit Raya	144.906.519,99	85.568.811,63	59.337.708,36
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	117.298.848,57	202.653.429,70	(85.354.581,13)
	Jumlah	42.822.238.692,74	36.330.146.303,45	6.492.092.389,29



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.4.2.1.13 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**Rp18.297.991.603,62**

Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.297.991.603,62 mengalami kenaikan sebesar Rp1.155.603.699,58 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp17.142.387.904,04 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.36
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	5.624.991.040,81	5.283.248.127,79	341.742.913,02
2	Dinas Kesehatan	2.175.040.651,52	1.432.294.361,23	742.746.290,29
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	343.415.062,45	309.702.532,00	33.712.530,45
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	857.672.477,81	703.261.488,13	154.410.989,68
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan	1.488.417.433,28	1.348.598.170,37	139.819.262,91
6	Satuan Polisi Pamong Praja	104.762.041,77	104.221.922,32	540.119,45
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.202.150,00	16.235.313,17	(33.163,17)
8	Dinas Sosial	142.791.441,06	140.933.236,71	1.858.204,35
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	175.586.799,98	176.095.975,89	(509.175,91)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan			
	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	154.524.410,37	132.047.938,35	22.476.472,02
	dan Keluarga Berencana			
11	Dinas Lingkungan Hidup	374.568.637,43	336.083.256,83	38.485.380,60
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44.237.948,91	43.182.361,04	1.055.587,87
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52.386.649,54	106.182.647,51	(53.795.997,97)
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan			
	Statistik	131.690.211,75	137.703.921,34	(6.013.709,59)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,			
	Perdagangan dan Perindustrian	931.737.110,37	932.433.584,94	(696.474,57)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan			
	Terpadu Satu Pintu	62.678.202,01	62.678.209,71	(7,70)
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan			
	Olahraga	839.139.523,48	914.231.827,59	(75.092.304,11)
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	920.803.718,35	924.688.461,26	(3.884.742,91)
19	Sekretariat Daerah	1.830.135.848,03	1.899.878.671,97	(69.742.823,94)
20	Inspektorat Daerah	132.513.624,00	132.699.254,96	(185.630,96)
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian			
	dan Pengembangan	241.995.259,04	254.949.216,91	(12.953.957,87)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	526.962.042,94	609.377.198,96	(82.415.156,02)
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
	(PPKD)	4.890.966,10	4.901.117,28	(10.151,18)
24	Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	126.129.602,20	134.304.477,77	(8.174.875,57)
25	Sekretariat DPRD	448.287.419,34	501.647.111,52	(53.359.692,18)
26	Kecamatan Katingan Kuala	90.151.013,45	87.057.691,96	3.093.321,49
27	Kecamatan Mendaw ai	24.004.000,00	24.053.689,98	(49.689,98)
28	Kecamatan Kampang	58.384.266,30	47.812.204,20	10.572.062,10
29	Kecamatan Tasik Payaw an	21.096.500,00	21.139.452,20	(42.952,20)
30	Kecamatan Katingan Hilir	84.635.110,97	69.734.652,53	14.900.458,44
31	Kecamatan Tew ang Sangalang Garing	31.909.300,00	27.479.392,09	4.429.907,91
32	Kecamatan Pulau Malan	20.441.838,87	16.892.922,86	3.548.916,01
33	Kecamatan Katingan Tengah	25.027.910,00	25.079.193,09	(51.283,09)
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	19.733.818,00	19.774.009,25	(40.191,25)
35	Kecamatan Marikit	14.441.964,00	14.471.434,36	(29.470,36)
36	Kecamatan Katingan Hulu	17.502.208,00	17.037.312,79	464.895,21
37	Kecamatan Petak Malai	71.928.569,91	63.388.078,97	8.540.490,94
38	Kecamatan Bukit Raya	18.198.241,44	18.552.162,75	(353.921,31)
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48.976.590,14	48.335.321,46	641.268,68
	Jumlah	18.297.991.603,62	17.142.387.904,04	1.155.603.699,58



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.4.2.1.14 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**Rp168.281.055.295,44**

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp168.281.055.295,44 mengalami kenaikan sebesar Rp15.907.071.016,17 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp152.373.984.279,27 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.37
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Per PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	75.731.992,22	53.629.459,47	22.102.532,75
2	Dinas Kesehatan	117.533.349,68	116.524.375,67	1.008.974,01
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	10.598.772,50	10.620.535,89	(21.763,39)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	154.735.927.524,38	140.669.212.316,07	14.066.715.208,31
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9.245.596.653,59	7.133.457.966,43	2.112.138.687,16
6	Satuan Polisi Pamong Praja	55.226.370,74	55.530.166,51	(303.795,77)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	201.250,00	201.663,24	(413,24)
8	Dinas Sosial	27.224.634,72	27.280.887,50	(56.252,78)
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	65.534.936,83	126.104.984,81	(60.570.047,98)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46.049.000,00	47.733.888,78	(1.684.888,78)
11	Dinas Lingkungan Hidup	496.212.150,25	530.331.513,86	(34.119.363,61)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.661.199,60	9.681.242,66	(20.043,06)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.270.200,00	5.297.328,60	(27.128,60)
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	48.041.521,69	47.967.437,64	74.084,05
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	13.097.525,24	63.364.060,20	(50.266.534,96)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	115.435.688,96	116.906.235,20	(1.470.546,24)
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	132.075.724,25	71.509.301,19	60.566.423,06
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	703.019.044,42	732.657.248,29	(29.638.203,87)
19	Sekretariat Daerah	412.230.626,29	412.765.289,00	(534.662,71)
20	Inspektorat Daerah	4.235.833,82	4.244.369,89	(8.536,07)
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	15.989.247,66	16.072.346,34	(83.098,68)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	142.971.673,38	307.931.729,47	(164.960.056,09)
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	1.125.007.891,94	1.318.135.575,66	(193.127.683,72)
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	97.557.723,54	97.748.334,30	(190.610,76)
25	Sekretariat DPRD	213.134.558,85	191.110.782,01	22.023.776,84
26	Kecamatan Katingan Kuala	68.780.200,00	13.449.900,95	55.330.299,05
27	Kecamatan Mendawai	520.000,00	521.053,50	(1.053,50)
28	Kecamatan Kamipang	755.807,97	823.816,85	(68.008,88)
29	Kecamatan Katingan Hilir	20.031.000,00	551.053,93	19.479.946,07
30	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	48.729.830,00	24.546.947,71	24.182.882,29
31	Kecamatan Katingan Tengah	95.099.502,50	78.154.686,73	16.944.815,77
32	Kecamatan Marikit	125.000,00	125.256,67	(256,67)
33	Kecamatan Katingan Hulu	96.645.500,00	56.095.426,39	40.550.073,61
34	Kecamatan Petak Malai	1.706.600,00	599.077,62	1.107.522,38
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.096.760,42	33.098.020,24	1.998.740,18
Jumlah		168.281.055.295,44	152.373.984.279,27	15.907.071.016,17

**5.4.2.1.15 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya****Rp0,00**

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp201.245.728,51 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp201.245.728,51 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.38
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	0,00	57.128.512,91	(57.128.512,91)
2	Dinas PUPR	0,00	1.878.850,10	(1.878.850,10)
3	Dinas Sosial	0,00	331.279,95	(331.279,95)
4	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
5	DP3AKB	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	75.329.214,22	(75.329.214,22)
8	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	0,00	292.265,57	(292.265,57)
9	Sekretariat Daerah	0,00	10.440.965,10	(10.440.965,10)
10	Sekretariat DPRD	0,00	37.366.570,84	(37.366.570,84)
11	Kecamatan Kampang	0,00	1.252.566,74	(1.252.566,74)
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	17.225.503,08	(17.225.503,08)
Jumlah		0,00	201.245.728,51	(201.245.728,51)

5.4.2.1.16 Beban Penyusutan Aset Lainnya**Rp0,00**

Realisasi Beban Penyusutan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.17 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud**Rp843.008.796,87**

Realisasi Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp843.008.796,87 mengalami penurunan sebesar Rp15.945.436,27 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp858.954.233,14 dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.4.39
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Per PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	43.610.886,47	36.249.524,89	7.361.361,58
2	Dinas Kesehatan	7.457.370,65	18.697.063,66	(11.239.693,01)
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	113.811.456,34	285.347.227,93	(171.535.771,59)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	18.250.136,91	5.771.024,08	12.479.112,83
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan	464.385.750,51	281.007.006,70	183.378.743,81
6	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.555.052,03	0,00	3.555.052,03
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.181.678,14	0,00	5.181.678,14
8	Dinas Lingkungan Hidup	15.687.106,48	39.330.595,48	(23.643.489,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.940.617,31	14.894.271,04	(8.953.653,73)
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	839.310,16	2.104.312,11	(1.265.001,95)
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2.207.535,59	6.052.170,43	(3.844.634,84)
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.340.065,01	38.592.833,69	(26.252.768,68)
13	Sekretariat Daerah	14.527.727,23	6.581.626,28	7.946.100,95
14	Inspektorat Kabupaten		43.695.523,61	(43.695.523,61)
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	119.647.330,60	26.922.053,39	92.725.277,21
16	Bappelitbang		32.095.831,62	(32.095.831,62)
17	Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	10.621.719,05	11.169.989,03	(548.269,98)
18	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja		3.564.791,89	(3.564.791,89)
19	Kecamatan Katingan Kuala	1.956.392,01	4.905.051,33	(2.948.659,32)
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.988.662,38	1.973.335,98	1.015.326,40
JUMLAH		843.008.796,87	858.954.233,14	(16.960.762,67)

**5.4.2.1.18 Beban Bagi Hasil****Rp2.474.916.442,00**

Beban transfer tahun 2021 sebesar Rp2.474.916.442,00 merupakan beban transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp115.185.386,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.40
Beban Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.486.571.658,00	2.011.460.183,30	(524.888.525,30)
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	988.344.784,00	348.270.872,27	640.073.911,73
Jumlah	2.474.916.442,00	2.359.731.055,57	115.185.386,43

5.4.2.1.18.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**Rp1.486.571.658,00**

Beban transfer bagi hasil pajak daerah merupakan bagian dari bentuk pengeluaran Pemerintah Kabupaten Katingan, yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, dan bertujuan meningkatkan kemampuan desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.

Adapun beban transfer bagi hasil pajak daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.486.571.658,00 mengalami penurunan sebesar Rp524.888.525,30 dibandingkan dengan realisasi beban transfer bagi hasil pajak daerah Tahun 2020 sebesar Rp2.011.460.183,30 dengan gambaran sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 5.4.41
Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.486.571.658,00	2.011.460.183,30	(524.888.525,30)
Jumlah	1.486.571.658,00	2.011.460.183,30	(524.888.525,30)

5.4.2.1.18.2 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah**Rp 988.344.784,00**

Untuk realisasi beban transfer bagi hasil retribusi daerah tahun anggaran 2020 periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp988.344.784,00 mengalami peningkatan sebesar Rp640.073.911,73.

Tabel 5.4.42
Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	988,344,784.00	348,270,872.27	640,073,911.73
Jumlah	988,344,784.00	348,270,872.27	640,073,911.73

5.4.2.1.19 Beban Transfer Bantuan Keuangan**Rp224.185.222.300,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan tahun 2021 sebesar Rp224.185.222.300,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.094.736.415,00.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Beban Transfer bantuan Keuangan terdiri atas Beban Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah Propinsi, Bantuan Keuangan ke Daerah Kabupaten/Kota Lainnya, dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.43
Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2021

dalam rupiah

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Bantuan Keuangan Antar Daerah Propinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	-
Beban Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	1.757.500.000,00	-	1.757.500.000,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	222.183.222.300,00	224.257.856.298,00	(2.074.633.998,00)
Beban Bantuan Keuangan kepada Parpol	-	777.602.417,00	(777.602.417,00)
JUMLAH	224.185.722.300,00	225.280.458.715,00	(1.094.736.415,00)

5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi – LO

Rp33.785.488.799,33

Dari perhitungan pendapatan dan beban operasi diperoleh surplus perhitungan sebesar Rp33.785.488.799,33

5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

(Rp8.776.774.250,00)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional yang disajikan dalam laporan operasional Pemerintah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 adalah (Rp8.776.774.250,00) dengan princiian sebagai berikut:

Tabel 5.4.44
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	40.868.400,00	544.385.024,00	(503.516.624,00)
Surplus Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	(745.380.164,15)	745.380.164,15
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(8.817.642.650,00)	(6.090.151.421,14)	(2.727.491.228,86)
Jumlah	(8.776.774.250,00)	(6.291.146.561,29)	(2.485.627.688,71)

5.4.4.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Rp40.868.400,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar yang disajikan dalam laporan operasional Pemerintah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp40.868.400,00

5.4.4.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Rp0,00

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang yang disajikan dalam laporan operasional Pemerintah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Nihil.

**5.4.4.3 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO Rp0,00**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang disajikan dalam laporan operasional Pemerintah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Nihil.

5.4.4.4 Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang Rp8.817.642.650,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar yang disajikan dalam laporan operasional Pemerintah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp8.817.642.650,00.

5.4.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp25.008.714.549,33

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa yang disajikan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 adalah Rp25.008.714.549,33.

5.4.5 Pos Luar Biasa Rp12.234.119.065,49

Pos Luar Biasa terdiri atas Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa yang disajikan dalam laporan operasional Pemerintah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp12.234.119.065,49

5.4.5.1 Beban Tak Terduga Rp12.234.119.065,49

Beban Tak Terduga tahun 2021 sebesar Rp12.234.119.065,49 mengalami penurunan sebesar Rp16.060.373.966,91 dari tahun sebelumnya .

5.4.6 Surplus/Defisit – LO Rp12.774.595.483,84

Perhitungan akhir Laporan Operasional tahun 2021 mengalami Surplus sebesar Rp12.774.595.483,84 dengan perhitungan sebagai berikut:

Surplus/Defisit - LO	Realisasi TA. 2021
Pendapatan	1.245.633.171.052,67
Beban	1.211.847.682.253,34
Surplus/Defisit Dari Operasi - LO	33.785.488.799,33
Kegiatan Non Operasional	8.776.774.250,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(8.776.774.250,00)
Pos Luar Biasa	12.234.119.065,49
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(12.234.119.065,49)
Suprlus/Defisit - LO	12.774.595.483,84

5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama Tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada PD. Sisa kas di Bendahara PD baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara PD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

akhir Tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Katingan TA. 2021 dan TA. 2020 terdiri atas :

Tabel 5.5.1
Laporan Arus Kas
Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	234.787.570.185,63	182.813.676.039,26
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan	(233.184.588.225,36)	(144.953.207.233,66)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/ Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	0,00	0,00

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi **Rp234.787.570.185,63**

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp234.787.570.185,63 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Kas Masuk **Rp1.224.761.615.445,74**

Tabel 5.5.2
Arus Kas Masuk
Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	14.754.038.100,80	16.919.152.120,00
Penerimaan Retribusi Daerah	3.220.291.235,00	4.354.333.425,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.867.993.171,00	7.738.215.980,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	39.084.801.121,12	31.019.397.571,23
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	32.771.297.626,00	40.792.508.282,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	82.157.732.981,00	47.991.887.491,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	625.956.787.000,00	634.091.753.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	195.218.961.394,00	140.134.976.125,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	10.079.243.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	36.411.231.342,82	29.884.994.312,90
Penerimaan Hibah	34.677.655.474,00	34.902.934.369,00
Penerimaan Lainnya	150.640.826.000,00	147.441.003.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.224.761.615.445,74	1.145.350.398.676,13

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.224.761.615.445,74 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Katingan TA. 2021.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar **Rp989.974.045.260,11**

Tabel 5.5.3
Arus Kas Keluar
Tahun Anggaran 2021



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja Pegawai	409.053.422.538,28	451.083.723.763,47
Belanja Barang	266.049.553.823,46	200.995.939.180,83
Belanja Subsidi	1.459.590.100,00	1.416.385.700,00
Belanja Hibah	64.220.930.745,87	23.157.850.000,00
Belanja Bantuan Sosial	9.030.857.525,00	25.198.228.982,00
Belanja Tak Terduga	13.499.051.785,50	33.044.405.240,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.486.571.658,00	2.011.460.183,30
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	988.344.784,00	348.270.872,27
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan	224.185.722.300,00	225.280.458.715,00
Jumlah Arus Kas Keluar	989.974.045.260,11	962.536.722.636,87

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp989.974.045.260,11 merupakan pembayaran Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp763.313.406.518 ditambah Transfer sebesar Rp226.660.638.742,00.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp234.787.570.185,63 yang diperoleh dari selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan (Rp233.184.588.225,36)

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2021 defisit sebesar Rp233.184.588.225,36. Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi berupa:

5.5.2.1 Arus Kas Masuk **Rp110.168.400,00**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi pada TA. 2021 adalah Rp110.168.400,00 yang diperoleh dari pelepasan/penjualan aset tetap berupa Penjualan atas peralatan dan mesin.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar **Rp233.294.756.625,36**

Tabel 5.5.4
Arus Kas Keluar
Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

Arus Kas Keluar	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja Modal Tanah	0.00	721,300,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,371,889,964.60	42,605,692,336.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59,853,368,408.95	38,763,843,708.97
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	115,350,629,751.81	52,673,339,171.69
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	840,868,500.00	3,544,637,621.00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	14,878,000,000.00	7,215,000,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	233,294,756,625.36	145,523,812,837.66



Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp233.294.756.625,36 merupakan pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 defisit sebesar Rp233.184.588.225,36 selisih dari Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Rp 0,00

5.5.3.1 Arus Kas Masuk Rp0,00

5.5.3.2 Arus Kas Keluar Rp0,00

5.5.4 Kenaikan/Penurunan Kas Rp1.602.981.960,27

Dari perhitungan arus kas masuk dan keluar semua aktivitas diketahui terjadi kenaikan kas sebesar Rp1.602.981.960,27

5.5.5 Saldo Awal Kas di BUD Rp182.256.414.754,83

Saldo Awal Kas di BUD sebesar Rp 182.256.414.754,83 terdiri dari :

Tabel 5.5.5
Saldo Awal Kas di BUD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian		Saldo Awal di BUD Tahun 2021 (Rp)
a	Saldo Awal Kas di BUD	172.618.243.382,88
b	Saldo Awal Kas di BLUD	4.836.168.077,31
c	Saldo Awal Kas Lainnya	4.755.292.697,64
d	Kas dibendahara pengeluaran	30.597,00
e	Kas dibendahara penerimaan	46.680.000,00
Jumlah		182.256.414.754,83

5.5.6 Saldo Akhir Kas di BUD Rp183.862.084.043,10

Saldo akhir kas di BUD sebesar Rp183.862.084.043,10 terdiri atas :

Tabel 5.5.6
Saldo Akhir Kas di BUD

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Kenaikan/Penurunan Kas	1.602.981.960,27	37.860.468.805,60
Saldo Awal Kas di BUD	182.256.414.754,83	144.333.845.128,11
Koreksi Penambahan/Pengurangan Saldo Kas	2.687.328,00	62.100.821,12
Koreksi Reklasifikasi Saldo	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD	183.862.084.043,10	182.256.414.754,83



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Rp183.862.084.043,11

Saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp183.862.084.043,11 terdiri atas:

Tabel 5.5.7
Saldo Akhir Kas
Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Kenaikan/Penurunan Kas	1.602.981.960,27	37.860.468.805,60
Saldo Awal Kas di BUD	182.256.414.754,83	144.333.845.128,11
Koreksi Penambahan/Pengurangan Saldo Kas	2.687.328,00	62.100.821,12
Koreksi Reklasifikasi Saldo Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD	183.862.084.043,10	182.256.414.754,83
Saldo Akhir Kas terdiri dari :		
Saldo Akhir Kas di Kasda	171.480.602.731,07	172.618.243.382,88
Saldo Akhir Kas BLUD	9.690.018.018,34	4.836.168.077,31
Saldo Akhir Kas Lainnya	2.691.463.293,70	4.755.292.697,64
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	30.597,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	46.680.000,00
Saldo Akhir Kas	183.862.084.043,11	182.256.414.754,83

**5.6 Penjelasan Akun – Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal Rp 3.129.984.721.596,92

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp 3.129.984.721.596,92 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2020.

Tabel 5.6.1
Ekuitas Awal
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/(Turun)
1	Dinas Pendidikan	339.276.296.525,51	309.126.307.835,23	30.149.988.690,28
2	Dinas Kesehatan	115.018.777.673,01	108.090.588.675,23	6.928.188.997,78
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	59.254.017.783,91	51.896.044.731,66	7.357.973.052,25
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	1.137.675.794.697,81	1.334.880.751.352,80	(197.204.956.654,99)
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan	165.202.147.653,71	160.785.450.615,83	4.416.697.037,88
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.118.558.424,02	6.955.025.712,45	163.532.711,57
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.370.244.924,82	13.001.622.084,96	7.368.622.839,86
8	Dinas Sosial	10.897.382.234,27	11.090.954.008,86	(193.571.774,59)
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	10.453.193.884,77	11.072.272.147,30	(619.078.262,53)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.057.689.535,60	7.719.840.959,39	337.848.576,21
11	Dinas Lingkungan Hidup	22.751.356.547,24	24.455.152.665,59	(1.703.796.118,35)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.512.803.311,37	5.879.352.457,77	(366.549.146,40)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.616.493.153,97	6.508.998.454,83	107.494.699,14
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	41.728.168.530,09	42.510.236.191,01	(782.067.660,92)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	49.727.008.129,40	49.147.339.689,68	579.668.439,72
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.736.546.673,67	4.900.951.583,70	(164.404.910,03)
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	44.320.141.253,54	41.463.995.566,08	2.856.145.687,46
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	75.949.029.832,53	80.246.740.532,49	(4.297.710.699,96)
19	Sekretariat Daerah	551.948.442.665,97	577.482.158.738,69	(25.533.716.072,72)
20	Inspektorat Daerah	6.936.343.514,26	7.557.209.383,69	(620.865.869,43)
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	24.803.500.654,56	26.594.676.377,09	(1.791.175.722,53)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	44.096.859.307,42	39.956.573.885,25	4.140.285.422,17
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	301.483.002.460,23	292.988.573.177,08	8.494.429.283,15
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.447.732.929,43	7.738.172.692,63	(290.439.763,20)
25	Sekretariat DPRD	28.504.661.481,24	29.784.517.462,25	(1.279.855.981,01)
26	Kecamatan Katingan Kuala	6.738.129.653,60	6.277.391.463,37	460.738.190,23
27	Kecamatan Mendawai	1.844.189.662,42	1.866.071.881,54	(21.882.219,12)
28	Kecamatan Kamipang	3.054.402.685,58	3.195.578.867,84	(141.176.182,26)
29	Kecamatan Tasik Payawan	1.676.102.115,71	1.813.904.661,85	(137.802.546,14)
30	Kecamatan Katingan Hilir	4.841.990.570,08	4.320.861.438,64	521.129.131,44
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	3.014.498.115,14	2.859.398.879,92	155.099.235,22
32	Kecamatan Pulau Malan	1.632.335.520,72	1.729.948.669,14	(97.613.148,42)
33	Kecamatan Katingan Tengah	2.257.711.806,07	2.265.864.569,60	(8.152.763,53)
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	1.360.057.890,07	1.458.006.434,52	(97.948.544,45)
35	Kecamatan Marikit	1.408.394.336,38	1.426.297.398,69	(17.903.062,31)
36	Kecamatan Katingan Hulu	2.412.764.451,88	1.571.084.469,56	841.679.982,32
37	Kecamatan Petak Malai	3.536.647.393,92	3.504.677.822,20	31.969.571,72
38	Kecamatan Bukit Raya	1.128.042.605,91	1.103.176.163,41	24.866.442,50
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.193.261.007,09	5.287.227.225,92	(93.966.218,83)
	Jumlah	3.129.984.721.596,92	3.290.512.996.927,74	(160.528.275.330,82)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.6.2 Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)**Rp12.774.595.483,84**

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit – LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp12.774.595.483,84.

Tabel 5.6.2
Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	2021	2020	naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	(270.392.325.684,60)	(258.556.439.624,99)	(11.835.886.059,61)
2	Dinas Kesehatan	(150.928.436.722,56)	(132.262.378.123,81)	(18.666.058.598,75)
3	BLUD Mas Amsyar	(15.701.097.473,77)	(8.960.459.670,48)	(6.740.637.803,29)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	(176.984.343.653,71)	(153.558.635.261,34)	(23.425.708.392,37)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(28.770.405.057,12)	(28.684.426.926,16)	(85.978.130,96)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5.951.338.068,51)	(5.478.287.290,38)	(473.050.778,13)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	(14.823.961.988,54)	(12.857.415.656,74)	(1.966.546.331,80)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(8.854.584.719,80)	(9.647.309.170,14)	792.724.450,34
9	Dinas Sosial	(5.897.478.668,79)	(4.461.358.872,59)	(1.436.119.796,20)
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(5.210.045.837,05)	(4.498.571.581,53)	(711.474.255,52)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(9.434.577.361,60)	(9.132.003.597,90)	(302.573.763,70)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(13.992.584.146,40)	(12.162.427.254,09)	(1.830.156.892,31)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.578.200.824,30)	(5.025.889.183,60)	(552.311.640,70)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(9.966.658.714,52)	(4.989.232.100,58)	(4.977.426.613,94)
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	(8.917.120.995,74)	(8.312.562.032,30)	(604.558.963,44)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	(6.804.363.600,63)	(6.301.440.626,28)	(502.922.974,35)
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(10.738.416.420,60)	(7.047.613.278,47)	(3.690.803.142,13)
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	(19.839.657.334,55)	(15.127.461.142,95)	(4.712.196.191,60)
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		(11.412.124.510,00)	11.412.124.510,00
20	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		(540.999.072,00)	540.999.072,00
21	Sekretariat Daerah	(51.157.895.226,66)	(53.667.248.755,45)	2.509.353.528,79
22	Sekretariat DPRD	(30.821.261.493,59)	(15.653.610.681,32)	(15.167.650.812,27)
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(5.341.376.349,30)	(4.257.652.705,31)	(1.083.723.643,99)
24	Kecamatan Katingan Kuala	(4.076.997.403,61)	(3.523.724.306,97)	(553.273.096,64)
25	Kecamatan Kumpang	(2.905.109.905,39)	(2.616.405.336,49)	(288.704.568,90)
26	Kecamatan Tasik Payawan	(2.781.365.150,43)	(2.555.841.857,14)	(225.523.293,29)
27	Kecamatan Katingan Hilir	(5.390.342.677,87)	(4.550.374.786,23)	(839.967.891,64)
28	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	(3.908.456.499,86)	(4.005.660.034,07)	97.203.534,21
29	Kecamatan Pulau Malan	(3.243.919.411,87)	(3.191.656.016,74)	(52.263.395,13)
30	Kecamatan Katingan Tengah	(4.694.958.080,07)	(4.685.332.912,09)	(9.625.167,98)
31	Kecamatan Sanaman Mantikei	(2.368.950.583,86)	(2.157.523.733,45)	(211.426.850,41)
32	Kecamatan Marikit	(2.300.535.095,57)	(2.143.382.933,15)	(157.152.162,42)
33	Kecamatan Katingan Hulu	(3.589.531.102,16)	(2.915.005.099,06)	(674.526.003,10)
34	Kecamatan Mendawai	(2.401.838.479,34)	(2.184.424.903,12)	(217.413.576,22)
35	Kecamatan Bukit Raya	(1.881.828.050,60)	(1.577.805.416,38)	(304.022.634,22)
36	Kecamatan Petak Malai	(1.786.747.361,43)	(1.853.332.538,84)	66.585.177,41
37	Inspektorat Kabupaten	(9.171.419.190,38)	(7.789.441.964,95)	(1.381.977.225,43)
38	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(18.564.226.280,95)	(8.792.955.403,72)	(9.771.270.877,23)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17.921.719.636,13	45.225.805.259,05	(27.304.085.622,92)
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	927.791.346.765,36	762.337.113.345,59	165.454.233.419,77
41	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(7.766.115.301,92)	(6.045.704.883,83)	(1.720.410.418,09)
	Jumlah	12.774.595.483,84	(25.621.200.640,00)	38.395.796.123,84



5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan **(Rp128.341.100,00)**

Koreksi Nilai Persediaan senilai (Rp128.341.100,00) disebabkan oleh:

- a. Koreksi Persediaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan **Rp44.652.000,00**
Penambahan Penambahan 4 (empat) ekor Anak Sapi hasil Pengembangbiakan di Pembibitan di Kec Tewang Sanggalang Garing dan Penambahan Bibit Sawit Ganda di Pembibitan Kec Tewang Sanggalang Garing.
- b. Koreksi Persediaan Obat BLUD RSUD Mas Amsyar **(Rp172.993.100,00)**
Koreksi atas kelebihan pengungkapan atas saldo akhir persediaan Obat-obatan tahun 2020 pada BLUD RSUD Mas Amsyar.

5.6.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap **Rp0,00**

Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp0,00 karena tidak ada dilakukan revaluasi atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Katingan.

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya **(Rp251.982.409.794,00)**

Koreksi Ekuitas Lainnya senilai (Rp251.982.409.794,00) yang disebabkan oleh:

- a. Koreksi Akumulasi Penyusutan **(Rp226.374.528.287,59)**
Koreksi Atas Metode Perhitungan Beban Akumulasi Penyusutan perubahan dari perhitungan harian menjadi perhitungan Tahunan berdasarkan (Peraturan Bupati Katingan No 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Tanggal 24 Desember 2021).
- b. Koreksi Pencatatan Bandara Tumbang Samba **(Rp30.000.000.000,00)**
Koreksi Atas Pencatatan Bandara Tumbang Samba Yang merupakan Aset Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Koreksi Investasi Permanen **(Rp4.934.342.334,42)**
Koreksi Investasi Permanen sebesar Rp4.934.342.334,42, terdiri dari Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen PDAM sebesar Rp3.207.681.010,26 dan Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen PT. KMP sebesar Rp1.726.661.324,16.
- d. Koreksi Saldo Awal Kas BOS **Rp2.687.328,01**
Jurnal Koreksi Saldo Awal Kas BOS REGULER Tahun 2021.
- e. Koreksi Piutang BLUD **Rp9.145.346.700,00**
Koreksi Saldo Awal Piutang BLUD sesuai Laporan Keuangan BLUD.
- f. Koreksi Tanah pada Sekretariat Daerah **Rp144.230.000,00**
Koreksi penambahan nilai Aset Tanah Hasil Inventarisasi Tanah Rumah Jabatan yang belum tercatat, berdasarkan keputusan Bupati Katingan Nomor 020/693 tanggal 30 desember tahun 2021 Tentang Penetapan Status Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
- g. Koreksi Tanah pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan **Rp7.636.800,00**
Koreksi penambahan nilai Aset Tanah Hasil Inventarisasi Tanah Kantor BPP Kec. Katingan Tengah yang belum tercatat, berdasarkan keputusan Bupati Katingan Nomor 020/691 tanggal 30 desember tahun 2021 Tentang Penetapan Status Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
- h. Koreksi Tanah pada RSUD Mas Amsyar **Rp26.560.000,00**



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Koreksi penambahan nilai Aset Tanah Hasil Inventarisasi Tanah Bangunan Tempat Tinggal yang belum tercatat, berdasarkan keputusan Bupati Katingan Nomor 020/689 tanggal 30 desember tahun 2021 Tentang Penetapan Status Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Rp2.890.648.566.186,76

Ekuitas akhir senilai Rp2.890.648.566.186,76 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6.13
Ekuitas Akhir
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	2021	2020	naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	336.788.489.181,80	50.573.287.826,03	286.215.201.355,77
2	Dinas Kesehatan	151.453.120.248,89	(24.151.382.432,62)	175.604.502.681,51
3	BLUD Mas Amsyar	64.854.901.595,29	43.074.638.316,18	21.780.263.279,11
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	923.682.622.687,21	1.084.209.293.691,47	(160.526.671.004,26)
5	Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	178.420.181.127,82	132.039.517.665,28	46.380.663.462,54
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.086.927.282,25	(5.904.793.687,30)	12.991.720.969,55
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.002.026.592,25	3.354.312.914,82	6.647.713.677,43
8	Dinas Sosial	10.627.571.334,39	6.629.595.136,27	3.997.976.198,12
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9.934.158.839,45	6.573.700.565,77	3.360.458.273,68
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.722.405.837,15	(1.424.503.666,10)	10.146.909.503,25
11	Dinas Lingkungan Hidup	28.325.721.488,91	12.267.909.508,04	16.057.811.980,87
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.083.126.910,66	945.364.602,37	4.137.762.308,29
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.984.153.221,68	1.498.769.004,53	2.485.384.217,15
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	10.364.252.991,50	34.192.239.737,09	(23.827.986.745,59)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	48.789.751.693,66	42.882.683.370,97	5.907.068.322,69
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.500.312.269,43	643.298.878,39	3.857.013.391,04
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	47.308.196.705,64	35.510.287.952,54	11.797.908.753,10
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	74.658.668.447,98	65.110.431.562,98	9.548.236.885,00
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	(11.412.124.510,00)	11.412.124.510,00
20	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	(540.999.072,00)	540.999.072,00
21	Sekretariat Daerah	538.368.036.130,98	523.643.043.608,36	14.724.992.522,62
22	Inspektorat Daerah	6.421.239.805,73	(233.244.514,62)	15.083.628.796,52
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	14.635.963.527,30	17.825.197.007,87	(3.189.233.480,57)
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	36.700.833.713,81	85.602.199.144,30	(48.901.365.430,49)
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	293.406.364.774,35	1.016.054.465.025,80	(722.648.100.251,45)
26	Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan	8.242.998.992,71	1.660.538.237,43	6.582.460.755,28
27	Sekretariat DPRD	29.211.415.295,74	14.127.786.499,22	3.961.925.224,27
28	Kecamatan Katingan Kuala	6.715.510.278,87	2.753.585.054,60	2.346.409.217,93
29	Kecamatan Mendaw ai	1.790.520.428,57	(318.353.021,58)	1.538.679.716,29
30	Kecamatan Kamipang	2.924.371.636,94	577.962.419,01	2.341.328.248,15
31	Kecamatan Tasik Payaw an	1.599.391.052,86	(741.937.195,29)	5.465.322.591,00
32	Kecamatan Katingan Hilir	5.233.835.129,51	(231.487.461,49)	4.274.116.410,20
33	Kecamatan Tew ang Sangalang Garing	3.127.285.307,34	(1.146.831.102,86)	2.986.860.752,42
34	Kecamatan Pulau Malan	1.523.138.353,11	(1.463.722.399,31)	4.513.327.741,79
35	Kecamatan Katingan Tengah	2.093.016.928,90	(2.420.310.812,89)	1.958.494.492,93
36	Kecamatan Sanaman Mantikei	1.258.977.194,00	(699.517.298,93)	2.019.182.753,89
37	Kecamatan Marikit	1.302.097.219,43	(717.085.534,46)	3.413.422.536,73
38	Kecamatan Katingan Hulu	2.069.493.693,90	(1.343.928.842,83)	2.108.873.450,15
39	Kecamatan Petak Malai	3.484.751.263,43	1.651.036.598,92	6.654.484.320,35
40	Kecamatan Bukit Raya	1.063.598.158,36	(475.081.557,93)	1.833.714.664,51
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.889.138.844,96	(191.119.621,11)	5.080.258.466,07
	Jumlah	2.890.648.566.186,76	3.129.984.721.596,92	(239.336.155.410,16)

**VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN****6.1 Kegiatan Majelis TP/TGR Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021****6.1.1 Aktivitas Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan**

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam pelaksanaan tugasnya.

Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk memproses kerugian daerah.

Atas dasar Peraturan Bupati Katingan tersebut Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi melakukan beberapa kali pemanggilan dan persidangan terhadap beberapa orang terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Dari proses pemanggilan dan pelaksanaan sidang yang telah dilakukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan dapat dihasilkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan terdapat pula beberapa kasus yang telah diselesaikan dengan melakukan pembayaran atas kerugian Daerah tersebut kemudian akan dilakukan penghapusan beberapa item kerugian daerah dari daftar piutang daerah, telah dilaksanakan pula rekonsiliasi atas beberapa kasus Tuntutan Perbendaharaan maupun Tuntutan Ganti Rugi pada Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya didukung dengan menyajikan bukti pendukung.

Adapun aktivitas Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Katingan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 6.1.1
Daftar Aktivitas TP/TGR
Kabupaten Katingan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jumlah Kewajiban	Jumlah Pengembalian	Sisa Lebih/(Kurang)	Keterangan
3	YTK S MDS	64.115.000,00	37.057.500,00	(27.057.500,00)	Proses Angsuran
5	SY	129.118.151,00	0,00	(129.118.151,00)	Proses Lelang Jaminan
6	ABD	609.473.003,00	0,00	(609.473.003,00)	Proses Sidang
8	DD	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	Proses Angsuran
9	JL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Lunas

Untuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang diterbitkan selama Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan sampai Tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 6.1.2
Daftar Terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTJM)
Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Saldo Awal/ Pengembalian di Tahun 2020	Jumlah Pengembalian s/d di Tahun 2020	Saldo	Keterangan
1	P	73.556.768,00	73.556.768,00	0,00	Usulan Proses Penghapusan
2	DD	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	Proses Setoran
3	JL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Lunas
Jumlah		92.556.768,00	73.556.768,00	19.000.000,00	

6.2 Barang Ekstrakomtabel (*Extracomptable*)

Penerapan dari Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Katingan, maka pencatatan barang-barang (selain barang persediaan) yang nilai satuannya berada di bawah batasan nilai kapitalisasi dilakukan terpisah dengan pencatatan barang yang menjadi aset tetap daerah.

Pada tahun 2021 ini, barang-barang yang nilai satuannya berada di bawah batasan nilai kapitalisasi, baik itu yang bersumber dari realisasi belanja tahun berkenaan maupun sumber-sumber lain dikeluarkan dari pencatatan/pembukuan aset tetap daerah dan dibukukan dalam daftar barang ekstra komptabel (*Extraomptable*).

Jumlah barang-barang *Ekstrakomptabel* per 31 Desember 2021 sebesar Rp840.702.948,00 tidak dimasukkan kedalam perhitungan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, akan tetapi tetap dilaporkan dalam Laporan Barang Milik Daerah.

6.3 Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah

6.3.1 Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02

Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran (TA) 2020 disajikan bahwa, pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh karena itu, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUD perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Pendapatan yang diterima oleh satker/PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain diluar Pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Biaya Non Personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain, namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.



PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 yang di susun menjadi laporan Keuangan Tahunan, setelah melalui perhitungan yang terperinci dan *cross check* silang antara instansi-instansi terkait semoga tidak ada yang terlewatkan dalam perhitungan anggaran ini. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, baik Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2021.

Kita maklumi bahwa perhitungan anggaran ini merupakan realita dari kebijakan dan Peraturan yang sudah ditentukan melalui penetapan/pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan tersebut selain ditujukan untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang juga merupakan suatu kewajiban Pemerintah Daerah kepada rakyat melalui wakil-wakilnya didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dengan demikian rakyat didaerah ini dapat mengetahui sampai sejauh mana dana yang bersumber dari rakyat telah dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat itu sendiri sebagaimana telah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan anggaran tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan dan keterbatasan sehingga belum semua rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diwujudkan, walaupun untuk itu Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana tersebut sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Daerah, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis operasional.

Atas landasan berpikir tersebut, harapan bersama kiranya Perhitungan Anggaran ini dapat memperoleh penilaian lebih baik dari tahun kemarin serta mendapat persetujuan dari Dewan Yang Terhormat dalam waktu singkat menjadi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 beserta Catatan Atas Laporan Keuangan diajukan kepada Dewan Yang Terhormat, dimana sebelum Laporan Keuangan ini disusun, kami memperoleh saran-saran yang bermanfaat dari berbagai pihak.

Permasalahan-permasalahan yang kemungkinan memerlukan penjelasan lebih lanjut dan atau belum cukup jelas dapat diberikan penjelasan sepenuhnya dalam Rapat Kerja Pemerintah dan Dewan Yang Terhormat.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan ucapkan banyak terimakasih. Sekian.

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS